

**Telaah Dinamika Pranata Sosial Tentang Kearifan Lokal Masyarakat Pantai:
Melestarikan Budaya Bahari Dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata**

JAGAD BAHARI NUSANTARA

**irektorat
dayaan**



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2011**

7
9-11
SHABI ALHANN

gio.2
SUR
j

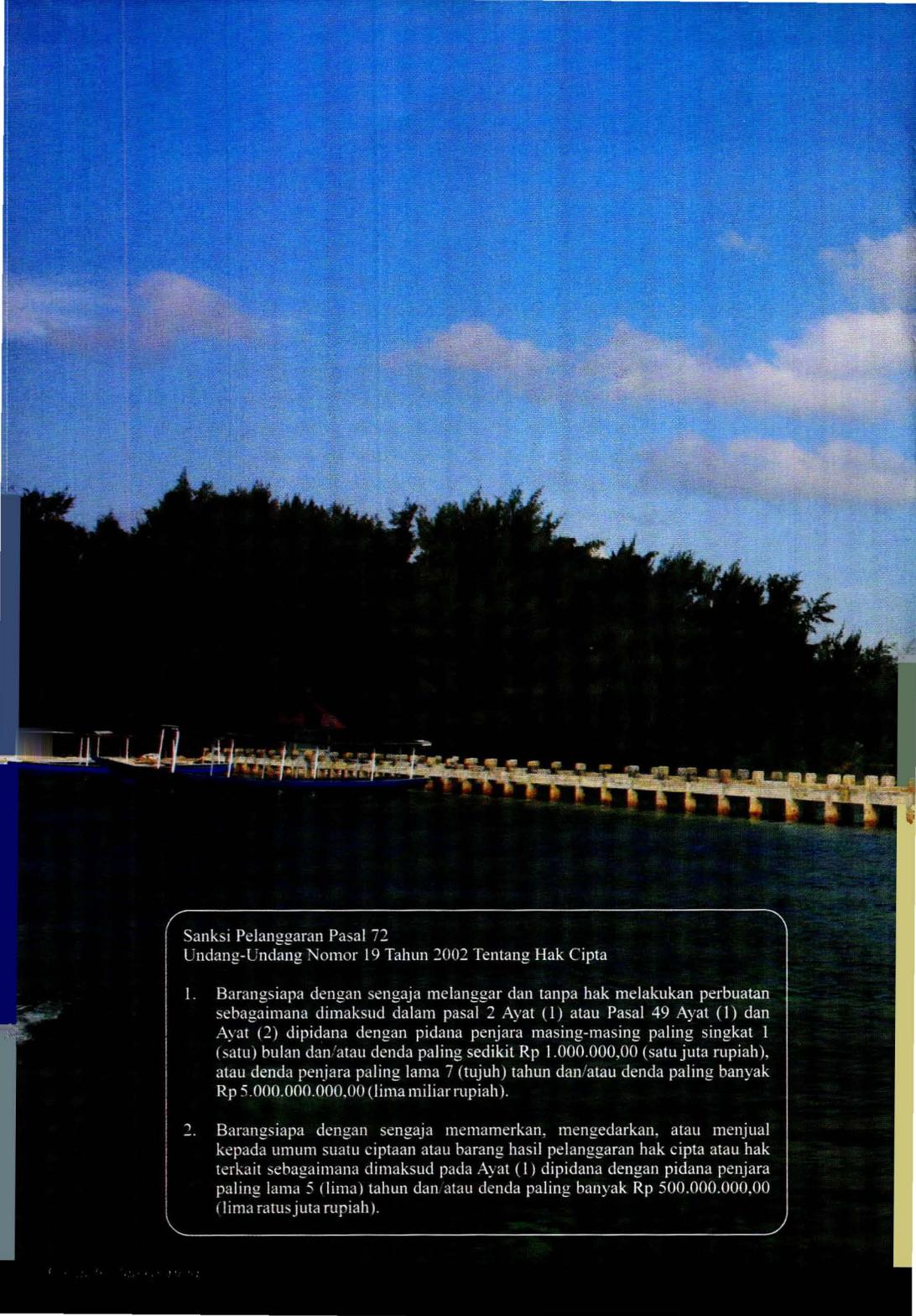
910.2 SURJ

**Telaah Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Pantai:
Melestarikan Budaya Bahari Dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata**

JAGAD BAHARI NUSANTARA



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2011**



Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau denda penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Telaah Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Pantai:
Melestarikan Budaya Bahari Dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

JAGAD BAHARI NUSANTARA



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2011

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jagad Bahari Nusantara/Darmawan Salman ... (et al);
penyunting, Surya Yuga. -- Ed. 1 Cet. 1
-- Jakarta, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011

x + 160 hlm., 148 mm. x 210 mm.

ISBN 978-979-1274-44-9

1. Indonesia -- Kebudayaan
- I. Darmawan Salman II. Surya Yuga

JAGAD BAHARI NUSANTARA

Penulis:

**Darmawan Salman, Tasrifin Tahara, Nasruddin Suyuti,
Munsi Lampe, Eymal B. Demmalino**

Penyunting:

Surya Yuga

Tata Letak dan Desain:

Madio Sudarmo

Pewawancara:

**Surya Yuga, M. Alimuddin,
Madio Sudarmo, Ganda Manullang**

Seri Pranata Sosial

Cetakan 1 2011

Diterbitkan oleh:

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

ISBN 978-979-1274-44-9



9 789791 274449



Sambutan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata



Mengamati eksistensi dan potensi lautan, maritim ataupun bahari Indonesia selalu memunculkan gagasan-gagasan baru pembangunan masyarakat Indonesia, sebab, lautan adalah sisi terpenting dalam wawasan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan karena potensi budaya dan wisata bahari kita yang lebih unggul dibandingkan pesona pantai negara lain, telah memberikan inspirasi dalam **Masterplan Percepatan dan**

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir/pantai.

Bila disandingkan dan disejajarkan dengan arus utama pembangunan berwawasan daratan, maka akan terjadi perbedaan titik tolak pemikiran dan argumentasi dalam menilai jagad bahari kita. Padahal warisan budaya pesisir kita telah meninggikan derajat kebudayaan masyarakat Indonesia, dengan demikian keterlibatan masyarakat pesisir/pantai dalam perlindungan dan revitalisasi budaya haruslah diberikan peran sederajat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, adanya paradigma dan persepsi bahwa lautan belum menjadi sumber potensial pembangunan masyarakat, menyebabkan pembangunan nasional kita masih berorientasi daratan (*land based development*).

Dalam dunia pewayangan ada *lakon* “**Banyu Suci Pawitra Sari**” yang menceritakan bahwa Dewa Ruci mengajarkan ilmu kesempurnaan hidup kepada Bima di dasar samudera. Begitu pula dalam *lakon wahyon* yang berisi tentang “**Wahyu Hastha Brata**” yaitu delapan ajaran kepemimpinan yang menyatakan salah satunya bahwa sifat pemimpin hendaknya disesuaikan dengan keutamaan sifat samudera yang penuh

kesabaran dan kasih sayang. Semua ini membuktikan bahwa budaya bangsa Indonesia menempatkan bahari sebagai bagian terpenting dari “makna tanah air Indonesia”.

Memang menelaah dunia bahari adalah suatu cara mengabadikan dan menghormati keberanian pelaut-pelaut ulung dan seniman-budayawan pesisir pantai yang “mendamparkan” dirinya pada kreativitas untuk membangkitkan keyakinan dirinya dan masyarakatnya bahwa “dari buih-buih gelombang lautan kehidupan” dapat pula terlahir jiwa pejuang kehidupan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Untuk itu kami menyambut baik sekaligus menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial yang telah menelaah “Dinamika Pranata Sosial terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Pantai: Melestarikan Budaya Bahari dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata”.

Buku “**Jagad Bahari Nusantara**” ini secara komprehensif telah mengungkapkan sekilas kompleksitas nilai-nilai pranata masyarakat bahari yang sangat bermanfaat bagi pembentukan watak dan jati diri menuju bangsa yang bermartabat. Saya yakin buku ini dapat pula memberi arti strategis bagi pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berwawasan maritim.



Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,

Jero Wacik

Ir. Jero Wacik, S.E.

Kata Pengantar

Peranan air sangat vital bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kecenderungan pola pemukiman manusia selalu mengutamakan faktor keberadaan dan ketersediaan sumber air. Tidaklah mengherankan jika pembangunan pemukiman selalu dimulai dari daerah tepi sungai atau laut, di samping untuk jaminan ketersediaan kebutuhan air minum juga untuk kemudahan sarana perhubungan dan transportasi.

Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, armada kelautan juga mempunyai peranan penting sebagai penunjang kemampuan ekspansi kekuasaan maupun hubungan perdagangan antarpulau dan antarkerajaan. Bahkan dalam masa keemasan kerajaan Gowa, Majapahit dan Sriwijaya telah mengukir prestasi sebagai predikat bangsa bahari, dengan keahlian melayarkan perahu/kapal ke samudera luas, teknik pembuatan perahu, pengetahuan astronomi dan pembacaan tanda-tanda alam untuk mencari ikan atau berlayar ke pulau-pulau yang jauh. Kearifan lokal yang berkaitan dengan budaya bahari pun tumbuh subur dengan ritual-ritual keseharian yang diyakini sebagai medium untuk menjaga keseimbangan antara penguasa laut dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. Proses pewarisan kearifan lokal tentang budaya bahari antar generasi berlangsung secara alamiah.

Sayangnya, sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut seluas 7,9 juta km² yang mempersatukan 17.000 lebih pulau, dengan potensi sumber daya kelautan dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Sejak zaman kolonial hingga sekarang, orientasi pembangunan kita masih terfokus pada daratan, sementara laut hanya diperlukan sebagai tempat eksploitasi sumber daya alam secara ekstraktif, pembuangan limbah industri dan rumah tangga serta berlangsungnya berbagai kegiatan ilegal.

Boleh jadi pola pembangunan yang berbasis daratan itulah yang menjadi salah satu penyebab kurang efisiensinya pembangunan ekonomi kita selama ini. Artinya kita belum memanfaatkan fakta sejarah dan geografis sebagai Negara maritim dan kepulauan terbesar dengan potensi ekonomi kelautan yang dapat diibaratkan sebagai

'raksasa yang tertidur'. Padahal, budaya laut yang begitu besar tentunya dapat mengilhami nilai-nilai filosofi tentang semangat kegigihan dan pantang menyerah, keuletan dalam bekerja, pelestarian lingkungan, di samping keahlian membuat perahu layar serta membaca tanda-tanda alam. Akibatnya, masyarakat pantai/pesisir seolah terbiarkan secara kondisional dalam kemiskinan struktural, dan kearifan budayanya semakin terkikis dengan perkembangan yang ada.

Kondisi yang memprihatinkan ini tentunya merupakan permasalahan yang perlu dicarikan solusinya, antara lain melalui telaahan yang merupakan program kerja Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011. Buku ini merupakan rangkuman naskah-naskah lokakarya yang mengambil tema “Dinamika Pranata Sosial terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Pantai: Melestarikan Budaya Bahari dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata”. Kegiatan ini merupakan upaya dalam mengumpulkan berbagai gagasan dan solusi melalui dialog dan pengumpulan data lapangan; dalam rangka penyusunan kebijakan untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pembicara, peserta dialog, nara sumber di lapangan, serta instansi dan lembaga yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2011

Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial,



Drs. Surya Yuga, M.Si.

Daftar Isi

1.	Sambutan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata	v
2.	Kata Pengantar	vii
3.	JAGAD BAHARI NUSANTARA: Pendasaran Kearifan Lokal bagi Dinamika Pranata Sosial dalam Meniti Semangat Zaman <i>Darmawan Salman, Universitas Hasanuddin, Makassar</i>	1
4.	POLITIK IDENTITAS ORANG BAJO <i>Tasrifin Tahara, Universitas Hasanuddin, Makassar</i>	19
5.	INTERAKSI ORANG BAJO DAN ORANG BUGIS Dalam Konteks Kearifan Lokal–Global di Desa Sulaho, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara <i>H. Nasruddin Suyuti, Universitas Haluoleo, Kendari</i>	37
6.	NOTULA SESI PERTAMA	59
7.	DINAMIKA KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI ORANG BAJO <i>Munsi Lampe, Universitas Hasanuddin, Makassar</i>	69
8.	SISTEM PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS BAHARI <i>Eymal B. Demmallino, Universitas Hasanuddin, Makassar</i>	89
9.	NOTULA SESI KEDUA	107

10.	HASIL ORIENTASI LAPANGAN	127
	IDENTITAS SUKU BAJO di Dusun Mola Samaturu, Mantiggola dan Sappela di Kabupaten Wakatobi	128
	IDENTITAS SUKU LAUT ATAU SUKU SAWANG di Desa Jalan Baru, Desa Juru Sebarang, dan Desa Gantung di Kabupaten Belitung	135
11.	PERTANYAAN LAPANGAN	142
12.	TENTANG PARA PENULIS	145



**JAGAD BAHARI NUSANTARA:
Pendasaran Kearifan Lokal bagi Dinamika Pranata Sosial
dalam Meniti Semangat Zaman**

Darmawan Salman
Universitas Hasanuddin, Makassar

**Jagad Satu:
Tentang Negara Kepulauan, Benua Maritim
dan Bangsa Pelaut**

Tidak ada yang membantah bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, yakni entitas darat berisi pulau-pulau yang tersambungkan satu sama lain oleh laut dalam, perairan dangkal, teluk dan selat serta danau-danau. Yang di dalamnya terdapat Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi dan Jawa sebagai lima pulau besar. Yang di dalamnya terdapat pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Buru, Halmahera, Selayar, Tual, Alor dan ribuan lainnya. Yang di dalamnya lagi terdapat gugus kepulauan Aru, Tanimbar, Sula serta puluhan ribu pulau kecil yang berpenghuni maupun

tidak berpenghuni dan yang bernama maupun yang belum bernama. Yang ada adalah pulau-daratan, lalu laut-perairan menyambungkannya satu sama lain, lalu menjelmakannya menjadi Nusantara.

Tidak ada yang membantah bahwa Indonesia adalah sebuah benua maritim, yakni entitas laut-perairan yang di dalamnya tertaburi oleh pulau besar, sedang dan kecil serta gunung-gunung berapi yang letusannya dahsyat. Yang di dalamnya terhampar Laut Jawa, Banda, Arafura, Sulawesi, Maluku dan Sulu beserta teluk dan selatnya, membentang antara Samudera Pasifik hingga Samudera Hindia. Yang di dalamnya terbujurkan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas perairan 5,8 juta kilometer persegi, serta kedalaman laut yang tak terkirakan. Yang ada adalah laut-perairan, lalu gunung dan pulau sambung-menyambung mengisinya, dan menjelmakannya menjadi Nusantara.

Tetapi apakah tidak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia saat ini bukan bangsa pelaut? Bahwa perekonomian bangsa Indonesia lebih banyak mengandalkan sumberdayanya dari eksistensi sebagai negara kepulauan dibanding sebagai benua maritim? Bahwa budaya bangsa Indonesia lebih banyak mengembangkan tradisi tani-feodal dibanding tradisi maritim-bahari? Bahwa bangsa Indonesia lebih banyak mengandalkan masyarakat agraris-kota dibanding masyarakat bahari-pesisir? Bahwa kampus dan lembaga penelitian bangsa Indonesia lebih banyak mengkaji dan mengembangkan pengetahuan terkait daratan dibanding lautan? Bahwa dunia ketentaraan dan kepolisian bangsa Indonesia lebih kuat dalam pengamanan di darat dibanding pengamanan di laut? Bahwa golongan masyarakat yang paling minim merasakan pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur lebih dominan adanya di pesisir dan pulau-pulau kecil dibanding mereka yang di daratan pulau-pulau besar? Bahwa pariwisata Indonesia berkembang lebih mengandalkan destinasi darat dibanding destinasi perairan?

Masa kecil kita memang sering mendengarkan lagu yang mengisahkan bahwa nenek-moyang kita seorang pelaut. Dongeng-dongeng pengantar tidur juga banyak berkisah tentang tokoh-tokoh yang berhubungan dengan laut: di tanah Melayu ada kisah tentang si Malin Kundang yang terkutuk menjadi batu karena durhaka setelah kaya dalam pelayaran lalu lupalah akan bundanya; di tanah Sunda ada kisah tentang Sangkuriang yang marah cintanya ditolak karena sang terkasih ternyata bundanya sendiri sehingga perahu yang dibuat untuk persembahan cinta diobrak-abrikan hingga membentuk Gunung

Tangkuban Perahu; di tanah Bugis dikenal kisah Sawerigading yang membuat perahu *ILawarlenreng* untuk menemui Putri We Cudai setelah diketahui bahwa We Tenri Abeng yang dicinta ternyata saudaranya sendiri, dan dalam perjalanan pulang perahu tersebut terhempas ombak lalu kandas terbelintang patah karena konon melanggar sumpah sendiri sebelum berlayar; di tanah Bali dan Jawa berkembang cerita tentang Panji yang tergambarkan sebagai tokoh dalam kemajuan pramodern masyarakat pesisir (Vickers, 2009).

Buku-buku sejarah memang banyak berkisah tentang peradaban bahari bangsa Indonesia di masa lalu. Dikisahkan bahwa berbagai pemukiman pantai di Nusantara pernah menjelma sebagai bandar yang diperhitungkan dalam pelayaran dan perniagaan dunia, Banten yang kejayaannya kemudian digantikan Batavia; Demak yang kejayaannya kemudian digantikan Semarang; Gresik yang kejayaannya kemudian digantikan Surabaya; Gowa yang kejayaannya kemudian digantikan Makassar. Dikisahkan pula betapa ulungnya para pelaut Nusantara mengarungi samudera (Dick-Read, 2005); ada yang menjadi saudagar kaya raya memperniagakan berbagai hasil bumi, barang kerajinan, serta emas dan logam; ada yang menjadi pedagang budak dan perompak gagah berani menakutkan kawan dan lawan; ada pula yang menjadi petualang mendatangi dan membuka daerah baru serta menyebarkan syiar agama.

Artinya, di masa lalu bangsa dan nenek moyang kita memang menumpukan peradabannya di atas pendasaran budaya pesisir dan bahari. Di masa lalu bangsa dan nenek moyang kita memang telah mengembangkan keunggulan berdasarkan potensi yang dimunculkan oleh hamparan laut dan isinya. Lalu mengapa pada masa kini kita bukan lagi bangsa pelaut, bukan lagi bangsa yang mengembangkan kejayaan berdasarkan budaya bahari? Selanjutnya, walaupun saat ini kita bukan lagi bangsa pelaut, bukan lagi masyarakat yang mengandalkan budaya bahari, pelajaran apa yang bisa dimaknai dan ditransformasikan dari jagad bahari masa lalu tersebut?

Setelah uraian pendahuluan ini, tulisan ini hendak menguraikan mengapa bangsa kita semakin mendasarkan peradabannya pada daratan dan tani ketika jaman pembangunan mengisi kemerdekaan. Setelah itu, dicoba rekonstruksi transisi berkepanjangan yang dialami peradaban bahari/maritim kita pada jaman pembangunan tersebut, dengan mendalami sebuah setting budaya bahari di Indonesia yakni Tanjung

Bira di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, di mana terdapat kasus komunitas pembuat perahu, pelayar niaga dan penangkap ikan. Tulisan ini kemudian merefleksikan poin-poin spirit, nilai-nilai dan kearifan lokal yang bisa dipetik dari pemahaman mendalam atas dinamika komunitas maritim tersebut, lalu pada bagian terakhir



Perahu Warung Keliling, Wakatobi (Surya Yuga)

diidentifikasi sejumlah agenda struktural dan kultural yang dapat didorong guna mengaruskan Jagad Bahari Nusantara dalam wacana, kebijakan maupun praktek perubahan berencana ataupun perubahan alamiah di tanah air.

Jagad Dua: Keterpinggiran Bahari karena Arus Tani Pembangunan

Sejarah menunjukkan bahwa Jagad Bahari Nusantara mengalami perkembangan justeru sebelum memasuki alam kemerdekaan. Perdagangan bebas rempah-rempah dan hasil bumi lainnya yang melibatkan orang Portugis, Belanda, Arab dan India telah meramaikan bandar-bandar di Nusantara sebelum penjajahan, dan karena daya tarik rempah-rempah itu pula persatuan dagang VOC dari Belanda berubah diri menjadi penjajah, lalu memonopoli perdagangan tersebut.

Perkebunan tembakau, tebu dan teh yang kemudian dikembangkan penjajah Belanda tidak lagi meramaikan pelayaran niaga Nusantara melainkan langsung diangkut ke negeri Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, apalagi pada era pembangunan dalam pemerintahan Soeharto, orientasi lebih ditekankan untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan karena itu pembangunan pertanian menjadi prioritas. Pada era ini didorong revolusi hijau dengan fokus utama mengubah pertanian tradisional menjadi pertanian modern melalui penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk sintetis, aplikasi pestisida untuk pengendalian hama, perbaikan teknik agronomi dan pembangunan irigasi. Modernisasi pertanian ini berhasil meningkatkan produksi padi sawah untuk swasembada bangsa, tetapi tidak berhasil menggairahkan perdagangan beras berhubung produksi tersebut dikumpulkan dan didistribusi oleh lembaga bernama Bulog (Badan Urusan Logistik) demi mengamankan cadangan pangan nasional. Dengan tidak bergairahnya perdagangan beras, revolusi hijau tidak berdampak pada dinamika perniagaan beras di Nusantara. Berbeda pada saat produksi rempah berjaya, ia berdampak pada kegairahan di laut karena terdistribusi melalui perdagangan bebas saat itu.

Selain tidak berdampak pada kegairahan pelayaran niaga di Nusantara, dengan revolusi hijau, budaya tani semakin menjelma sebagai basis peradaban Nusantara. Nusantara dominan berisi manusia-manusia tani, pencocok tanam yang dimanjakan oleh alam subur dan adopsi teknologi, yang hidup dalam kosmos harmoni dan statika alam pedesaan. Nusantara yang berisi manusia-manusia maritim, pelayar niaga yang senantiasa ditantang oleh kerasnya ombak dan horizon laut tak terbatas, semakin lama semakin redup. Artinya, secara budaya revolusi hijau menguatkan budaya tani, di sisi lain budaya maritim semakin redup. Meminjam konsepsi Redfield (1956), budaya tani tampil sebagai tradisi agung (*great tradition*), budaya maritim terpinggirkan menjadi budaya kecil (*little tradition*).

Rezim pembangunan pernah memberikan perhatian kepada sumberdaya laut melalui modernisasi penangkapan dalam bentuk adopsi teknis alat tangkap modern didukung pengembangan lembaga KUD-Mina pada 1980-an, tetapi intensitasnya tidak sampai pada level revolusi biru sehingga efeknya pada peningkatan produksi tidak signifikan, dan dampaknya tidak mendorong perkembangan budaya maritim serta peradaban pesisir. Begitupun ketika Departemen Kelautan

dan Perikanan telah terbentuk pada 2000-an, revolusi biru tidak berhasil didorong dan gairah perdagangan antar pulau, kebangkitan pelaut Nusantara, pembuatan perahu dan kapal, peradaban pesisir dan kota maritim, eksplorasi potensi kelautan, serta ketercukupan sarana-prasarana pulau dan antar pulau, sebagai narasi besar Jagad Bahari Nusantara, tetap belum signifikan terakselerasi.

Ketertinggalan narasi besar pilar Jagad Bahari Nusantara, karena perubahan terencana yang lebih memilih arus utama tani dan darat tersebut, selanjutnya diikuti oleh ketertinggalan narasi kecil pendukung jagad bahari Nusantara. Salah satu narasi kecil itu adalah peradaban sungai. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan misalnya, di mana peradaban sungai dalam bentuk pasar terapung telah berkembang sejak 1526 saat Kerajaan Banjar berdiri, karena pembangunan yang berorientasi darat, maka saat ini mengalami kemunduran drastis. Pada 1991, jumlah moda transportasi sungai kategori pelayaran lokal mencapai 1.136 buah, pelayaran rakyat 1.247 buah dan kapal lokal 1.136 buah. Pada 2009, pelayaran lokal dan kapal lokal sudah tidak ada lagi, hanya terdapat 416 buah perahu *kelotok*, 54 buah perahu *getek*, dan 28 buah *speedboat*. (“Pasar Terapung: Membangun Jalan, Melupakan Peradaban”, *Kompas*, 7 Mei 2011). Pada 1960-an, Banjarmasin masih bergantung pada transportasi air melalui dua sungai besar yakni Barito dan Martapura, serta 400 sungai kecil yang melintasi berbagai pelosok. Saat ini, jumlah sungai yang bisa dilewati transportasi air hanya sekitar 100 buah, sebagian besarnya tertutup oleh bangunan jembatan dan beton rumah. Ini berbanding terbalik dengan kemajuan moda transportasi darat. Pada 1991, panjang jalan hanya 205,07 km, 193,29 km diantaranya sudah beraspal. Pada 2009, total panjang jalan di Banjarmasin tercatat 458,391 km, terdiri dari 425,726 km jalan beraspal, 8,139 jalan kerikil, dan 24,526 km jalan tanah. Ini bertambah seiring dengan kendaraan darat, sepeda motor misalnya pada 1991 hanya 47.564 buah dan mobil hanya 14.818 buah; pada 2009 sepeda motor menjadi 259.778 buah dan mobil menjadi 55.280 buah (“Pasar Terapung: Membangun Jalan, Melupakan Peradaban”, *Kompas*, 7 Mei 2011).

Peradaban sungai di Banjarmasin bukan hanya terkait moda transportasi tetapi juga aktivitas ekonomi dalam bentuk pasar terapung. Perahu tradisional kecil menggunakan dayung dengan penerangan lampu minyak dan perahu bermesin dengan menggunakan bohlam,

hilir-mudik berayun ombak menjalankan transaksi pisang, jeruk siam banjar, berbagai jenis sayuran serta beras dan ikan, baik menggunakan uang maupun dengan barter, sambil saling menyapa dan tafsir simbolis mengiringi interaksi sosial antar perahu. Tetapi, jumlah orang yang terlibat pasar terapung itu konon makin berkurang, bila 20 tahun lalu di Muara Kuin misalnya terlibat sekitar 200 pedagang, saat ini hanya sekitar 85 orang. Makin lama orang makin lebih suka bertransaksi di pasar darat dan *mall* yang praktis dan bersih. Kalau dulu pembeli di pasar terapung kebanyakan untuk keperluan dapur, sekarang pembelinya lebih banyak pedagang yang akan mengecerkan barang-barang tersebut di perumahan atau mendagangkannya lagi di pasar-pasar darat (“Tanah Air: Pembangunan di Darat Menggusur Pasar Terapung”, *Kompas*, 7 Mei 2011). Artinya, pasar terapung kini lebih berfungsi mendukung perkembangan pasar di darat dibanding mengembangkan peradaban sungai itu sendiri.

Berbagai narasi kecil lain dari Jagad Bahari Nusantara dapat direkonstruksi ketertinggalan dan keterpinggirannya karena arus utama pembangunan. Bayangkanlah bagaimana orang Bajoe yang tersebar di berbagai daerah Nusantara khususnya di Kawasan Timur Indonesia; dengan pengetahuan lokal dan adaptasi ekologiannya kepada laut dapat berenang-menyelam melebihi kemampuan ikan; hidup sehari-hari membangun komunitas di atas air dan bibir pantai, merangkai dendang dan cerita dengan isi tentang laut, air, pasir dan ikan; dan dengan itu menegakkan identitasnya di tengah tuntutan untuk berintegrasi dengan lingkungan sosial terdekat ataupun dengan negara-bangsa Indonesia yang menaunginya. Tetapi bagaimana arus utama pembangunan menempatkan eksistensi mereka? Mengapa misalnya pasukan katak di ketenteraan tidak terdapat orang Bajoe yang justeru kekuatan paru-parunya untuk bertahan dalam air melebihi seekor katak? Mengapa misalnya pendidikan formal kurang menjangkau atau sulit dijangkau mereka?

Atau bayangkanlah orang Lamalera di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana mereka mengembangkan pengetahuan dan ketangkasan lokal menangkap ikan paus dalam kelompok berperahu menggunakan tombak; sambil dengan itu menyuarakan lagu-lagu pembangkit semangat dan keberanian menerjang ombak lalu menikam bagian tertentu dari tubuh seekor ikan paus; lalu ketika ritual penangkapan yang heroik itu terselesaikan maka termanifestasikan ikatan setia kawan,

keadilan berbagi, penghargaan kepada alam, dan penghormatan kepada tetua komunitas melalui pembagian daging tangkapan. Tetapi bagaimana arus utama pembangunan menempatkan eksistensi mereka? Sampai di mana ketangkasan penangkapan ikan menggunakan tombak orang Lamalera ini diapresiasi sebagai teknologi asli yang lahir dari kekayaan budaya bahari Nusantara? Bagaimana sikap negara terkait kecakapan lokal tersebut? Apakah dimodernisasikan secara teknologis maupun keorganisasian untuk merespons tuntutan perubahan, ataukah didukung keasliannya sehingga menjadi pilar bagi identitas budaya Nusantara?

Demikianlah, arus tani-darat pembangunan telah berhasil mengantar Indonesia berswasembada pangan, telah mentransformasikan sebagian besar manusia Indonesia dari alam feodal-tradisional ke alam kapitalisme-modern, telah mengakselerasi perkembangan kota-industri menuju peradaban global. Tetapi demikianlah pula potensi ikan dan laut terbengkalai bahkan tercuri oleh bangsa lain, masyarakat pesisir dan pulau kecil terperangkap dalam derita kemiskinan dan keterbatasan fasilitas publik, lalu peradaban pesisir tertinggal terpinggirkan. Kita harus sampai pada pengakuan bahwa ketertinggalan dan keterpinggiran Jagad Bahari Nusantara sebagian besarnya disebabkan oleh perubahan



Perahu di Relief Candi Borobudur (Madio SK)

terencana pada era pembangunan yang lebih mengarusutamakan tani dan darat.

**Jagad Tiga:
Ketertinggalan Bahari
Karena Kegagalan Transisi Sosio-Kultural**

Tetapi apakah derita ketertinggalan dan keterpinggiran itu sepenuhnya karena salah negara mengelola perubahan terencana? Mengapakah di balik pengarusutamaan tani dan darat dalam pembangunan, aktor dan struktur jagad bahari sendiri tidak bertransformasi secara struktural dan kultural, sehingga dengan perubahan alamiah dapat mempersembahkan puncak-puncak kejayaan budaya bahari? Bagaimana sebenarnya gambaran transformasi sosio-kultural berbagai komunitas maritim Nusantara dalam fase pembangunan selama ini? Berikut ini diuraikan perjalanan transformasi sosio-kultural komunitas maritim orang Konjo pesisir Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba, yakni komunitas pandai perahu di Tanaberu dan Ara dan pelayar niaga di Bira (Bontobahari).

Ara dan Tanaberu adalah lokalitas pembuat perahu utama di Sulawesi Selatan bahkan Nusantara. Orang Ara sejak 1900-an tersebar di Nusantara membuat perahu layar hingga perahu bermesin. Sementara orang Tanaberu lebih terkonsentrasi pada pembuatan perahu di pantainya; pembuatan perahu di tempat ini berkembang pesat sejak pembeli luar negeri meminati pinisi tradisional pasca Pameran Pinisi Nusantara 1989 di Vancouver (Caro, 1988) dan dilanjutkan dengan pelayaran pinisi *Ammana Gappa* (Edwin, 1991).

Konon, dahulu terdapat pembagian kerja antara orang Ara, Bira dan Tanaberu dalam urusan perahu. Orang Ara menekuni pembuatan perahu, orang Bira menekuni pelayaran, orang Tanaberu sebagai pemilik barang yang dilayarkan. Konon pula, ini adalah konstruksi sosial yang termanifestasikan dari mitos Sawerigading, bahwa ketika ia melanggar sumpah untuk tidak pulang ke tanah Luwu, pelayaran pulang itu bertemu badai hingga perahunya hancur berkeping-keping. Lunas terdampar di pantai Ara (dan memberi keahlian membuat perahu), badan perahu terdampar di pantai Tanaberu (dan memberi keahlian sebagai saudagar pemilik muatan), tiang layar terdampar di pantai Bira (dan memberi keahlian sebagai nakhoda pelayaran).

Perahu pinisi mencapai puncak kejayaan pelayaran niaga hingga 1970-an, setelah itu berlaku aturan pelayaran yang mengharuskan navigasi modern, lalu penggunaan mesin menggantikan fungsi layar. Pemodal niaga di Tanaberu dan Bira pelan-pelan mundur karena kemampuan modal terbatas untuk pembelian mesin, sehingga memasuki 1990-an tidak ada lagi saudagar pemilik muatan dari Tanaberu dan Bira, pelayar Bira beralih melayani juragan Cina yang mampu permodalan, begitu pula pandai perahu dari Ara membuat perahu pinisi bermesin untuk pembeli Cina tersebut. Maka berakhirilah dinamika dan romantika pembuatan perahu dan pelayaran niaga Bontobahari, Bira dan Tanaberu sepi dari hiruk pikuk pelayaran.

Kematian tradisi pelayaran ini tidak diikuti kematian tradisi pembuatan perahu. Pembeli luar negeri berdatangan memesan perahu tradisional yang dipasang mesin sehingga *bantilang* (lahan dan perlengkapan pembuatan perahu) di Tanaberu tetap ramai, sementara pembuatan perahu untuk juragan Cina tetap intensif sehingga orang Ara bermigrasi mengikuti persebaran lokasi itu. Dengan latar itulah Tanaberu mempertahankan tradisi bahari sebagai lokasi pembuatan perahu, berbeda dengan orang Bira yang sejak 1990-an kehilangan tradisi pelayarannya.

Bagaimana komunitas pembuat perahu mempertahankan eksistensinya? Mereka telah menjalankan adaptasi teknologi dan organisasi produksi dalam merespons tuntutan perubahan yang dikehendaki pasar. Penguasaan atas konstruksi perahu yang memungkinkan dipasang mesin, lambung perahu yang dilengkapi ruang makan dan tidur serta *sound system* demi kesenangan pelesir pemiliknya, dan penggunaan alat/bahan kerja yang makin canggih dan kompleks, mereka pelajari secara otodidak dan mengadaptasinya sesuai tuntutan konsumen. Pembagian kerja dalam komunitas demi tercapainya efisiensi dan efektivitas, perubahan norma perekrutan, pembagian kerja dan pembagian hasil, secara gradual mereka perbaiki. Pengaruh magis dan mitos dalam teknis pembuatan dan hubungan sosial produksi mereka rasionalkan dan menggantinya dengan prinsip legal dan kalkulatif. Begitu pula struktur sosial didorong berdiferensiasi seiring lahirnya fungsi baru yang menuntut lembaga baru, bertambahnya fungsi yang dijalankan sebuah lembaga, ataupun terjadinya disfungsi atas lembaga yang ada.

Secara sosiologis-antropologis, diferensiasi sosial dan rasionalisasi

tindakan telah berlangsung pada komunitas pembuat perahu, tetapi itu belum cukup untuk mentransformasikannya menjadi masyarakat industri dengan teknologi yang memungkinkannya menghasilkan perahu lebih modern ataupun kapal lebih canggih. Diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan yang berlangsung hanya cukup guna membuat mereka bertahan untuk tidak bergilas oleh perubahan dan belum cukup untuk melampaui perubahan itu sendiri. Inilah yang menjadikannya tidak menjelma sebagai peradaban besar, ia hanya bertahan sebagai teknostruktur yang “mati enggan, hidup tak mau”.

Ketika perkembangan teknostruktur pembuatan perahu tidak melampaui tuntutan zaman, peradaban pengguna perahu juga tertinggal spirit zaman. Maka penangkapan ikan Nusantara tidak menjelmakan perdagangan ikan skala besar, tidak pula mewujudkan pabrik pengolahan ikan. Transformasinya tertahan pada tahap transisi. Lihat misalnya komunitas penangkap ikan di Kajang (Kassi), Bulukumba. Komunitas ini bertransformasi dari nelayan pancing menjadi nelayan bagan dan akhirnya nelayan *gae*, tetapi kemajuan ini tidak meloncat lebih jauh untuk lahirnya industri pengolahan, sehingga dampak perdagangan ikan yang didorong hanya skala lokal dan daerah, tidak berekspansi ke pasar nasional apalagi global. Hal ini dikarenakan kekuatan mesin perahu tangkapnya belum mampu menjangkau laut dalam, dan karena perlengkapan teknologi pencarian lokasi ikan dan penangkapan canggih belum dikuasai. Pelayaran niaga pelaut Nusantara yang mengalami stagnasi, diikuti oleh penangkapan ikan yang gagal bertransformasi pula.

Artinya, bukan cuma arus utama tani dan darat dari pembangunan sebagai perubahan terencana yang harus dituding sebagai penyebab ketertinggalan budaya bahari Nusantara. Energi dari dalam komunitas bahari itu sendiri mengidap kelemahan sehingga perubahan alamiah



Pembuatan Perahu di Desa Ara, Bontobahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Surya Yuga)

yang didorongnya tidak cukup untuk melewati tuntutan zamannya, bahkan sebagian darinya tertinggal oleh spirit zamannya.

Jagad Empat: Sintesa Pengetahuan untuk Pranata Sesuai Spirit Zaman

Dari uraian sebelumnya dua poin penting dapat dirumuskan. Pertama, bahwa perubahan terencana di Indonesia telah berhasil memodernkan jagad tani dan darat melalui aplikasi pengetahuan ilmiah serta teknologi turunannya, di mana bahari dan laut tidak menjadi arus utama modernisasi tersebut sehingga tertinggal terpinggirkan. Kedua, bahwa sebelum Indonesia menjalankan perubahan terencana, Jagad Bahari Nusantara pernah berkembang melampaui spirit zamannya, dengan berbasis pada pengetahuan dan teknologi asli yang tertanam dalam pranata masyarakat, tetapi kemudian tidak mampu mentransformasikan diri merespons spirit zaman yang menuntut aplikasi pengetahuan ilmiah dan loncatan teknologi.

Karena itu, tantangan ke depan Jagad Bahari Nusantara adalah mengakselerasi perubahan terencana yang mensinergikan pengetahuan asli yang sudah tertanam dalam pranata sosial bahari Nusantara dengan pengetahuan ilmiah yang diadopsikan ke dalam pranata sosial bahari tersebut. Diperlukan metode perubahan sosial yang mensinergikan rekayasa sosial (*social engineering*) dengan pembelajaran sosial (*social learning*) dalam suatu agenda pelembagaan pengetahuan holistik Jagad Bahari Nusantara.

Pelembagaan pengetahuan holistik ini menyatukan rekayasa sosial yang berbasis pengetahuan ilmiah, untuk menjangkau komunitas bahari kepada perkembangan pengetahuan dan teknologi global-modern, dengan pembelajaran sosial yang berbasis pengetahuan dan teknologi asli, untuk membumikan komunitas bahari pada dasar pranata lokalnya. Penekanannya adalah interkoneksi dua sistem pengetahuan: lokal-asli-tradisional dengan global-adopsi-modern, yang dengan itulah akselerasi inovasi pada teknostruktur bahari lokalitas Nusantara ditransformasikan menjadi peradaban bahari nasionalitas Indonesia, yang tidak hanya bisa mengejar tetapi juga bisa meloncati spirit zamannya.

Agenda ini memiliki pendasaran pada dinamika beberapa kasus Jagad Bahari Nusantara. Berikut ini adalah perubahan rasionalitas seorang *punggawa* pembuat perahu dalam resolusi konflik yang sadar bahwa aplikasi pengetahuan magis tidak relevan lagi dengan spirit zaman yang menuntut aplikasi pengetahuan positivistik, setelah menginterpretasi kisah romantis aplikasi magis di masa lalu dan menghubungkannya dengan spirit zamannya.

Saya mendengar langsung cerita ini dari seorang punggawa bernama DM (almarhum). Kejadiannya berlangsung di Pare-Pare 1950-an. Menurut DM, sumber konflik waktu itu adalah masalah upah. Perahu sudah selesai, sambalu tidak mau membayar upah sepenuhnya, bahkan mengingkari nilai upah yang disepakati. Karena enggan berdebat, DM melampiaskan kekecewaannya dengan menggunakan kekuatan magis. Sebelum perahu diluncurkan, ia pergi ke depan perahu menancapkan pa'panelang (sejenis bor) yang digunakan memotong lunas, lalu meniatkan bahwa hanya sampai di situlah lunas perahu bisa bergerak. Sambalunya ternyata orang keras hati juga. Ia bersumpah bahwa perahu itu harus sampai ke laut, menyentuh air. Setelah didorong selama tujuh hari oleh penduduk setempat, perahu tidak bergerak juga. Sambalu lalu mengerahkan mobil truk untuk menambah tenaga. Akibatnya, badan perahu bisa menyentuh air, tetapi lunasnya tertahan tetap terbenam di tepi pantai. Cerita ini terkenal di kalangan pembuat perahu dengan skor 1:1. Hajat punggawa dan sambalu sama-sama terpenuhi, yakni lunas tertahan pada titik yang diniatkan (punggawa), dan perahu menyentuh air (sambalu), tetapi bagaimanapun kerugian lebih banyak diderita sambalu. Sebagai punggawa, sekarang ini saya tidak pernah menggunakan ilmu (magis) seperti itu, meskipun saya juga menguasainya. Rasanya berdosa merusak barang kepunyaan orang meskipun kita yang membuatnya. Lagi pula kalau ada perselisihan dengan sambalu bisa kita ajukan ke pemerintah atau pengadilan. (Wawancara dengan punggawa bernama S tahun 1992 di Desa Ara, Bulukumba).

Cerita di atas menunjukkan bagaimana pengetahuan asli-tradisional (aplikasi magis dalam sengketa) pada pranata lama tersadari bahwa kurang relevan lagi dengan pranata baru sehingga perlu dikomplementasikan dengan pengetahuan positivistik (aplikasi hukum positif dalam sengketa) yang diadopsi dari pranata modern. Artinya, dalam berbagai praksis jagad bahari sudah terdapat kesadaran dan rasionalitas untuk membumikan pengetahuan global-ilmiah kedalam

khazanah pengetahuan lokal-asli. Bila kecenderungan seperti ini makin intensif, maka kita akan dapat merayakan pelembagaan pengetahuan positivistik-ilmiah dalam pranata lokal Jagad Bahari Nusantara. Namun demikian, kita juga bisa menemukan keengganan pengetahuan positivistik-ilmiah untuk menerima dan melembagakan pengetahuan lokal-asli dalam pranata modernnya. Berikut ini adalah cerita tentang ketidakterimaan promosi kearifan lokal oleh rasionalitas pengguna pengetahuan positivistik-ilmiah pada peristiwa tenggelam dan hilangnya rombongan penyelam karang dari Malaysia tahun 1997 di Tanjung Bira.

Diceritakan oleh penyelam lokal yang mendampingi instruktur selam asing tersebut, sebenarnya turis itu telah diperingatkan untuk menghindari dari lokasi tempatnya menyelam, lantaran berdasarkan pengetahuan setempat, daerah itu keramat dan berpenunggu. Tetapi, orang asing itu berkata bahwa yang ia cari memang yang ada tantangannya. Ketika mereka diperingatkan untuk menggunakan peralatan penyelaman yang dipersyaratkan, mereka menjawab bahwa mereka tidak perlu diajari tentang itu karena mereka adalah instruktur berpengalaman. Diceritakan juga, ketika mereka sudah tersesat jauh dari perahu yang menunggu, dan tersadari bahwa jiwa mereka terancam, seorang pendamping lokal berusaha sembahyang dalam air dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tetapi, orang asing itu berkata tidak usah bermohon pada Tuhan, tunggu saja helikopter yang akan datang menjemput. Dalam musibah ini pendamping lokal tersebut selamat, tetapi lima instruktur asing hilang tak ditemukan mayatnya. Pakaian dan perlengkapan teknologinyapun tak ditemukan. Masyarakat percaya bahwa melanggar tabu dan pantangan di pantai Bira akan membawa celaka. (Wawancara dengan S, mitra lokal sebuah usaha cottage di Bira dalam jasa diving, dan dengan seorang pemilik perahu dari pulau Liukang Lohe, tahun 1999).

Cerita ini menunjukkan betapa pemangku pengetahuan ilmiah amat enggan membuka ruang penerimaan atas kebenaran pengetahuan lokal-asli. Hal serupa terlihat pada sulitnya seorang sarjana perkapalan menerima kebenaran dari cara *punggawa* menentukan keseimbangan perahu, yang tidak berdasarkan hitungan matematis dan peralatan mekanis, ataupun cara penghalusan balok dan papan oleh *sawi*/tukang, yang hanya menggunakan telapak kaki di atas *bacci* (garis hitam dari tali berwarna yang disentak) sebagai patokan lurus dalam memacul balok atau papan lambung. Atau seorang nelayan yang sudah menggunakan



Rumah Suku Bajo (Surya Yuga)

teknologi GIS (*geographical information system*) dalam mengintai rombongan ikan, akan sulit menerima bagaimana seorang *punggawa* nelayan memercikkan air zam-zam ke dalam laut disertai doa-doa untuk memanggil ikan mendekat. Bila kecenderungan seperti ini yang semakin intensif ke depan, maka kita akan sulit merayakan pelebagaan pengetahuan lokal asli dalam pranata modern.

Untuk agenda ini, jelas bahwa di tingkat negara kita butuh kebijakan pengetahuan yang mendorong perayaan sintesis pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal. Masyarakat pesisir dengan kearifan lokalnya dan ahli maritim dengan pengetahuannya perlu difasilitasi untuk berkawin-mawin dalam ruang sintesa pengetahuan yang saling menghargai eksistensi satu sama lain dan saling menyadari pentingnya kolaborasi pengetahuan di antara keduanya. Keluarlah dari jebakan bahwa pengetahuan ilmiah harus menelan habis pengetahuan lokal asli karena mereka tradisional terbelakang; keluarlah dari jebakan bahwa pengetahuan lokal harus menolak habis pengetahuan ilmiah karena mereka dari Barat dan a-historis. Rayakanlah sintesa pengetahuan, pestakanlah perkawinan pengusung metode ilmiah dengan penganut magis dan mitos, lalu lahirkanlah fitur baru hasil sintesa dan perkawinan itu.

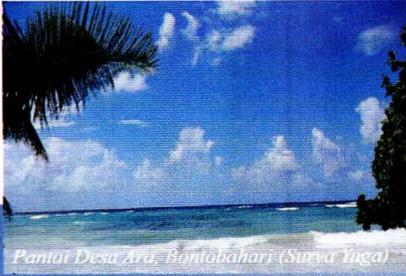
Jagad Lima: Bangun Jiwanya, Baru yang Lainnya

Dari uraian sebelumnya juga dapat dipelajari bahwa di luar diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan, faktor yang lebih mendasar adalah jiwa yang menggerakkan aktor rasional dan struktur terdiferensiasi tersebut, karena dari sanalah energi perubahan bersumber. Semakin redup jiwa tersebut maka karsa yang dilahirkannya juga lemah, sehingga rasionalitas tindakan dan diferensiasi sosial yang didorongnya tertinggal spirit zaman, sehingga bila spirit zaman ingin dilampaui maka dibutuhkan jiwa yang melampaui pula.

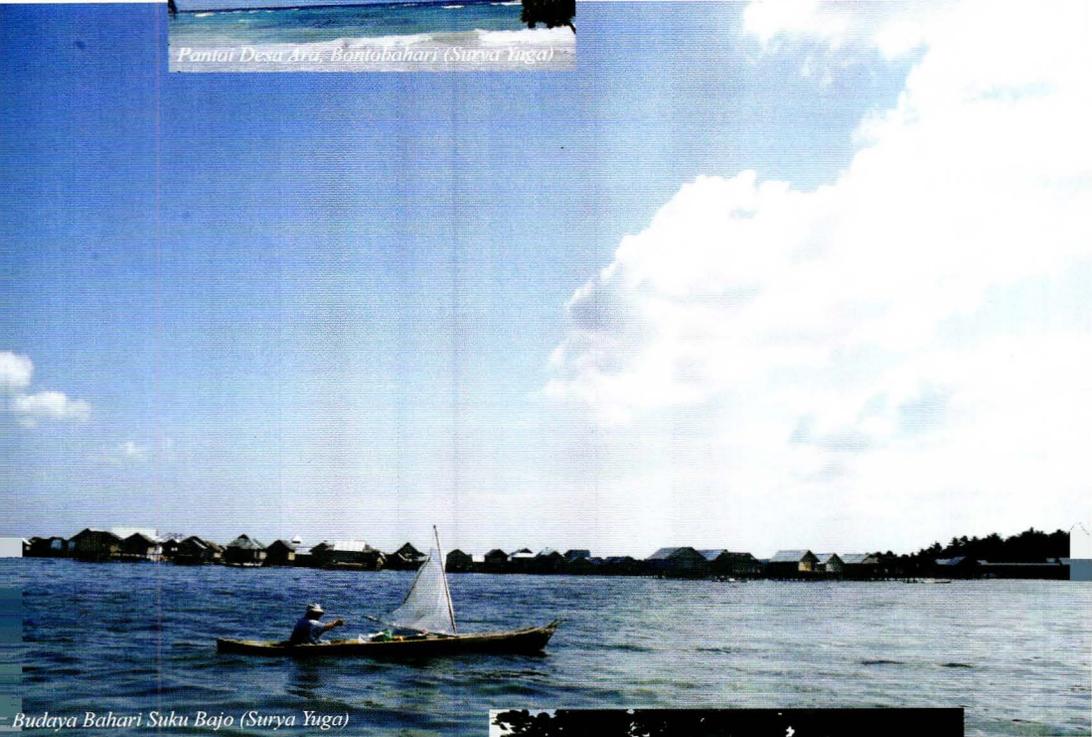
Dalam kerangka ini, revitalisasi jiwa bahari Nusantara yang mendukung peradaban melampaui spirit zaman di masa lalu, menjadi relevan. Penting ditemukan jawabannya pertama adalah: etika apa yang melandasi sehingga kota pantai Nusantara menjadi bandar perdagangan bebas saat itu, semangat apa yang memicu sehingga pelaut Nusantara menjelajahi lintas benua saat itu, dan katup apa yang memanifestasikan etos dan semangat tersebut? Ketika misalnya pelaut Bugis memegang prinsip “kupilih tenggelam dari pada berbalik pulang”, bagaimana etos dibalikinya dapat menjadi dasar untuk membangun jiwa aktor bahari ke depan, membangun jiwa bangsa dalam meniti spirit zaman? Ketika misalnya pelaut Nusantara menjelajah laut dalam holisme horizon tak terbatas, etos apa di baliknya yang dapat termanifestasikan dalam keterbatasan jelajah tani tersekat pematang jagad daratan? Ketika misalnya kultur bahari masa lalu menegakkan kebersamaan dalam modal sosial tinggi kelompok pelayar, komunitas pesisir dan pemangku peradaban bahari, etos apa darinya yang dapat menguatkan jiwa bangsa ke depan? Bila kemudian substansi itu ditemukan, pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah bagaimana membungkusnya dalam format yang cocok untuk diinternalisasikan kepada tidak hanya pewaris budaya bahari Nusantara tetapi seluruh pilar negara bangsa Indonesia. Dengan substansi itulah jiwa-jiwa Nusantara seyogyanya dibangun, dengan itulah dialektika lokalitas yang tersebar antarpulau antarsamudera dengan nasionalitas atas nama Indonesia yang membingkainya, dapat dikarakterkan. Lalu, sebermakna bagaimana butir hikmah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dirayakan lebih meriah untuk menjawab semua ini? *****

Daftar Pustaka

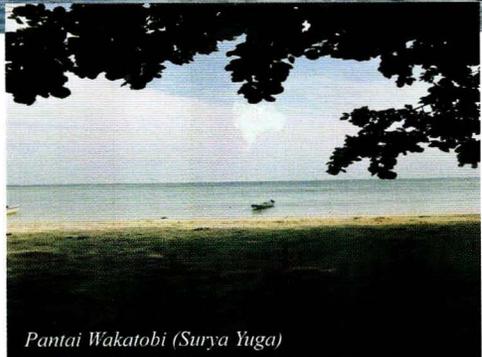
- Caro, Pius, 1988. *Pinisi Nusantara: Mengarungi Lautan 11.000 mil Jakarta-Vancouver*. Khrisna Press: Jakarta.
- Cartesao, Armando, 1944. *The Suma Orientale of Tome Pires: an Account of the East from the Red Sea to Japan, Written at Malacca 1512 to 1515*. Hakhtyl Soc. Publication: London
- Collins, G.E.P, 1937. *East Monsoon*. Jonathan Cape: London
- Collins, G.E.P., 1937. *Makassar Sailing*. Jonathan Cape: London
- Dick-Read, Robert, 2005. *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*. Bandung: Mizan.
- Edwin, Norman, 1991. "Catatan Awak Pinisi Ammana Gappa (1): Matahari dan Bintang Balu". *Kompas*: 26 Desember 1991.
- Edwin, Norman, 1991. "Catatan Awak Pinisi Ammana Gappa (2): Memahami Kearifan Tradisional". *Kompas*: 27 Desember 1991.
- Edwin, Norman, 1991. "Catatan Awak Pinisi Ammana Gappa (3): Geronimo... Geronimo ... Blar". *Kompas*: 28 Desember 1991.
- Horridge, Adrian, 1979. The Kondjo Boatbuilders and the Bugis Prahus of Sulawesi. *Maritime Monograph and Reports*. No. 40: London.
- Salman, Darmawan, 1993. "Perkembangan Organisasi Produksi dan Mobilitas Okupasi pada Masyarakat Industri Perahu Bugis: Studi Kasus pada Empat Desa Komunitas Industri Perahu di Sulawesi Selatan" (Tesis Tidak Dipublikasikan). Bogor: Program Pascasarjana IPB.
- Salman, Darmawan, 2006. *Jagad Maritim: Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa.
- Vickers, Adrian, 2009. *Peradaban Pesisir: Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*. Bali: Udayana University Press.



Pantai Desa Ara, Bontobahari (Surya Yuga)



Budaya Bahari Suku Bajo (Surya Yuga)



Pantai Wakatobi (Surya Yuga)



POLITIK IDENTITAS ORANG BAJO

Tasrifin Tahara

Universitas Hasanuddin, Makassar

Abstrak

Orang Bajo adalah komunitas yang memiliki sejarah dan kebudayaan dengan laut sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam proses interaksi antaretnik, mereka disematkan stereotipe sebagai kelompok perampok, orang bodoh, dan memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dengan etnik lain, bahkan terabaikan dari proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai kelompok yang termarginalkan, orang Bajo melakukan gerakan-gerakan konstruksi identitas dengan membangun negosiasi pada berbagai event politik dan organisasi formal dengan memilih Presiden Bajo sebagai bentuk politik identitas untuk mendapatkan pengakuan terhadap eksistensi identitas budayanya yang sama dengan kelompok etnik bahari lain.

Kata Kunci: *Bajo, Stereotipe, dan Konstruksi Identitas*

Pengantar

Bahar, putra Bajo, baru saja menginjakkan kaki di Desa Mola sebuah desa terbesar komunitas Suku Bajo di Wakatobi.¹ Lelah karena perjalanan jauh dari Kendari melewati Kota Baubau dengan menggunakan kapal seakan tiada terasa dikarenakan rasa girangnya saat membayangkan dirinya akan kembali bersua dengan sanak saudara. Ia ingin membagi kebahagiaan kepada keluarganya karena sudah menjadi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Haluoleo Kendari. Ia adalah pemuda Bajo yang tengah berjuang menunjukkan identitas kelompoknya bukan lagi sebagai komunitas yang hanya bisa menangkap ikan atau penyelam teripang, tapi jauh lebih maju lagi bahwa pengetahuan tentang kelautan yang menjadi "milik" komunitasnya kini lebih digeluti dalam dunia pendidikan tinggi layaknya kelompok lain. Karena selama ini orang Bajo sangat minim yang bisa menempuh pendidikan formal apalagi bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, selain sebagai sebuah kebahagiaan tersendiri, apa yang dilakukan oleh Bahar juga merupakan pergulatan identitas Suku Bajo, yang selalu disematkan stereotipe sebagai kelompok yang bodoh yang tidak memiliki pendidikan.

Lain lagi dengan kisah kesuksesan Abdul Manan yang saat ini sebagai Presiden Bajo, pada tahun 1976 dia merantau ke Baubau melanjutkan SMP hingga SMA. Kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Kendari ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah menamatkan studi S1 dan diterima sebagai staf dosen pada Universitas Haluoleo Kendari. Kemudian ia mendapat beasiswa Program Magister di Thailand Jurusan Manajemen Tropika. Abdul Manan merupakan putra Bajo yang satu-satunya memiliki pendidikan magister dan kini dipercayakan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

¹ Saat ini, jumlah penduduk suku Bajo di Kepulauan Wakatobi 12 ribu orang, yang tersebar di beberapa kampung. Selain Mola Selatan, ada Desa Mantigola dan Sampela di Pulau Kaledupa serta Desa Lamanggau di Tomia. Mola terbanyak penduduknya, 7.000 orang. Kampung ini juga paling "modern" dibanding Kampung Bajo lain. Beberapa rumah terbuat dari tembok, sebagian beratap seng, menunjukkan sisa-sisa "kejayaan" Suku Bajo.

(Bappeda) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Makalah yang dimulai dengan tuturan tentang Bahar dan Abdul Manan adalah sebagai pintu awal untuk memasuki detak jantung kehidupan orang Bajo. Pengalaman mereka adalah titik awal untuk mengetahui bahwa selama ini orang Bajo diperlakukan dengan cara yang direndahkan, dan perlakuan tersebut tersimpan rapi dalam benak mereka. Sebagaimana lazimnya dalam etnografi, kisah kedua orang tersebut menjadi jendela awal untuk melihat kebudayaan Suku Bajo, bagaimana interaksi mereka dengan etnis di sekitar komunitasnya, serta bagaimana mereka membangun strategi serta negosiasi makna, di tengah situasi hubungan yang direndahkan dan hanya dikenal sebagai suku penangkap ikan, penyelam teripang, melawan perampok-perampok yang berbahaya, bahkan konon sebagai perompak di laut.

Bajo Sejarah yang Terabaikan

Dari manakah asal kata Bajo? Menurut Anna Tsing (1993), biasanya pertanyaan ini adalah awal untuk memulai sebuah etnografi. Bajo, Bajau atau Sama Bajo juga merupakan salah satu suku di Indonesia yang menyebar ke berbagai penjuru negeri. Konon nenek moyang mereka berasal dari Johor, Malaysia. Mereka adalah keturunan orang-orang Johor yang dititahkan raja untuk mencari putrinya yang melarikan diri. Orang-orang tersebut diperintahkan mencari ke segala penjuru negeri hingga Pulau Sulawesi. Menurut cerita, sang puteri memilih menetap di Sulawesi, sedangkan orang-orang yang mencarinya lambat laun memilih tinggal dan tidak lagi kembali ke Johor. Dan konon menurut satu versi, sang puteri yang menikah dengan pangeran Bugis kemudian menempatkan rakyatnya di daerah yang sekarang bernama BajoE. Sedangkan versi lainnya menyebutkan karena tidak dapat menemukan sang puteri, akhirnya orang-orang asal Johor ini memilih menetap di kawasan Teluk Tomini, baik di Gorontalo maupun Kepulauan Togian.

Sejak penulis Eropa pertama kali menyebut Bugis sebagai pelaut, hingga kini, mereka masih sering tidak dapat membedakan orang Bugis dengan orang Bajo. Sejak 1511, Tome Pires, seorang Portugis, menyamakan pedagang Bugis yang berlayar ke Malaka dari tempat yang dia sebut Pulau "*Macacar*", dengan orang Bajo yang dianggap sebagai perompak. Dari sejarah diketahui bahwa suku Bajo bukan

sekedar suku pengembara laut yang hanya tahu menangkap ikan. Mereka pun merupakan nelayan pemasok berbagai komoditi pasar internasional. Mereka sangat aktif mencari komoditi laut seperti kerang mutiara, teripang, penyu sisik, mutiara, kerang, karang, dan rumput laut. Orang Bajo juga menyediakan berbagai komoditi pantai terutama dari hutan bakau seperti akar-akaran, kulit, dan kayu bakau yang digunakan sebagai bahan celup, serta kayu garu, damar, madu, lilin tawon lebah, dan sarang burung, baik yang terdapat di sekitar tempat mereka tinggal atau pun dari tempat-tempat yang mereka kunjungi (Andaya, *Aquatic Population*: 36). Aktivitas ini melibatkan mereka dalam hubungan perdagangan dan barter dengan Kerajaan Bugis dan Makassar.

Suku Bajo dikenal sebagai pelaut-pelaut yang tangguh. Namun, sejarah lebih mengenal Suku Makassar, Suku Bugis, atau Suku Mandar, sebagai raja di lautan. Padahal, Suku Bajo disebut-sebut pernah menjadi bagian dari Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya. Sehingga, ketangguhan dan keterampilannya mengarungi samudera jelas tidak terbantahkan. Sejumlah antropolog mencatat, suku Bajo lari ke laut karena mereka menghindari perang dan kericuhan di darat. Sejak itu, bermunculan manusia-manusia perahu yang sepenuhnya hidup di atas air. Nama Suku Bajo diberikan oleh warga suku lain di Pulau Sulawesi sendiri atau di luar Pulau Sulawesi. Sedangkan warga Suku Bajo menyebutnya dirinya sebagai *Suku Sama* dan menyebut orang di luar sukunya dengan *Suku Bagai*. Bahasa Suku Bajo (*baong sama*), memperlihatkan sesuatu yang khas dalam masyarakat ini. Apabila mereka berada di antara sesama mereka, mereka menggunakan kata "*sama*" sebagai istilah rujukan dan untuk menunjukkan kelompok mereka. Istilah "*sama*" ini berposisi dengan "*bagai*" yang artinya semua masyarakat lain, di luar orang Bajo. *Sama* adalah orang Bajo yang keberadaannya berhubungan dengan *sama-sama* lainnya. Istilah ini mendukung gagasan untuk membuat orang-orang Bajo menjadi sebuah masyarakat, sebab istilah itu mengingatkan setiap orang bahwa ia merupakan warga dan termasuk di dalam kelompoknya. Arti istilah tersebut sangat jauh melampaui arti yang diberikan dalam Bahasa Indonesia, seperti "serupa", "sama", "setara".

Sejak kapan orang Bajo meninggalkan kampung halamannya, sampai sekarang tidak ada yang mengetahui pasti. Namun satu hal yang pasti, berkat keterpencilan mereka selama sejarah, orang Bajo

membawa jejak-jejak perpindahan penduduk yang menghuni Asia Tenggara sekitar dua ribu tahun yang lalu². Selama ini dalam memahami budaya masyarakat bahari, penafsiran sejarah Bajo kerap dilihat hanya berdasarkan cara pandang kelompok maritim di Nusantara seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Buton. Padahal Sahlins (1985) mengatakan, perbedaan waktu dan tempat akan merefleksikan perbedaan sejarah juga³. Semua tempat memiliki sejarahnya masing-masing sebab sejarah tumbuh sebagai bagian dari kebudayaan. Jika penafsiran Sahlins (1985) digunakan untuk melihat konteks ini, sejarah Bajo masih dilihat sebagai sejarah pulau-pulau yang terabaikan (*history of neglected islands*) yang dianggap tidak penting dalam peta sejarah maritim di Nusantara. Akibatnya, orang Bajo tidak banyak bersuara atau didengarkan suaranya sebab selalu dilihat dengan cara pandang kebudayaan dominan.

Bajo: Negeri di Atas Laut

Salah satu suku bangsa yang sangat terkenal dengan pendukung kebudayaan bahari adalah Suku Bajo. Sejak dahulu, Suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup matinya berada di atas lautan. Bahkan perkampungan merekapun dibangun jauh menjorok ke arah lautan bebas, tempat mereka mencari penghidupan. Laut bagi mereka adalah satu-satunya tempat yang dapat diandalkan. Julukan bagi mereka sudah barang tentu *sea nomads*, karena pada mulanya mereka memang hidup terapung-apung di atas rumah perahu. Orang Bajo ini

² Robert dalam penelitiannya di Desa Torosiaje meriwayatkan bahwa orang Bajo berbondong-bondong pindah tanpa tujuan yang pasti. Armada-armada bido' (soppe) mulai menjelajahi ribuan kilometer melewati lautan-lautan Asia. Beberapa orang Bajo masih mengikuti petualang itu yang sekarang tampaknya merupakan nasib mereka. Selengkapnya lihat Francois Robert Zacot, 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.

³ Sahlins mengatakan, "The different cultural orders have their own modes of historical actions, consciousness, and determinations - their own historical practice. Other times, other customs, and according to otherness of the custom, the distinctive anthropology that is needed to understand any given human course." Selengkapnya, lihat Sahlins, Marshall (1985) *Island of History*. Chicago & London: The University of Chicago Press.

pun menyebar ke segala penjuru wilayah semenjak abad ke-16 hingga sekitar 40-50 tahun silam (perpindahan terakhir terjadi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur). Di mana ada laut, maka *Suku Same* itu mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan bekerja memanfaatkan potensi sumberdaya laut. Orang Bajo sejak lahir sudah dikenalkan dengan kehidupan di atas permukaan air. Hal inilah yang menyebabkan kerap kali mereka menolak untuk hidup di daratan meskipun secara diam-diam saling menjalin hubungan dengannya. Dalam konsepsi masyarakat Bajo, meninggalkan cara hidup di laut berarti meninggalkan adat istiadat hidup mereka. Bagi Suku Bajo, lautan merupakan tempat satu-satunya untuk menetap dan bertemu. Oleh karena itu, orang Bajo memahami dunia menurut cara hidup dan prinsip "orang Bajo adalah orang-orang laut".

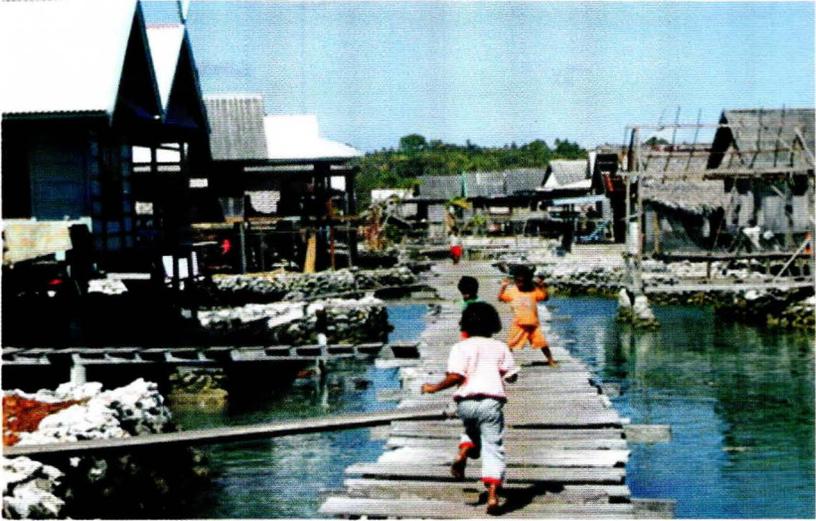
Sebagai komunitas yang tidak dapat terpisahkan dari laut, orang Bajo kerap kali melakukan penolakan untuk menetap hidup di darat dan mematuhi suatu pemerintahan karena tidak akan mempermudah perkembangan kehidupan sosial ekonomi mereka. Sejak dulu, mereka dikenal sebagai pelaut ulung dan gemar mengarungi lautan Nusantara. Mereka bisa menangkap ikan dan penyu di mana pun tanpa larangan. Untuk menangkap ikan, mereka berlayar ke perairan Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, bahkan sampai ke wilayah Australia. Nelayan Desa Mola Selatan "terkenal" sering terjaring pihak berwajib Australia. Salah seorang warga Bajo mengatakan bahwa pada 1980-an hingga 1990-an, warga Bajo Wakatobi mengalami "masa kejayaan" berdagang penyu sisik. Penyu yang ditangkap sebagian dijual, sebagian dikembangkan. Dulu mereka bisa menjual penyu sisik ukuran 60 sentimeter seharga 100-200 ribu rupiah per ekor. Saat ini penyu itu sudah berharga jutaan rupiah. Penjualan penyu memang bergantung pada besar kapal yang digunakan. Menurut penuturan beberapa orang Bajo, penghasilan dari berdagang penyu, tiga bulan sekali bisa mendapat puluhan juta rupiah. Setelah penangkapan penyu dilarang di seluruh perairan Indonesia, kegiatan perdagangan hewan itu merosot drastis. Pendapatan orang Bajo sejak beberapa tahun lalu pun jauh berkurang. Saat ini juga kesulitan ditambah dengan kekhawatiran soal penetapan zonasi. Meski para nelayan Bajo bisa saja mencari ikan di luar kawasan konservasi, larangan itu tak urung membuat daerah tangkapan orang Bajo semakin sempit dan menyebabkan berkurangnya pendapatan.

Saat ini, jumlah Suku Bajo yang menggantungkan hidupnya di atas perahu diperkirakan semakin sedikit karena hidup menepi di pesisir pantai dan mendirikan rumah panggung yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Dindingnya terbuat kombinasi kayu dan anyaman bambu, bagian atap dari daun rumbia. Isi sebuah rumah terdiri beberapa anggota keluarga inti, dan pada umumnya menjadi sebuah keluarga luas yang terdiri dari ipar-ipar, sepupu, dan lain-lain. Untuk membedakan berbagai hubungan ini, orang Bajo membagi dalam beberapa kategori. Pertama, *Beres* merupakan keluarga dalam arti umum, dan menunjuk pada hubungan keluarga. Ada *Beres Teo* (keluarga jauh) dan *Beres Tutuku* (keluarga dekat). Kedua, *Dapparanakan* adalah sebuah keluarga dalam arti "orang yang tinggal dalam satu rumah", lingkungan keluarga, kelompok orang-orang yang hidup di bawah satu atap, apa pun tingkatan hubungan keluarga mereka. *Dapparanakan* menunjuk pada ruang geografis. Sedangkan kategori ketiga, *Dambarisan* menyangkut desa sebagai sebuah keluarga besar dan yang menonjolkan perasaan kekompackan⁴.

Saat membangun sebuah komunitas baru, biasanya masyarakat Bajo berlabuh di satu pantai lebih dahulu. Lama kelamaan mereka menimbun pantai dengan batu dan mulai mendirikan pancang-pancang rumah panggung. Hal yang menarik pola pemukiman kampung Suku Bajo adalah mutlak menyediakan jalur-jalur perahu sebagai alat transportasi utama. Oleh karena itu, ketika berkunjung ke lokasi pemukiman Suku Bajo akan terlihat hilir mudik perahu di sekitar perkampungan tersebut. Selain itu juga, pemandangan anak-anak kecil bermain di laut sambil mencari ikan.

Selain menetap di darat, orang Bajo telah banyak yang kawin dengan komunitas sekitar mereka menetap seperti orang Bugis, dan sebagian dari mereka seperti di Teluk Bone dapat berbicara dalam empat bahasa: Sama, Bugis, Makassar, dan Indonesia. Di berbagai tempat, orang Bajo banyak yang akhirnya menetap, baik dengan inisiatif sendiri atau di'paksa' pemerintah, dan tempat tinggalnya pun tidak pernah jauh dari laut. Banyak orang Bajo yang akhirnya menetap, sedang lainnya masih berkelana di lautan. Mereka membangun

⁴ Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan keluarga Suku Bajo, Lihat Robert Zacot, 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.



Salah satu pemukiman Suku Bajo di Wakatobi (Tasrifin Tahara)

pemukiman-pemukiman baru di berbagai penjuru Indonesia dan Asia Tenggara. Di Kepulauan Wakatobi, Suku Bajo menetap mulai terjadi sekitar tahun 1950-an yang berpindah dari komunitas awal di Pulau Kaledupa karena gangguan DI/TII. Suku Bajo memang memiliki karakter yang unik. Mereka bisa berpindah-pindah lokasi, jika lingkungan di sekitarnya mengganggu kehidupan mereka. Dalam mempertahankan hidupnya, Suku Bajo berusaha mengembangkan hubungan-hubungan dagang atau kebudayaan dengan menggunakan perahu untuk berdagang pada wilayah-wilayah kampung tetangga tempat mereka menetap. Mereka tak dapat memperoleh prinsip-prinsip ekonomi lainnya karena mereka berpindah-pindah tempat dan hal itu penting bagi mereka⁵. Mereka berpindah-pindah tempat dalam kelompok-kelompok kecil, tidak menguasai bahasa penduduk-penduduk lainnya, namun mereka berusaha mengadopsi beberapa bahasa-bahasa yang menjadi mitra dalam hubungan-hubungan ekonomi. Suku Bajo dikenal mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, kendati tradisinya sendiri tetap berjalan dan

⁵ Prinsip-prinsip ini mungkin sudah banyak terjadi pergeseran dengan semakin banyaknya Suku Bajo yang hidup menetap di sekitar pesisir pantai wilayah tertentu.

termarginalkan dari proses pembangunan di Indonesia.

Stereotipe Terhadap Suku Bajo

Di wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki wilayah laut sekitar tiga perempat seluas 7,9 juta km² yang mempersatukan 17.504 pulau dengan 95.161 km garis pantai, sejak dahulu dikenal adanya kelompok-kelompok cikal bakal budaya bahari, yakni Suku Bajo (*sea gypsies*), Bugis, Makassar, Mandar, Buton, dan Madura (Horridge, 1986). Di antara suku-suku maritim tersebut, tampaknya kehadiran orang Bajo sebagai suatu komunitas bahari belum banyak terungkap oleh para sejarawan khususnya hubungan antara kelompok etnik tertentu dengan Suku Bajo. Padahal interaksi antara Suku Bajo dengan masyarakat maritim merupakan kajian menarik. Sebagai contoh, di gugusan Pulau Buton dan sekitarnya seperti Tiworo dan Kepulauan Tukang Besi (sekarang Wakatobi) banyak dijumpai komunitas Suku Bajo (*Sama*) yang sepenuhnya berkaitan dengan laut. Kedekatan antara orang Buton dan Suku Bajo dapat dilihat dari adanya daerah yang bernama Pasar Wajo. Tempat ini merupakan interaksi antara orang Buton dan Bajo. Wajo, bagi masyarakat Buton merupakan sebutan bagi Bajo (Zuhdi, 2010).

Dalam proses interaksi antaretnik khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau, masing-masing sukubangsa memiliki kebudayaan berisikan konsep-konsep mengenai berbagai sukubangsa yang hidup bersama dalam masyarakat tersebut. Hal-hal yang tercakup dalam konsep-konsep kebudayaan tersebut adalah sifat-sifat atau karakter dari masing-masing sukubangsa tersebut. Isi konsep-konsep atau pengetahuan yang ada dalam kebudayaan dari masing-masing sukubangsa adalah pengetahuan mengenai diri atau sukubangsa masing-masing, sebagai pertentangan atau lawan dari sukubangsa-sukubangsa lain. Ini dilakukan untuk memunculkan keberadaan suku bangsa atau kesukubangsaan dalam interaksi antaranggota sukubangsa yang berbeda. Konsep-konsep yang ada dalam kebudayaan mengenai sukubangsanya dan mengenai sukubangsa-sukubangsa lainnya yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat adalah pengetahuan yang penuh dengan keyakinan-keyakinan mengenai kebenaran yang subyektif. Kebenaran subyektif mengenai ciri-ciri sukubangsanya dan sukubangsa-sukubangsa lain yang ada dalam kebudayaan sesuatu

sukubangsa tertentu adalah konsep-konsep yang seringkali juga digunakan sebagai acuan bertindak dalam menghadapi sukubangsa lain tersebut, walaupun tidak selalu demikian adanya dalam perwujudan tindakan-tindakan dari para pelakunya. Konsep-konsep yang subyektif mengenai sukubangsa lain yang ada dalam kebudayaan tersebut dinamakan “stereotipe”, dan dapat berkembang menjadi prasangka (Suparlan, 2004).

Sebuah stereotipe mengenai suatu sukubangsa itu muncul dari pengalaman seseorang atau sejumlah orang yang menjadi anggota sebuah sukubangsa dalam berhubungan dengan para pelaku dari sesuatu sukubangsa tersebut. Dari sejumlah pengalaman yang terbatas, yang dipahami dengan mengacu pada kebudayaannya, maka pengalaman tersebut menjadi pengetahuan. Hal ini menjadi sebuah pengetahuan yang berulang diafirmasi atau dimantapkan melalui pengalaman-pengalaman yang secara berulang terjadi dengan anggota-anggota sukubangsa tersebut. Pengetahuan yang berisikan ciri-ciri sesuatu sukubangsa tersebut menjadi konsep-konsep yang ada dalam kebudayaannya dan diyakini kebenarannya. Melalui berbagai jaringan sosial yang dimiliki oleh seorang pelaku, pengetahuan kebudayaan mengenai ciri-ciri sesuatu sukubangsa tersebut disebarluaskan kepada sesama warga masyarakat sukubangsanya. Pengetahuan kebudayaan yang bercorak stereotipe, yaitu mengenai ciri-ciri sesuatu sukubangsa menjadi pengetahuan yang berlaku umum dalam kebudayaan dari masyarakat tersebut diyakini kebenarannya.

Nama "Bajo" bagi kelompok lain sering merupakan label atau stereotipe sebagai perompak atau bajak laut. Menurut cerita tutur yang berkembang bagi peneliti antropolog, kalangan perompak di zaman dulu diyakini berasal dari *Suku Same*. Sejak itu, orang-orang menyebut *Suku Same* sebagai Suku Bajo artinya suku perompak. Oleh karena Suku Bajo terkenal sebagai suku yang mendiami laut dan menyebar hingga ke seluruh Nusantara khususnya di Kawasan Timur Indonesia, sehingga orang memberi stereotipe kepada semua suku tersebut sebagai Suku Bajo yang berlabel suku perompak. Belakangan, stereotipe ini menimbulkan polemik, khususnya dari kalangan masyarakat Bajo. Banyak kalangan yang tidak menyetujui dan membantah arti "Bajo" sebagai perompak atau bajak laut.

Selain label nama yang berkonotasi negatif, stereotipe lain mengacu pada ciri-ciri fisik seperti kulit yang hitam legam, rambut

kekuning-kuningan, bahkan tidak jarang orang Bajo sebagai pembom dan pembius sumberdaya laut, bahkan dianggap bodoh karena tidak berpendidikan⁶. Stereotipe ini memang benar adanya jika mengacu pada konsep *boundary* Barth (1969) sebagai metafora yang bisa menjelaskan dan memahami arti *ethnic distinction*. Menurutny, konsepsi ini berdasarkan atribut-atribut perilaku, seperti ciri-ciri fisik atau cara berbicara, merupakan penentu bagi seseorang untuk masuk pada anggota suatu kelompok etnik tertentu.

Konstruksi Identitas Sebagai Bentuk Resistensi

Sebagai kelompok yang diberikan stereotipe dalam proses interaksi antaretnik, mereka berusaha melakukan resistensi atas definisi yang disematkan terhadap kelompoknya. Perlawanan sebagai respon atas stereotipe terhadap suatu kelompok merupakan upaya membangun perubahan struktur dalam suatu masyarakat. Resistensi bukan hanya satu bentuk perlawanan semata, melainkan berhubungan juga dengan berbagai pandangan budaya, atau bahkan stereotipe, yang menyertainya. Pertemuan antara kelompok-kelompok sosial bisa berlangsung dalam konteks sebagai ranah bagi kelompok tersebut berkontestasi, dalam hal ini dalam konteks-konteks tersebut bisa terwujud dalam arena resistensi (perlawanan) pelaku terhadap kelompok lain. Resistensi itu, dengan demikian, berkaitan juga dengan ikhtiar "orang kecil" yang berusaha melakukan satu tindakan untuk melawan rasa ketidakadilan yang dirasakan. Perlawanan biasanya dibungkus dalam idiom-idiom budaya agar tindakan yang dilakukan mendapatkan justifikasi kultural. Dengan kondisi yang termarginal dibanding etnik lain, akhir-akhir ini di Wakatobi terbentuk Persatuan Suku Bajo yang diakui oleh PBB dan mengukuhkan Ir. Abdul Manan, MS. sebagai Presiden Bajo yang mewadahi seluruh komunitas Bajo di seluruh dunia yang tersebar di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina (Lintang, 2010). Kondisi ini merupakan sebagai konstruksi identitas Suku Bajo berupa pengakuan terhadap eksistensi identitas budayanya yang sama dengan kelompok etnik lain di Nusantara. Selain itu, pada beberapa even-even politik (pemilukada

⁶ Lintang (2010) menuliskan bahwa orang Bajo sebagai orang laut memiliki penghasilan yang besar, namun tingkat pendidikan sangat rendah, tercatat hanya 0,5% dari 46% angka partisipasi sekolah di Sulawesi Tenggara

dan legislatif), orang Bajo melakukan negosiasi terhadap setiap calon kontestan demi kepentingan kelompoknya⁷.

Banyak kalangan yang beranggapan bahwa identitas etnik merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sadar (lihat Eriksen: 1993; Woodward: 1997; Maunati: 2000). Pandangan yang menganggap identitas etnik sebagai sesuatu yang secara sengaja dibangun jelas berkaitan dengan seperangkat kepercayaan relatif seputar konsep budaya (Maunati, 2004: 24). Oleh karena itu, kebudayaan sebaiknya dipandang sebagai produk dari proses-proses budaya sebelumnya dan sebagai sesuatu yang terbuka bagi segala reinterpretasi dan gagasan-gagasan baru serta ausnya komponen-komponen lama. Demikian pula halnya, konsep-konsep tentang identitas dan bahkan identitas itu sendiri semakin dipandang sebagai sebuah akibat dari adanya sebuah proses interaksi yang dinamis antara konteks (dan sejarah) dengan konstruk. Dengan demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Maunati (2004: 31) bahwa,

"Konstruksi identitas budaya bersifat kompleks sebagian karena konstruksi ini merupakan salah satu produk sejarah. Identitas kebudayaan itu sendiri bisa berubah dan diubah bergantung pada konteksnya, pada kekuasaan, dan pada vested interest yang bermain."

Berbicara tentang konteks dalam konstruksi identitas ini nampaknya sesuai dengan apa yang dikatakan McGuigan (1996) bahwa sejarah dikontemporerkan sepenuhnya dan dibuat tergantung pada pilihan-pilihan dan agenda subyektif yang spesifik untuk waktu tertentu, "sekarang dan hari ini". Atau dengan kata lain, agenda masa kini lah yang membentuk *image* tentang masa lalu. Karena etnisitas adalah fenomena yang dikonstruksi secara subyektif, maka definisi dari parameter-parameter untuk berbeda secara etnik tergantung pada perspetif si aktor yang bersangkutan (Thung, 2002). Oleh karena itu, tradisi kebudayaan sebagai penanda batas dibuat dan ditempatkan berdasarkan agenda-agenda selektif yang relasionalnya ditentukan

⁷ Menurut penuturan beberapa tim sukses pemilihan calon bupati Buton periode 2011-2015 bahwa mendekati dan mendapatkan suara orang Bajo dalam pilkada, selalu saja ada permintaan orang Bajo untuk diperhatikan dalam proses pembangunan di pemukiman mereka seperti permintaan pembangunan jembatan yang menghubungkan rumah-rumah dan dermaga pelabuhan perahu mereka ketika pulang dari melaut.

oleh *contingent circumstances* (Thung, 2002; Woodward, 1997). Dalam hal ini *contingent circumstances* dapat dilihat sebagai sebuah titik persinggungan antara berbagai kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi pengonstruksian identitas. Sebagaimana dikatakan oleh Katryn Woodward (1997: 28),

"on the one hand, identity is seen as having some essential core which marks out one group. On the other hand, identity is seen as contingent; that is, as the product of an intersection of different components, of political and cultural discourses and particular histories."

Fenomena ini memberikan gambaran bahwa agenda aktual masa kini sesungguhnya dapat mempengaruhi pembentukan kesadaran identitas, dan etnisitas itu sendiri bukanlah merupakan kategori keberadaan (*being*) yang esensial melainkan suatu konstruksi budaya yang terbentuk dari proses diskurif untuk "menjadi" (*becoming*). Dengan kata lain, identitas etnik tidaklah tetap, dan kecairan identitas tersebut menjadi kompleks akibat saling terkaitnya berbagai kategori-kategori sosial dengan konsep diri (*self*) (Thung, 2002).

Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang Bajo merupakan usaha menemukan kembali (*reinvention*) elemen-elemen pokok identitasnya dengan "mengunjungi kembali" (*revisiting*) akar sejarah yang bersifat khusus. Kekhususan sejarah yang di dalamnya



Aktivitas perempuan Bajo (Tasrifin Tahara)

melibatkan kemandirian wilayah dan kesetaraan berbasiskan kedaulatan etnik. Sebagai sebuah *project identity*, sangat jelas bahwa identitas politik orang Bajo adalah sebuah respon politik, sosial, budaya, dan sejarah terhadap realitas hubungan antaretnik yang di dalamnya menyertakan transformasi atas relasi kuasa antara kelompok-kelompok etnik maritim yang dominan selama ini. Politik identitas ini berfungsi sebagai "*pengada*" yang menstrukturkan kesadaran dan sentimen sosial baru yang menegaskan keberadaan orang Bajo sebagai kelompok etnik yang posisinya mendapat perhatian sebagai kelompok etnik maritim di Nusantara.

Penutup

Pasca reformasi di Indonesia, banyak kalangan yang mewacanakan tentang bangkitnya kembali kesadaran identitas budaya dan identitas etnik di Indonesia, khususnya pada berkembangnya gerakan-gerakan sosial yang berupaya untuk memunculkan kembali eksistensi masyarakat lokal maupun identitas budaya lokal. Manifestasinya pun beragam, sepertinya adanya gerakan sosial yang mengartikulasikan kembali proses pembentukan suatu identitas dengan tujuan untuk menegaskan kembali keberadaan suatu entitas sosial yang khas, atas dasar adanya kesamaan budaya, asal usul, kekerabatan, bahasa, agama, territorial, dan sentimen primordial. Pada taraf yang paling ekstrim, gerakan-gerakan sosial kadang berkembang menjadi sebuah perlawanan terhadap negara yang mengancam integrasi bangsa dan harmoni sosial dalam tatanan kehidupan bersama di tanah air ini. Meskipun berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah, namun upaya tersebut belum juga dapat menghilangkan perasaan sentimen etnis, prasangka, stereotipe, dan bahkan mengarah pada konflik sosial.

Dalam proses interaksi antar etnik di berbagai arena sosial, masih ada prasangka dan stereotipe etnik terhadap orang Bajo sebagai orang kotor, bodoh, dan bahkan sebagai kelompok perampok di laut. Sebagai kelompok yang disematkan stereotipe, Suku Bajo mengembangkan strategi dengan mengembangkan politik identitas sebagai bentuk pengakuan atas etnik yang sejajar dengan kelompok lain. Jika prasangka dan stereotipe ini terus direproduksi maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan antaretnik dan mengancam stabilitas bangsa.

Dengan munculnya politik identitas orang Bajo dalam bentuk gerakan-gerakan konstruksi identitas etnik, semestinya pemerintah memahami dan memberi ruang bagi orang Bajo dan memperkuat pemahaman multikulturalisme. Di sisi lain, perlu menciptakan kondisi struktural yang menjamin heterogenitas komunitas, terutama mengurangi rasisme institusional dengan tidak membatasi ruang gerak suatu kelompok etnik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, ataupun politik. Identitas etnik dan hidup harmoni berdampingan antaretnik berfungsi sebagai norma regulasi interaksi. Dengan memberi ruang kultural (bahari) orang Bajo, maka kondisi ini menjadi perekat bangsa Indonesia sebagai negara yang multietnik dan beragam budaya. Selain itu, pemerintah mestinya memanfaatkan potensi sosial budaya orang Bajo dalam menunjang proses pembangunan khususnya pembangunan kelautan. *****

Daftar Pustaka

- Abdilah S, Ubed, 2002, *Politik Identitas: Pergulatan Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatara.
- Abu-Lughod, Lila, 1989, "The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women". *American Ethnology*, No.32, p.27-39.
- Akamichi, Tomoya, and Dedi A Supriadi, 1996. Marine Resource Use in the Bajo of Nort Sulawesi an Maluku Indonesia, "*Senri Ethnological Studies*" No. 42.
- Eriksen, T. Hylland, 1993, *Ethnicity Nationalism; Anthropological Perspective*. London: Pluto Press.
- Gidens, Anthony, 2001, *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merobek Kehidupan Kita*. Jakarta: Gramedia
- Hamid, Abd Rahman, 2010, *Spirit Bahari Orang Buton*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Horridge, Adrian, 1986. *Sailing Craft of Indonesia*. Oxfor University Press, Oxford, New York.

- Kambo, Gustiana A, 2009. *Politik Identitas Dalam Konstruksi Identitas Etnik Mandar Sebagai Upaya Reinvention of Identity*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Koenjaraningrat, 1980, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Gramedia.
- Lampe, Mungsi, dkk., 2010, *Menggali Kelembagaan Lokal dan Wawasan Budaya Bahari yang Menunjang Bagi Penguatan Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial di Indonesia*, Laporan Penelitian Strategi Nasional, Dikti Kementerian Pendidikan Nasional RI
- , 2006, *Pemanfaatan Sumberdaya Taka Pulau Sembilan: Variasi Perilaku Nelayan dan Konsekuensinya Dalam Konteks Internal dan Eksternal*, Disertasi Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lapian, Adrian B, 1997, *Research on Bajau Communities: Maritime People in Southeast Asia*. Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, Jakarta.
- Leonard Y, Andaya, 1984, Aquatic Population-Historical Links Between the Aquatic Populations and The Coastal Peoples of the Malay World and Celebes, dalam Muhammad Abu Bakar et al., *Historia* (Makalah yang ditulis untuk memperingati ulang tahun ke-25 Jurusan Sejarah, University of Malaya).
- Lintang, 2010. Suku Bajo, <http://lintang2010.wordpress.com/2010/01/27/suku-bajo>.
- Maunati, Yekti, 2004, *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Pelras, C. 1996. *The Bugis*. Oxford: Blackwell.
- Poelinggomang, Edward, 2002. *Makassar Abad XIX. Studi Tentang Kebijakan Maritim*. Jakarta, Kepustakaan Indonesia Popular.
- Rabani, Laode, 2010. *Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Robert Zacot, Francois, 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rudyansjah, Tony, 2009. *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan; Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.

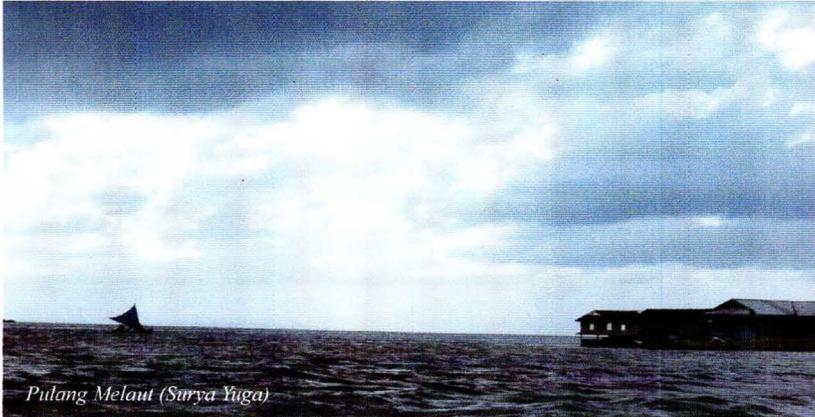
- School, JW, 2003. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Jakarta, Penerbit Djambatan- KITLV.
- Southon, M 1995, *The Navel of The Perahu: Meaning and Values in The Maritime Trading Economy of Butonese Village*. Canberra: Dept. of Anthropology Australian National University.
- Suparlan, Parsudi, 2004, *Hubungan Antara Sukubangsa*, Jakarta, YPKIK.
- Suyuti, Nasruddin, 2004, *Bajo dan Bukan Bajo; Studi Tentang Perubahan Makna Sama dan Bagai Pada Masyarakat Bajo*. Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga, Surabaya.
- Tahara, Tasrifin, 2010, *Reproduksi Stereotype dan Resistensi Orang Katobengke Dalam Struktur Masyarakat Buton*, Disertasi Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.
- Thung, Ju Lan, 1997, *Identities in Flux: Young Chinese in Jakarta*. Karya Disertasi, School of Sociology, Politics and Social Sciences, Latrobe University, Bundoora, Victoria, Australia.
- , 2004, "Politik Kebudayaan Baru Tentang Perbedaan", *Jurnal Masyarakat Indonesia dan Budaya*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, No.1. Jakarta: LIPI. Hal 55-63.
- Tsing, Anna Lowenhaupt, 1993. *In The Realm of the Diamond Queen, Marginality in an Out the Way Place*, Pricenton University Press.
- Usman, Moses, 2008, Ekologi Budaya: Etnoekologi Nelayan Suku Bajo Torosiaje Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo (Suatu Kajian Tentang Sumberdaya Alam, Pembangunan Berkelanjutan, dan Konservasi). *Jurnal Lensa Budaya*, Vol III, No.1, April 2008, FIB Universitas Hasanuddin.
- Woodward, Kathryn, 1997, *Identity and Difference*. London: Sage Publications.
- Zuhdi, Susanto, 2010, *Budaya Maritim, Kearifan Lokal dan Diaspora Buton*. Makalah yang dipresentasikan pada *The 2nd ICIS 2010 (International Conference on Indonesian Studies)*. 9 Agustus 2010, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok.



Pantai Perahu (Surya Yuga)



Pantai Wakatobi (Surya Yuga)



INTERAKSI ORANG BAJO DAN ORANG BUGIS Dalam Konteks Kearifan Lokal–Global di Desa Sulaho, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

H. Nasruddin Suyuti
Universitas Haluoleo, Kendari

Abstrak

*Desa Sulaho yang lebih dikenal sebagai perkampungan Bajo, selain bermukim orang Bajo sebagai kelompok mayoritas, juga terdapat orang Bugis sebagai kelompok minoritas. Interaksi sosial antara orang Bajo dan orang Bugis di Desa Sulaho telah berlangsung lama, sehingga konsep **sama** dan **bagai** mengalami perubahan. Konsep **sama** dan **bagai** pada masyarakat Bajo yang digunakan untuk membedakan orang Bajo dengan bukan Bajo telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya interaksi sosial yang telah berlangsung lama antara orang Bajo dan orang Bugis.*

*Konsep **sama** yang dimaknai sebagai sesama orang Bajo dan **bagai** yang berarti orang darat (bukan Bajo) tidak lagi menjadi penting. Kelompok masyarakat Bajo menganggap semua orang Bugis yang ada di perkampungan Sulaho sebagai bagian dari kerabat dekatnya (**dansihitang**), sebaliknya orang Bugis sebagai kelompok minoritas*

memandang masyarakat Bajo sebagai keluarga dengan istilah *sumpu' lolo Bajota*. Hal itu yang menyebabkan rasa kekeluargaan sebagai warga sekampung dapat terwujud. Akibat perubahan makna *sama* dan *bagai*, sehingga pola budaya orang Bugis mewarnai kehidupan masyarakat di Desa Sulaho. Meskipun demikian, alat tangkap tradisional dan nilai-nilai yang bersumber pada kepercayaan orang Bajo dan orang Bugis senantiasa dipertahankan.

Orang Bajo dan orang Bugis yang dikenal sebagai masyarakat maritim mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut. Kepercayaan yang menyangkut nilai-nilai tradisional menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Namun demikian akibat interaksi yang intensif dengan komunitas nelayan dari luar menyebabkan sebagian nelayan tradisional di Desa Sulaho lambat laun telah mengadopsi teknologi penangkapan ikan yang kadang-kadang tidak ramah lingkungan.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Bajo pada awalnya tinggal di atas perahu yang disebut *bido'*, hidup berpindah-pindah bergerak secara berkelompok menuju tempat yang berbeda menurut pilihan lokasi penangkapan ikan. Di atas perahu mereka menjalani hidupnya sejak lahir, berkeluarga hingga akhir hayatnya. Oleh sebab itu, orang Bajo sering disebut *sea nomads* (Sopher, 1971) atau *sea gypsies* (Brown, 1993). Dalam perkembangannya, sebagian besar dari mereka telah tinggal menetap di pinggir laut. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, mereka hidup menetap di laut atau di pinggir laut. Laut dijadikan sebagai sumber kehidupan (*panamamie ma di lao*). Mereka memiliki prinsip bahwa *pinde kulitang kadare, bone pinde sama kadare* yang berarti memindahkan orang Bajo ke darat, sama halnya memindahkan penyu ke darat (Nasruddin, 1996). Bahkan banyak diantara mereka merasa pusing kepalanya jika tidak mendengarkan gemuruh ombak (*pidi tikolo'na lamong nggai makale le goya*). Ungkapan tersebut menggambarkan betapa sulitnya memisahkan kehidupan mereka dengan laut.

Pada masyarakat Bajo, berkembang mitos bahwa Sang Dewata memperuntukkan lingkungan laut bagi orang-orang Bajo. Adanya konsep *Sama dapu ma di laok* (laut milik orang Bajo) yang berarti pula bahwa lingkungan darat, diperuntukkan bagi orang yang tinggal di

darat (Zacot, 1979). Oleh karena itu, pada umumnya orang Bajo memiliki mata pencaharian utama menangkap ikan atau memanfaatkan sumber daya alam laut, sedangkan lingkungan darat dengan segala potensi sumber daya alamnya kurang mendapat perhatian bahkan tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun dalam perkembangannya, orang Bajo selalu berada dalam sikap yang mendua, khususnya dalam interaksinya dengan orang *bagai*. Di satu pihak mereka tetap ingin mempertahankan ke" Bajo"annya yang identik dengan kehidupan di laut. Di pihak lain, keterikatannya dengan orang *bagai*, mengharuskan mereka berinteraksi dengan kehidupan di darat. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari, orang Bajo mengenal dua konsep yang berbeda dalam interaksi sosialnya yakni *sama* dan *bagai*. Mereka menyebut dirinya *sama* (orang Bajo) yang membedakannya dengan orang bukan Bajo (*bagai*) (Alena, 1975; Haris, 1991; Suyuti, 1996; Zacot, 1979). Konsep *sama* dan *bagai* bukan hanya merupakan simbol "Bajo" dan "Bukan Bajo", tetapi juga merupakan simbol kehidupan di "laut" dan "darat" (Suyuti, 2011).

Konsep tersebut telah mengalami perubahan pada masyarakat Bajo di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, akibat interaksi yang intensif dengan orang *bagai* khususnya orang Bugis. Desa Sulaho yang mayoritas penduduknya adalah orang Bajo, dikenal sebagai perkampungan orang Bajo, sedangkan orang Bugis merupakan kelompok minoritas. Walaupun demikian bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Bugis, sedangkan bahasa Bajo kadang-kadang hanya digunakan oleh orang-orang tua atau jika bertemu dengan kerabatnya yang datang dari luar Desa Sulaho.

Kelompok sukubangsa mayoritas (Bajo) telah mengadaptasikan unsur-unsur budayanya ke dalam unsur-unsur budaya kelompok sukubangsa minoritas (Bugis). Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila unsur-unsur budaya sukubangsa Bugis lebih dominan ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Bajo. Sebagai warga sekampung yang memiliki hubungan simbiotik, mobilitas interaksi antar kelompok sangat intens, tidak mengenal lagi batasan waktu dan ruang. Kelompok masyarakat Bajo menganggap semua orang Bugis yang ada di perkampungan Sulaho sebagai bagian dari kerabat dekatnya (*dansihitung*), sebaliknya orang Bugis sebagai kelompok minoritas memandang masyarakat Bajo sebagai keluarga

dengan istilah *sumpu'olo Bajota*.

Dalam pengelolaan sumberdaya laut, orang Bajo cenderung mengadopsi pola pemanfaatan teknologi penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Bugis di Desa Sulaho maupun di luar Desa Sulaho. Karena keterbatasan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh nelayan Bajo, sehingga masih banyak nelayan yang menggunakan teknologi sederhana dalam memanfaatkan sumber laut, seperti perahu (sampan) dan alat tangkap lainnya.

B. INTERAKSI ANTARA ORANG BAJO DAN BUGIS DI DESA SULAHO

1. Proses Interaksi: Perubahan Makna *Sama* dan *Bagai*

Interaksi antara orang Bajo dan Bugis diawali dengan proses perubahan makna *sama* dan *bagai* pada orang Bajo di Desa Sulaho, yang dapat dilihat dari periodisasi kehidupan yang pernah dilaluinya, yakni:

a. Asal usul orang Bajo berdasarkan Mitos Sawerigading

Periode awal dari kehidupan orang Bajo di Desa Sulaho, dimulai berdasarkan asal usulnya (mitos Sawerigading). Ketika Sawerigading di Kampung Ussu, Desa Cerekang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menebang pohon *walenrangnge* untuk dijadikan perahu yang akan dipergunakan. Pada saat pohon berhasil ditumbang, telur burung yang bersarang di pohon tersebut berjatuhan dan pecah sehingga menimbulkan banjir telur. Orang-orang yang ada di sekitar pohon tersebut hanyut bersama rumahnya yang kemudian berfungsi sebagai perahu yang diberi nama *bido'* (perahu yang dijadikan tempat tinggal).

Penduduk Ussu yang tidak hanyut, melihat saudara-saudaranya di tengah laut sedang dipermainkan ombak, nampak terbayang-bayang (*ta'bajo-bajo*) dan menyebutnya sebagai orang Bajo. Anggota kelompok yang hanyut kemudian menyebar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai arah angin ke berbagai penjuru tanah air, bahkan ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Sejak saat itu, semua anggota kelompok bersama

keturunannya disebut orang *sama* yang bermakna “sama-sama” di laut, sedangkan kelompok masyarakat yang hidup di darat disebutnya orang *bagai*.

Perubahan pola pemukiman dari darat ke laut menyebabkan orang Bajo mengalami perubahan budaya. Nenek moyangnya yang hanyut dengan latar belakang budaya orang Bugis, melakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang dialaminya pada saat itu, termasuk munculnya bahasa yang kemudian menjadi simbol sesama orang Bajo yang disebut *boang sama*. Dengan demikian *boang sama* dapat berarti simbol bagi masyarakat Ussu yang karena takdir hanyut dan terbuang bersama ke laut kemudian menjadi orang Bajo.

b. Kehidupan di atas *Bido*’ sebagai Masyarakat Nomaden

Dari Kampung Ussu, masyarakat Bajo memulai kehidupannya sebagai orang laut kemudian hidup mengembara di atas laut. Pada periode ini, konsep *sama* bermakna sesungguhnya akibat kehidupannya yang berbeda dengan kehidupan orang *bagai* yang bermukim di darat. Meskipun demikian, interaksinya dengan orang *bagai* khususnya orang Bugis tetap terjalin. Sebagai orang laut mereka tetap terikat dengan orang *bagai* dalam memenuhi kebutuhannya, baik sandang maupun pangan meskipun dengan cara barter. Interaksi antara orang Bajo dengan orang Bugis, menyebabkan pola budaya orang Bugis mulai memberi warna terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi orang Bajo.

c. Masa Transisi dari Perahu *Bido*’ ke Pantai

Kehidupan masyarakat Bajo pada periode ini, ditandai dengan pola pemukiman yang mulai menetap di Sulaho, dengan mendirikan rumah panggung di atas air pada kawasan pantai. Periode ini disebut periode transisi karena terjadi pola hidup sebagai pengembara (nomaden) ke pola hidup menetap, sekalipun dalam situasi tertentu kehidupan mengembara tetap dilakukan. Interaksi antara orang Bajo dengan orang Bugis semakin intensif, dengan kehadiran pasukan Kahar Muzakkar yang pada umumnya orang Bugis pada tahun 1965. Kampung Sulaho yang secara geografis terpencil dan dikelilingi gunung dan hutan lebat menjadi tempat persembunyian yang strategis.

Kahar Muzakkar dengan kharisma yang dimiliki, mampu mengambil hati kelompok masyarakat Bajo. Dengan pendekatan keagamaan, beberapa anggota kelompok masyarakat Bajo mulai intensif menggunakan bahasa Bugis.

d. Pemukiman di Darat

Pemukiman di darat dimulai pada tahun 1972 oleh seluruh warga masyarakat Bajo di kampung Sulaho dan tidak ada lagi yang bermukim di atas air di pinggir pantai. Ciri utama pada periode ini, selain telah bermukim di darat juga adanya kebutuhan sarana produksi dan transportasi sebagai kelompok yang menggantungkan hidupnya pada laut. Orang-orang Bugis memperkenalkan kepada mereka sejenis perahu bercadik yang disebut *lepa-lepa* yang dijadikan sarana penangkapan ikan dan transportasi.

Meningkatnya mobilitas orang Bajo menyebabkan kelompok ini semakin “dekat” dengan kehidupan orang Bugis, bahkan mulai terjadi kawin-mawin antara dua kelompok masyarakat ini. Makna *sama* dan *bagai* telah bergeser akibat ketergantungannya pada masyarakat Bugis, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang, pangan maupun berbagai alat produksi.

e. Intervensi Pemerintah dalam Kegiatan Sistem Pemukiman Sosial

Periode ini ditandai dengan adanya Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT) melalui Sistem Pemukiman Sosial (SPS). Diawali dengan penelitian dan pengkajian sosial budaya dan lingkungan masyarakat terasing suku Bajo di kampung Sulaho pada tahun 1995, kemudian ditindaklanjuti dengan dibangunnya 85 unit rumah semi permanen pada tahun 1996 yang disertai dengan jaminan hidup (*jadup*) berupa bantuan pangan dan alat-alat produksi selama lima tahun, serta berbagai macam pengetahuan dan penyuluhan yang diberikan.

Melalui kegiatan ini, makna *sama* dan *bagai* dalam tataran konsep kewilayahan mengalami pergeseran. Konsep *sama dapu'ma di lao* yang berarti laut milik orang Bajo, dan *bagai dapu'na di dare* yang berarti pula darat milik orang *bagai* tidak



Pola Rumah Sistem Pemukiman Sosial (SPS) di Wakatobi (Surya Yuga)

lagi menjadi penting. Batasan wilayah sebagai hak ulayatnya adalah laut, kini berangsur-angsur bergeser ke makna yang lebih luas. Lingkungan darat terutama pemukiman dan lahan perkebunan yang diberikan oleh pemerintah kini menjadi penting, meskipun lahan tersebut tidak diolah dengan baik.

Intensifnya program-program pemerintah yang menyertai Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT), mengakibatkan kelompok masyarakat Bajo semakin membuka diri. Oleh karena itu, semakin kuat kecenderungannya untuk mengadopsi sistem budaya orang Bugis, baik secara parsial terutama melalui bahasa dan sistem teknologi maupun secara totalitas berupa adat istiadat orang Bugis yang berimplikasi pada tingkat kehidupan yang lebih baik.

2. Pola Interaksi dan Kondisi Penunjang Perubahan

Kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Bajo cenderung bergerak menuju ke arah konsepsi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh kelompok masyarakat *bagai*, khususnya masyarakat Bugis, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu: (a) ikatan geneologis yaitu adanya asal usul yang sama dengan orang Bugis; (b) orientasi ekonomi yaitu ketergantungannya

terhadap orang Bugis; (c) keunggulan komparatif yaitu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang Bugis terhadap orang Bajo, dan (d) status sosial yakni keinginan orang Bajo “tampil” seperti orang Bugis.

Tentunya faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait satu sama lain dan muncul berdasarkan adaptasi masing-masing kelompok pelaku perubahan (pendukung kebudayaan). Faktor-faktor ini juga muncul berdasarkan kebutuhan dari masing-masing kelompok pelaku perubahan dalam interaksinya dengan orang *bagai*, khususnya orang Bugis.

a. Ikatan Geneologis

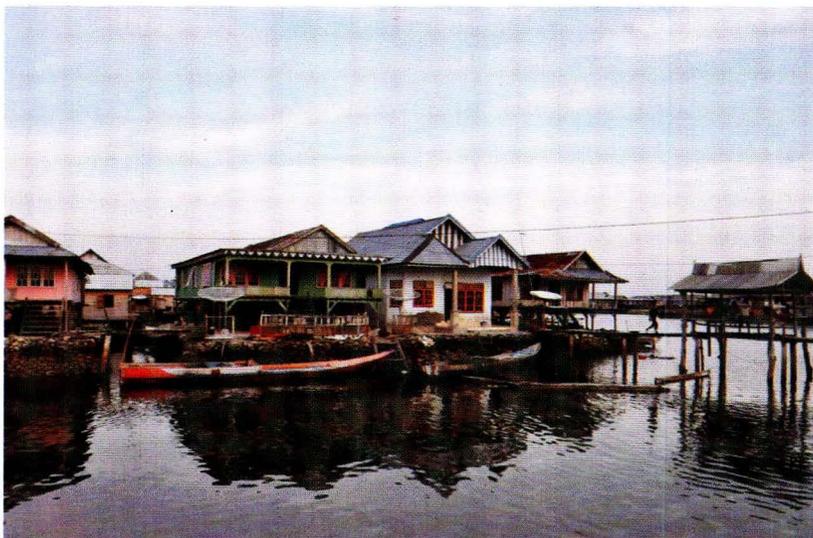
Munculnya konsep *sama* dan *bagai* pada masyarakat Bajo telah melahirkan pola interaksi yang berbeda secara kultural antara kelompok masyarakat Bajo dengan masyarakat bukan Bajo yang cenderung bersifat segregatif khususnya dalam hal okupasi dan pemukiman.

Kelompok masyarakat Bajo dan kelompok masyarakat Bugis, memiliki asal usul yang sama (geneologis). Sesuai mitos yang berkembang, orang Bajo di Sulaho meyakini asal usulnya dari Ussu-Cerekang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendasari perubahan makna *sama* dan *bagai*. Orang Bugis di mata orang Bajo di Desa Sulaho dianggap saudara.

Hubungan kekerabatan antara orang Bajo dan Bugis berdasarkan asal usul sebagaimana digambarkan dalam mitos Sawerigading, dapat dilihat pada kisah *Walenrangnge* dan *Petta Saddampalie*. Walaupun kedua kisah tersebut bersifat mitos, tetapi kepercayaan orang Bajo terhadap mitos tersebut mempertegas garis imperial kelompok masyarakat Bajo. Setidaknya yang bermukim di Desa Sulaho berasal dari keturunan orang Bugis yang bermukim di Ussu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Karena itu, ketika terjadi interaksi sosial antara orang *sama* dan *bagai*, hanya dengan orang-orang Bugis padangan dari kelompok *bagai* yang dapat bertahan dan berlangsung secara harmonis, karena adanya faktor geneologis dan faktor-faktor lainnya.

Perbedaan antara kelompok masyarakat Bajo dengan kelompok

masyarakat Bugis terletak pada konsep budaya dalam memandang dirinya dan memandang orang lain melalui simbol *sama* dan *bagai* sebagai ciri internalnya. Peran ekologi dan letak geografis wilayah pemukiman kelompok masyarakat Bajo yang sebelumnya nomaden hingga bermukim di pantai yang cenderung memilih lokasi yang terisolir, membentuk perbedaan-perbedaan tersebut. Kelompok masyarakat Bajo dengan pola budayanya di laut selama berabad-abad, tidak banyak menyerap unsur-unsur budaya dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan lain, sebaliknya kelompok masyarakat Bugis yang hidup di darat dan juga memiliki



Rumah Orang Bugis dan Bajo di Wakatobi (Surya Yuga)

semangat kebaharian telah mengalami berbagai macam interaksi dengan kelompok lain sehingga telah menyerap berbagai macam nilai-nilai baru.

Dalam kondisi perkembangan budaya seperti ini masyarakat Bajo tetap mempertahankan kecenderungannya untuk selektif berinteraksi dengan kelompok masyarakat luar (*bagai*) dengan mengembangkan konsep budaya *olai lesse* (menghindari konflik). Karena itu kelompok masyarakat ini tetap menjadi kelompok masyarakat yang senantiasa “mengisolir diri” sehingga dalam

memilih tempat pemukiman tetap bersifat segregatif. Adanya kepercayaan bahwa laut adalah milik kelompoknya (*sama dapu'ma di lao'*) menyebabkan pilihan pekerjaan hanya sebagai nelayan, sementara itu kelompok masyarakat *bagai* telah mengembangkan berbagai macam diversifikasi pekerjaan, termasuk orang Bugis.

Kecenderungan bertahannya kehidupan segregatif bagi kelompok masyarakat Bajo terkait dengan pola kehidupannya sebagai orang laut dengan kehidupan yang tidak menentu. Konsep *sama* yang telah melahirkan perasaan senasib sebagai orang laut, menuntut untuk mementingkan kewajiban, kesetiaan dan kerjasama kelompok sehingga sedikit orientasi kepentingan yang bersifat individual. Perasaan senasib sebagai kelompok kolektif dituangkan dalam simbol *sama* menjadi ikatan yang erat dalam mempertahankan identitas kelompok sebagai orang laut. Sebaliknya, untuk interaksinya secara eksternal dikembangkan konsep berlawanan dengan konsep *sama*, yakni *bagai* atau berbagai macam kelompok masyarakat yang hidup di darat sebagai milik orang *bagai*. Dengan adanya perbedaan kedua konsep ini, sehingga dengan karakteristik yang dimilikinya, masyarakat Bajo cenderung memilih lokasi pemukiman yang terisolir, tertutup dan selalu berorientasi ke laut.

Konsep *sama* dan *bagai* adalah suatu simbol yang dipedomani oleh kelompok masyarakat Bajo dalam menjalin hubungan antara kelompoknya dengan kelompok masyarakat lain. Bagi orang Bajo di Desa Sulaho, orang Bugis tidak lagi termasuk kategori orang *bagai*, oleh sebab itu dalam kehidupan masyarakat Bajo di Desa Sulaho berkembang istilah "Bajo campuran" atau "Bugis Bajo". Hal ini disebabkan karena terjadinya kawin mawin (amalgamasi) antara orang Bajo dengan orang Bugis, baik dengan orang Bugis yang berdomisili di Desa Sulaho maupun yang ada di luar Desa Sulaho. Berbeda halnya dengan kelompok masyarakat *bagai* dari etnis lain jarang sekali terjadi kawin mawin dengan orang Bajo, karena faktor geneologis menjadi acuan bagi mereka.

b. Orientasi Ekonomi

Sejarah perjalanan kehidupan orang Bajo menunjukkan adanya kontak dagang yang telah berlangsung lama dengan orang Bugis.

Pada awalnya, kontak dagang hanya terjadi di tengah laut dengan sistem *selo* (barter) antara orang Bajo dengan orang Bugis. Pada perkembangan selanjutnya, kehadiran orang Bugis yang bermukim di pesisir pantai sangat dibutuhkan oleh orang Bajo untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik sandang, pangan maupun pemenuhan alat-alat produksi penangkapan ikan. Bahkan intensitas pertemuannya tidak hanya terjadi di tengah laut atau di pantai dalam kaitannya dengan distribusi hasil tangkapannya, tetapi orang Bajo telah menjangkau aktivitas perdagangan di pasar, baik untuk kepentingan menjual hasil tangkapannya maupun untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Sementara itu, aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional di Lasusua dan Lambai pada umumnya dilakukan oleh orang-orang Bugis. Begitu pula dalam pengadaan alat-alat produksi, khususnya dalam pembuatan perahu (*lepa-lepa*) maupun perahu bermesin (*katinting*), orang Bajo telah menjalin kerjasama dengan *panrita lopi* (pembuat perahu). Profesi sebagai *panrita lopi* kebanyakan ditekuni oleh orang-orang Bugis yang berdomisili di desa-desa sekitar Desa Sulaho. Ketergantungan orang Bajo terhadap orang Bugis dalam pemenuhan berbagai kebutuhannya, menyebabkan berbagai unsur-unsur budaya orang Bugis lambat laun diadopsi oleh orang Bajo. Hal ini dapat dimaklumi, karena dalam interaksi tersebut orang Bajo senantiasa melakukan interpretasi terhadap apa yang ia terima, kemudian dikomunikasikan secara timbal balik sehingga menghasilkan keputusan untuk melakukan suatu tindakan.

Ketergantungan orang Bajo terhadap orang Bugis dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, mencerminkan ketergantungan masyarakat Bajo dengan kehidupan di darat sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa posisinya lebih rendah dibandingkan dengan orang Bugis. Mereka tidak dapat menghindari dari kenyataan ini, sehingga satu-satunya jalan adalah mengadaptasikan pola-pola budayanya terhadap kebudayaan Bugis. Keinginan untuk “menjadi” orang Bugis sangat besar, mereka bercermin pada keberhasilan orang Bugis yang ada di desa tetangga seperti Lambai dan Lasusua, yang juga merupakan langganannya dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Untuk memenuhi keinginannya, mereka tidak dapat lagi mempertahankan simbol-simbol yang selama ini dipedomani, termasuk simbol *sama* dan *bagai*. Hal itu berdampak pada sistem produksinya yang tidak

lagi sekedar berorientasi untuk konsumsi tetapi sudah berorientasi pada pengumpulan modal. Oleh sebab itu, alasan ekonomi menjadi salah satu faktor perubahan makna *sama* dan *bagai* pada masyarakat Bajo di Desa Sulaho.

c. Keunggulan Komparatif

Interaksi sosial yang intensif dalam kurun waktu yang lama antara orang Bajo (*sama*) dengan orang Bugis (*bagai*) baik di Desa Sulaho maupun di luar Desa Sulaho, telah melahirkan interpretasi terhadap kehidupan orang *bagai* (Bugis). Bagi orang Bajo, orang Bugis dipandang sebagai kelompok yang menguasai berbagai bidang kehidupan baik di laut maupun di darat. Pandangan ini cenderung memperlihatkan adanya keunggulan komparatif yang dimiliki oleh orang-orang Bugis, bahkan sebelum bermukimnya orang Bajo di kampung Sulaho.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki orang Bugis memasuki semua dimensi kehidupan sosial kelompok masyarakat Bajo. Keunggulan-keunggulan yang dimaksud meliputi: (1) bahasa Bugis yang digunakan sebagai bahasa pengantar di desa-desa sekitar, termasuk penggunaannya di pasar Lambai, Lasusua dan Ranteangin; (2) keunggulan dalam jabatan-jabatan formal, seperti jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan; pengetahuan di bidang keagamaan; (3) keunggulan ekonomi; (4) pemanfaatan teknologi dan informasi, dan (5) keunggulan di bidang pendidikan. Menurut orang Bajo jabatan-jabatan tersebut, pada umumnya diisi oleh orang Bugis yang juga menjadi panutan masyarakat Bajo di Desa Sulaho. Karena itu, posisi orang Bugis sebagai *significant others* semakin kuat. Keunggulan-keunggulan komparatif yang diperlihatkan orang-orang Bugis, menyebabkan kelompok masyarakat Bajo menerima keberadaannya sebagai kelompok masyarakat "*inferior*" dan sebaliknya memandang orang Bugis sebagai kelompok "*superior*".

Pandangan tersebut mulai nampak ketika Kampung Sulaho dijadikan sebagai desa definitif, banyak orang Bugis karena tingkat pendidikannya tampil menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan desa, maupun kedudukan-kedudukan lainnya. Sebagai satu kesatuan masyarakat desa, orang Bugis tampil memainkan peran yang lebih aktif dalam kehidupan

bermasyarakat. Hal itulah yang menyebabkan penerimaan kelompok masyarakat Bajo terhadap orang Bugis semakin terbuka.

Peran tokoh-tokoh formal seperti guru, paramedis, pemuka agama, dan penyuluh perikanan sangat berpengaruh. Hal itu disebabkan karena fungsi, perilaku dan keteladannya langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa (kelompok masyarakat Bajo) sehingga dengan cepat mendapat posisi sebagai elit desa. Orang Bugis tampil sebagai pelopor dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, seperti kegiatan perkawinan, keagamaan, selamatan, dan sebagainya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang Bugis yang diperankan dalam setiap aktivitasnya sehari-hari, antara lain menjadi penyebab makna *sama* dan *bagai* mengalami perubahan.

d. Status Sosial

Bertolak dari perubahan status kampung Sulaho sebagai pemukiman Bajo menjadi Desa Sulaho membawa konsekuensi dengan munculnya kecenderungan superioritas orang-orang Bugis di mata kelompok masyarakat Bajo. Karena Dusun Sulaho sebagai ibukota Desa Sulaho yang otomatis menjadi pusat pemerintahan desa, sehingga mobilitas orang-orang Bugis ke perkampungan Bajo tersebut semakin tinggi. Hal ini terjadi karena pembentukan Desa Sulaho, kemudian diikuti oleh pembentukan struktur organisasi dan sarana prasarana pemerintahan yang baru serta berbagai perangkat-perangkat pendukung pemerintahan desa lainnya.

Pada posisi itu, perkampungan Sulaho menjadi perkampungan terbuka yang secara administratif masyarakat Bajo mulai membuka interaksi dengan orang luar, yang sebelumnya jarang terjadi di Desa Sulaho. Mulai dari urusan pemerintahan hingga ke masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Begitu pula partai politik tertentu mulai membuka ranting di Desa Sulaho, kesemuanya itu membawa perubahan yang signifikan bagi kelompok masyarakat Bajo.

Orang-orang Bugis yang menjalankan tugasnya di Desa Sulaho, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas-tugas pokoknya, namun karena adanya tuntutan masyarakat Bajo yang lebih luas menyebabkan mereka memainkan peran-peran sosial lain, seperti tokoh agama dan tokoh adat dan sebagainya. Karena selalu tampil

menjadi pelopor dalam setiap kegiatan kemasyarakatan maka kehadirannya semakin dibutuhkan.

Tampilnya orang-orang Bugis dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Bajo. Orang Bugis dianggap sebagai “tokoh pembaharu” yang telah banyak membawa perubahan, oleh sebab itu kecenderungan orang Bajo tampil ”seperti” orang Bugis sangat besar. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Bajo berusaha mengadaptasikan pola budayanya kepada pola budaya orang Bugis. Bahasa Bugis yang dipergunakan oleh orang Bajo tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang Bugis, tetapi juga digunakan berkomunikasi dengan sesama orang Bajo. Nampaknya, dengan menggunakan bahasa Bugis menjadi simbol bagi kelompoknya untuk menjadi “masyarakat maju” dan meninggalkan peredikatnya sebagai masyarakat terisolir.

Penggunaan bahasa Bugis sebagai alat komunikasi dan sekaligus pemersatu bagi masyarakat Desa Sulaho, berdampak pada perkembangan budaya masyarakat Bajo. Anak-anak usia sekolah (12 tahun ke bawah) sudah tidak dapat berbahasa Bajo, bahkan bahasa yang dikuasai selain Bahasa Bugis adalah Bahasa Indonesia.

Proses perubahan ini tidak hanya terjadi karena peran yang dimainkan oleh orang-orang Bugis, tetapi juga sebagai akibat meningkatnya mobilitas interaksi masyarakat Bajo dengan kelompok masyarakat Bugis yang ada di desa-desa tetangga, terutama di pasar Lambai dan pasar Lasusua. Di antara kelompok masyarakat Bajo yang memiliki mobilitas tinggi berinteraksi dengan orang-orang Bugis di luar desa adalah kelompok perempuan yang bekerja sebagai *pappalele* (pedagang perantara) sekaligus sebagai penjual eceran ikan di pasar. Untuk kepentingan distribusi dan konsumsi, kelompok ini harus berhadapan dengan superioritas orang-orang Bugis di pasar, baik sebagai sesama penjual ikan maupun sebagai pembeli.

Identitasnya sebagai orang Bajo cenderung dinilai “negatif”, sehingga kadang-kadang dilecehkan. Status sosial sebagai “masyarakat terisolir” yang melekat pada diri orang Bajo selama ini



Interaksi Perempuan Suku Bajo dan Suku Bugis (Surya Yuga)

membuat mereka untuk “tampil” seperti orang Bugis, antara lain dengan menggunakan bahasa Bugis dan unsur-unsur budaya Bugis lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka sesungguhnya telah berbeda dengan orang-orang Bajo lainnya, dan ini merupakan bentuk adaptasi untuk mempermudah menjalankan perannya sebagai *pappalele* (pedagang perantara) terhadap *pappettu* (penjual ikan) di pasar yang semuanya adalah orang Bugis, dan berbagai kebutuhan dan interaksi lainnya. Begitu pula dengan kelompok pemuda/remaja, mereka senang disebut orang Bugis sebagai simbol kehidupan orang maju, sebagaimana kehidupan orang Bugis yang ada di desa-desa sekitarnya.

Menurut orang Bajo, status sosial orang Bugis lebih baik dari orang Bajo sebagai orang *sama*, yang hidupnya hanya sebagai nelayan. Citra diri yang terlanjur melekat pada kelompoknya yang lebih dikenal sebagai masyarakat terisolir (*inferior*) dan orang Bugis sebagai kelompok *superior* semakin memperlebar jarak sosial kedua kelompok. Akibatnya, untuk mengangkat status sosialnya, terutama untuk ke luar dari citra diri tersebut, menjadi “orang Bugis” adalah pilihan yang tepat dalam rangka meningkatkan status sosialnya. Oleh sebab itu, masyarakat Bajo di

Desa Sulaho, terdapat beberapa kelompok yang dikategorikan berdasarkan peran-peran yang dimainkan dalam merespon perubahan tersebut. Berusaha “tampil seperti” orang Bugis paling tidak dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang Bugis di luar Desa Sulaho.

C. ORANG BAJO DAN BUGIS DI DESA SULAHO: PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN ALAT TANGKAP RAMAHLINGKUNGAN

Kebudayaan digunakan sebagai acuan manusia untuk mengelola lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam. Dengan kebudayaan, manusia akan dapat memilah-milah, mana yang dianggap bermanfaat atau tidak, atau menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidupnya sehingga hubungan antara manusia dengan lingkungannya dapat berlangsung secara selaras, serasi dan seimbang (Suparlan, 1986). Penentuan pilihan-pilihan dan pengkategorian tersebut didasarkan pada seperangkat pengetahuan yang disebut dengan kearifan lingkungan.

Dalam usaha mempertahankan hidupnya, orang Bajo dan orang Bugis di Desa Sulaho memiliki seperangkat pengetahuan yang diterapkan, dikembangkan dan diwariskan guna memanfaatkan dan mengelola sumber daya laut. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam berbagai larangan dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya laut.

Orang Bajo dan orang Bugis di Desa Sulaho mempercayai adanya dunia gaib yang dihuni oleh makhluk halus yang disebut *pamakitalo*. Makhluk halus tersebut diyakini sebagai leluhurnya yang bernama *Petta Saddampalie (Nenek Baliang)*. Mereka mempercayai bahwa *Nenek Baliang* memiliki kekuatan supranatural yang dapat mendatangkan bencana maupun pertolongan. Sang Dewata yang merupakan pencipta alam dengan segala isinya telah memberikan tugas kepada *Nenek Baliang* untuk menjaga laut. Oleh sebab itu, manusia dalam melakukan aktifitasnya di laut harus terlebih dahulu meminta izin kepada penjaganya. Bila seseorang mengalami musibah di laut, maka ia harus meminta pertolongan kepada penjaga laut dengan menyebut namanya. Selain *Nenek Baliang*, juga terdapat hantu-hantu

laut yang merupakan penjelmaan roh-roh orang yang meninggal di laut. Apabila seseorang tenggelam dan meninggal dunia di laut, maka rohnya akan menjadi hantu. Wujud hantu laut dapat berubah-ubah, menyerupai manusia, ikan atau gurita, serta diyakini bahwa jika melihat makhluk halus tersebut di permukaan laut, maka tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

Berbagai larangan yang diajarkan oleh leluhur mereka secara turun temurun, antara lain:

- a. Dilarang membuang sisa-sisa kayu bakar ke laut;
- b. Dilarang mengambil atau mencuri harta atau milik orang lain di laut;
- c. Dilarang mengucapkan kata-kata kotor selama di laut;
- d. Dilarang menyentuh atau mengambil benda-benda terapung, karena diyakini benda-benda tersebut ditumpangi atau didiami oleh roh-roh halus;
- e. Tidak boleh terperanjat apabila melihat sesuatu yang aneh di tengah laut;
- f. Apabila ada sesuatu terjatuh ke dalam laut, tidak boleh diambil karena hal itu sudah menjadi milik penjaga laut, dan
- g. Air yang ada di dalam perahu tidak boleh dibuang ke luar sebelum perahu melaju.

Larangan atau pantangan tersebut apabila tidak diindahkan maka seseorang akan mendapatkan musibah, baik ketika berada di laut maupun di darat. Orang Bajo dan orang Bugis di Desa Sulaho menyadari bahwa mematuhi semua pantangan/larangan akan menimbulkan keseimbangan lingkungan laut. Selain keterikatan nilai-nilai budaya dan norma adat, pengawasan terhadap areal penangkapan ikan dan aset-aset ekonomi lainnya, dilakukan oleh masyarakat baik secara kolektif maupun individual. Tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan nilai budaya akan mendapat reaksi dari masyarakat.

Pada umumnya nelayan dalam pemanfaatan sumber daya laut, masih menggunakan teknologi sederhana. Selain karena keterbatasan dana untuk membeli alat tangkap modern, seperti perahu bermesin (*katinting*) juga karena adanya pengetahuan tradisional yang dimiliki untuk mempertahankan ekosistem laut. Berbagai alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Desa Sulaho, di antaranya:

a. Pancing

Penangkapan ikan dengan menggunakan pancing dapat dilakukan di sekitar pesisir pantai maupun di laut lepas, di mana terdapat banyak karang sebagai tempat berkumpulnya ikan. Untuk menjangkau lokasi tersebut biasanya nelayan menggunakan perahu kecil tanpa mesin (*lepa-lepa*) maupun dengan perahu bermesin (*katinting*) agar lebih mudah berpindah lokasi. Alat pancing yang digunakan adalah tali nilon atau tali yang panjangnya bervariasi antara 50 sampai 100 meter yang digulungkan pada sepotong bambu atau plastik. Pada tali tersebut dipasang mata pancing dengan jarak antara 0,5 meter sampai 1 meter, di atas mata pancing dipasang bulu ayam atau bulu kambing sebagai umpan. Hasil yang didapat tergantung perolehan pada setiap tarikan pancing, misalnya: tali dengan 100 mata pancing biasanya menghasilkan antara 25 sampai 75 ekor ikan dari berbagai jenis, antara lain ikan *lajang*, *cakalang*, *commo-commo*, *botto-botto* dan lain-lain. Tenaga yang dibutuhkan untuk menangkap ikan dengan cara memancing adalah 1 sampai 4 orang. Jika jumlah tenaga banyak, biasanya dibarengi dengan kegiatan lain, seperti menyelam untuk mendapatkan teripang, *lola*, *japing-japing*, penyu sisik dan lain-lain.

b. Pukat/Jaring

Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat/jaring dilakukan di laut lepas sehingga untuk menjangkaunya digunakan perahu bermesin (*katinting*) agar dalam merentangkan pukat/jaring, perahu yang digunakan selalu dalam keadaan bergerak (memutar) dan mudah dipindahkan ke lokasi lain. Pukat/jaring yang digunakan biasanya dibeli dalam bentuk jadi. Bahan yang digunakan serta ukuran mata jaring disesuaikan dengan jenis ikan yang akan ditangkap. Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat biasanya dilakukan oleh 2 atau 3 orang.

c. Mallanra

Penangkapan ikan dengan cara ini sama dengan pukat, karena alat yang digunakan juga adalah pukat/jaring tetapi ukurannya nyaman jaring yang lebih kecil yaitu 1.5 sampai 2 inci dan lokasi penangkapan dilakukan di sekitar pesisir pantai. Karena lokasinya dangkal maka dapat dilakukan tanpa perahu atau dengan berjalan

sambil menebar pukat/jaring. Ujung pukat/jaring dipegang, lalu berjalan memutar pada lokasi di mana terdapat ikan yang sedang berkumpul. Cara ini sering dilakukan oleh anak-anak untuk dikonsumsi sendiri karena jumlah hasil tangkapan sedikit dan tidak cukup untuk dijual.

d. Mallampu

Sama halnya dengan *malanra*, *mallampu* adalah cara penangkapan ikan yang dilakukan di pesisir pantai pada malam hari pada saat air surut. Alat yang digunakan adalah lampu petromaks sebagai penerang, tombak, panah, golok (parang) dan ember sebagai tempat penampungan ikan hasil tangkapan. Ikan yang ditangkap biasanya dalam ukuran kecil, seperti *karama* (kepiting), ikan *pote mate*, ikan *bolu* (bandeng), teripang, dan ikan *kerungkerung*.

e. Menyelam

Menyelam biasanya dilakukan untuk mencari hasil laut seperti teripang, *lola*, *kima*, *japing-japing*, kerang mutiara dan rumput laut pada kedalaman antara 10 sampai 50 *depa*. Untuk menjangkau lokasi tersebut digunakan perahu bermesin (*katinting*). Alat transportasi ini dapat membawa berbagai peralatan yang digunakan seperti mesin kompresor sebagai sumber oksigen (alat bantu pernapasan), selang saluran pernapasan yang biasanya berukuran 100 meter, *marphis* (masker gas), kaca mata pelindung, dan timah pemberat.

f. Rumpon

Rumpon dimanfaatkan saat tertentu jika diketahui bahwa banyak ikan yang berkumpul di suatu tempat. Untuk menjangkau rumpon tersebut digunakan *lepa-lepa* (sampan) atau *katinting* (kapal bermesin). Biasanya pemancingan di sekitar rumpon dilakukan anak-anak sambil bermain. Rumpon dapat dilakukan pada struktur tanah relatif miring dan dalam. Untuk pemancingan biasanya dilakukan pada sore hari di mana terik matahari mulai berkurang.

Beragam alat tangkap tersebut di atas, oleh komunitas nelayan di Desa Sulaho dianggap ramah lingkungan, yang tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut. Di samping itu, jenis

ikan yang diperoleh disesuaikan dengan jenis alat tangkap yang digunakan.

D. PENUTUP

Konsep *sama* dan *bagai* pada masyarakat Bajo yang digunakan untuk membedakan orang Bajo dengan bukan Bajo telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut telah melalui proses yang panjang, dimulai dengan mitos Sawerigading yang berkaitan dengan asal usul orang Bajo. Mitos tersebut meneguhkan keyakinannya bahwa keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan orang Bugis berdasarkan ikatan geneologisnya.

Pada perkembangannya selanjutnya, interaksi dengan orang *bagai* tidak dapat dihindari. Untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, orang Bajo harus menjalin kerjasama dengan orang *bagai*. Oleh sebab itu, prinsip budaya *olai lesse'e* yakni berusaha menghindar dari orang *bagai* mulai berubah. Perubahan itu diakibatkan oleh adanya interaksi sosial yang telah berlangsung antara orang Bajo dan orang Bugis. Pada saat itu masing-masing unsur kebudayaan dikomunikasikan dan berusaha melakukan interpretasi terhadap apa yang ia terima.

Perubahan pola pemukiman dari laut (*bido'*) ke darat, menyebabkan orang Bajo mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena secara ekologis, terdapat perbedaan kondisi kehidupan di darat dengan kehidupan di laut. Kehidupan di darat memberikan pemaknaan baru dengan munculnya konsep '*pidi tikkolo'na lamong 'nggai makale le goya*' yang berarti kehidupannya tidak dapat dipisahkan dengan gemuruh ombak. Hal ini pula berarti bahwa mereka dapat hidup di darat sepanjang gemuruh ombak masih terdengar. Bagi masyarakat Bajo, konsep ini merupakan usaha untuk menjustifikasi kehidupan laut dan darat melalui suatu perspektif adaptasi dengan menempatkan perubahan budaya sebagai bagian dari usahanya untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Karena itu tingkat adaptasinya dengan kehidupan di darat juga semakin baik. Penggunaan teknologi produksi pada periode ini mulai digunakan, sehingga ketergantungannya dengan orang *bagai* juga semakin tinggi.

Berdasarkan interaksi yang intensif dengan orang Bugis dalam beberapa periode yang telah dilaluinya, berbagai unsur kebudayaan

Bugis telah terserap dalam kebudayaannya (akulturasi), untuk menyesuaikan dengan perkembangan objektif di dalam kehidupan sosialnya. Perubahan tersebut antara lain bahasa, sistem kekerabatan, agama dan sistem kekerabatan, kepemimpinan dan organisasi sosial, serta sistem pengetahuan dan teknologi.

Suatu perubahan yang memungkinkan seseorang memodifikasi pola tingkah lakunya, sebagai suatu proses adaptasi terhadap kondisi kehidupan yang baru. Siklus perubahan tersebut dimulai dari perubahan pola pemukiman yang sebelumnya berkelana di laut dengan perahu *bido* (nomaden), hingga pola pemukiman menetap di darat. Perubahan pola pemukiman masyarakat Bajo dari laut (*sama*) ke darat (*bagai*) adalah inti dari perubahan kehidupan sosial budaya orang Bajo. Makna *sama* yang terkait dengan kehidupan laut dan *bagai* yang terkait dengan kehidupan di darat, “di tata ulang” untuk mendekatkan jarak mereka dengan kelompok *bagai* (Bugis) yang selama ini telah berinteraksi secara intensif. Dalam interaksinya, orang Bajo dan orang Bugis memiliki kepentingan yang sama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut sehingga senantiasa mempertahankan kearifan lokal. *****

Daftar Pustaka

- Alena, 1975. “Orang Bajo, Manusia Laut di Indonesia”, *Kompas*, 15 Agustus.
- Brown, C.S.G., 1993. *Bajau*. Jakarta: Yayasan Sejati.
- Harris, Z., 1991. “Bajo, Suku yang Tinggal Terapung di Perairan Timur Kendari”. *Sinar Harapan*, 18 Pebruari 1991.
- Suyuti, Nasruddin, 1996. *Kehidupan Sosial Budaya Komunitas Nelayan di Boenaga, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Hasil Penelitian)*. Kerjasama FISIP Unhalu dengan Kanwil Depsos Sulawesi Tenggara.
- Suyuti, Nasruddin, 2004. *Bajo dan Bukan Bajo, Studi Tentang Perubahan Makna Sama dan Bagai Pada Masyarakat Bajo di Desa Sulaho Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara (Disertasi)*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

- Suyuti, Nasruddin, 2011. *Orang Bajo di Tengah Perubahan*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Sopher, David E., 1971. *The Sea Nomads: A Study of Maritim Boat People of Southeast Asia*. Singapore, The National Museum.
- Suparlan, Parsudi, 1986. “Masyarakat: Struktur Sosial”, dalam *Individu, Keluarga, dan Masyarakat*. (Editor: A.W. Wijaya). Jakarta: Akademika Pressindo.
- Zacot, Francois, 1979. “Bajo atau Bukan Bajo: Itu Soalnya”, *Prisma*, No.2 Pebruari 1979.



Perahu Lepa-Lepa, Katingting, Joloro' dan Jarangka' di Wakatobi (Surya Yuga)



NOTULA SESI PERTAMA

JAGAD BAHARI NUSANTARA

Pendasaran Kearifan Lokal Bagi Dinamika Pranata Sosial Dalam Meniti Semangat Zaman

Pemakalah:

Prof. Dr. Darmawan Salman, MS

Moderator:

Dra. Dade Pratuntari, M.Si.

Notulis:

Drs. Faisal, M.Si.

A. Paparan

Dalam pemaparan makalah ini, terbagi atas beberapa jagad. Pertama, jagad tentang negara kepulauan, benua maritim, dan bangsa pelaut yang menjadi label bagi bangsa Indonesia. Karena Indonesia terdiri atas ribuan pulau, baik besar maupun kecil yang satu sama lain dihubungkan dengan laut. Indonesia sebagai benua maritim, bangunan dasarnya adalah air. Kemudian, air tersebut di isi pulau-pulau, maka lahirlah Nusantara. Dengan cara berpikir "darat", maka Indonesia dapat diartikan sebagai pulau-pulau yang dihubungkan oleh air. Akan

tetapi, dengan cara berpikir "laut", maka Indonesia adalah air yang diisi oleh pulau-pulau. Sebagai bangsa pelaut, leluhur kita sering melantunkan lagu yang mengisahkan tentang bangsa kita sebagai pelaut. Selain itu, banyak dongeng yang mengisahkan tentang tokoh yang berhubungan dengan pelaut. Banyak pula buku sejarah yang memaparkan tentang peradaban bahari Indonesia masa lalu. Hal tersebut menggambarkan bahwa leluhur bangsa kita menumbuhkan peradabannya di atas pondasi budaya pesisir dan bahari. Muncul pertanyaan, mengapa sekarang Indonesia bukan lagi bangsa pelaut, tidak lagi mengembangkan peradaban berdasarkan budaya bahari?

Jagad kedua adalah kondisi di mana bangsa kita telah terjebak kepinggiran budaya bahari karena arus budaya tani dalam pembangunan. Setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan yang berorientasi pada budaya tani. Pada masa penjajahan, perubahan yang terjadi berlangsung secara alamiah atau tidak terencana. Setelah kemerdekaan terjadi proses pembangunan yang terencana, sehingga disebut era pembangunan. Prioritas utama dalam pembangunan tersebut adalah terciptanya swasembada pangan, sehingga dikenal revolusi hijau. Dalam hal ini yang ditonjolkan adalah jagad tani sebagai peradaban darat.



Perahu-perahu Bersandar di Dermaga Desa, Wakatobi (Surya Yuga)

Jagad ketiga adalah tentang keteringgalan bahari karena kegagalan transisi sosio-kultural. Secara sosio-kultural atau dapat dikatakan secara etos pada aktor bahari itu sendiri memang kemudian tidak bisa melampaui tuntutan perubahan pada fasenya sendiri. Misalnya, sebelum tahun 1980-an, perahu pinisi dapat dijumpai di berbagai pelabuhan di nusantara. Akan tetapi setelah tahun 1990-an, perahu yang mengandalkan layar tersebut tidak dijumpai lagi. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan navigasi modern.

Jagad keempat tentang bagaimana mendorong sintesa pengetahuan untuk pranata sesuai spirit zaman. Misalnya, bagaimanapun perkembangan pembuatan perahu, penangkapan ikan, dan sebagainya perlu melibatkan dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah.

B. Diskusi

Tanggapan/pertanyaan:

1. Surya Yuga (Kemenbudpar):

Kepada Darmawan, legenda ataupun sejarah masa lalu tentang Maling Kundang di Sumatera Barat, Sawerigading di Sulawesi Selatan, maupun Putri Junjung Buih di Kalimantan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa bahari. Bahkan perpaduan antara budaya bahari dan budaya tani di Kerayan, Kalimantan Timur dapat kita ketahui yaitu masyarakatnya membawa bibit padi dengan menggunakan perahu. Padahal daerah Kerayan tersebut terletak 800 meter dari permukaan laut. Untuk di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, dalam makalah dipaparkan tentang masyarakat Lamalera yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangkap ikan hiu. Sebenarnya yang mereka tangkap bukan ikan hiu, tetapi ikan paus.

2. Eymal B. Demmallino (dosen Universitas Hasanuddin):

Sulawesi utamanya Sulawesi Selatan terkenal dengan berasnya. Pada masa penjajahan, beras tidak hanya untuk konsumsi warga masyarakat setempat, tetapi juga diperdagangkan. Pada masa itu, perdagangan melalui jalur laut

berkembang, sehingga budaya tani (agraris) juga berkembang dengan pesat. Pertanyaannya, kenapa budaya bahari jika dikembangkan budaya tani juga turut berkembang. Sedangkan pada zaman orde baru budaya tani dikembangkan tetapi budaya bahari tidak turut berkembang?

3. Simon Petrus (dosen UKI Paulus)

Orang Bajo sangat alergi terhadap sistem pengetahuan dan teknologi modern. Sebaliknya sangat patuh terhadap tradisi leluhur, terutama berkaitan dengan pantangan-pantangan yang menjadi tradisi masyarakat tersebut. Suku Bajo di Toraja disebut *Tau Bajo* yang artinya “sebentar menghilang dan sebentar kemudian muncul”, atau *Bayo-Bayo* yang berarti bayang-bayang. Apakah *Wajo* sama dengan *Bajo*? Menurut saya suku Bajo adalah suku Wajo yang sekarang. Pertanyaan yang dapat diangkat pula adalah nilai-nilai apakah yang bisa kita ambil dari keberadaan orang Bajo?

Jawaban pemakalah

1. Terima kasih atas koreksi tentang kegiatan masyarakat Lamalera menangkap ikan paus, bukan ikan hiu.
2. Seandainya Orde Baru mengembangkan budaya tani lalu mengembangkan juga bisnis dan pasar bebas tentu akan berbicara lain. Peningkatan produksi beras dan komoditi lainnya (sebagai budaya tani) akan menjadi komodi ekspor yang dapat mengembangkan budaya bahari.
3. Kita semua dapat berkontribusi dalam kegiatan mengembangkan revitalisasi nilai-nilai budaya yang ada pada orang Bajo tersebut. Saya pribadi menganggap bahwa hal itu merupakan satu poin yang penting. Tindak lanjutnya, bagaimana nilai-nilai interkoneksi bisa kita temukan pada persebaran orang Bajo lalu kita bawa ke ranah budaya bahari. Memang, kita harus berpikir komprehensif untuk melihat realitas. Tatarannya bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi dalam konteks ini bagaimana mengawinkan pengetahuan atau kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan atau kearifan modern yang masing-masing memiliki kebenaran dan fungsional dalam masyarakat.

POLITIK IDENTITAS ORANG BAJO

Pemakalah:

Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.

Moderator:

Dra. Dade Pratuntari, M.Si.

Notulis:

Drs. Faisal, M.Si.

A. Paparan

Bajo merupakan suatu konsep yang diberikan oleh suku bangsa lain. Orang Bajo sendiri menyebut dirinya sebagai '*sama*', sedangkan orang lain (bukan Bajo) disebutnya sebagai '*bagai*'. Pengertian *sama* mengandung makna kesamaan bahasa, tradisi, kebiasaan, dan hidup di atas laut. Sedangkan pengertian *bagai* mengandung makna berbagai-bagai sukubangsa yang mendiami daratan. Orang Bajo biasanya susah untuk menyatakan dirinya sebagai orang Bajo kepada orang lain. Akan tetapi setelah lawan berinteraksinya menyatakan hal-hal positif tentang orang Bajo, maka barulah mengemukakan hal yang sebenarnya tentang orang Bajo.

Secara historis, orang Bajo mendapat stereotipe sebagai perompak atau bajak laut. Selain itu, stereotipe bagi orang Bajo sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap destruktif, seperti bom dan bius. Oleh karena itu, orang Bajo sering dijadikan *biang kerok* kerusakan ekosistem laut. Kendati demikian, orang Bajo berusaha untuk melakukan resistensi sebagai respon untuk mengubah stereotipe yang selama ini melekat pada dirinya.

Interaksi sosial orang Bajo dengan masyarakat di sekitarnya sangat intens. Orang Bajo dikenal mudah beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, dan akan selalu berusaha menuturkan bahasa setempat. Oleh karena itu, orang Bajo sangat fasih berbahasa Bugis, Buton, Kaledupa dan sebagainya. Dalam jaringan perdagangan, orang Bajo mengembangkan hubungan ekonomi dengan orang-orang yang berada di sekitar tempat mereka menetap.

Menyadari ketertinggalan dan termarginalisasi dibanding etnik lain, orang Bajo menyusun gerakan-gerakan untuk pembentukan kesadaran identitas. Gerakan yang dilakukan, misalnya membentuk Persekutuan Orang Bajo yang diakui oleh PBB dan persekutuan tersebut mewadahi seluruh komunitas orang Bajo di dunia. Mereka juga mengangkat presiden sebagai pemimpinnya. Dalam kegiatan politik, orang Bajo senantiasa melakukan negosiasi kepada calon kontestan demi kepentingan kelompoknya.

B. Diskusi

Tanggapan/pertanyaan

1. Surya Yuga:

Perhatian kita terhadap budaya bahari lebih banyak ke orang Bajo, karena kita sama-sama mengetahui dan melihat bahwa hak-hak sipil orang Bajo diabaikan. Lokakarya ini diharapkan menghasilkan informasi potensi budaya bahari sebagai bahan masukan di bidang kebudayaan dan pariwisata, serta sebagai informasi potensi dan kondisi masyarakat pantai dalam penyusunan kebijakan bagi instansi terkait lainnya.

2. Raodah (staf peneliti BPSNT Makassar)

Orang Bajo sebenarnya tidak mengucilkan diri dari masyarakat sekitarnya. Karena sebenarnya orang Bajo telah menjalin hubungan sosial bahkan kawin-mawin dengan penduduk sekitar (terutama orang Bugis), serta melakukan kegiatan ekonomi menjalin kerjasama dengan orang Bugis. Pemilik modal yang biasa disebut *pongawa* berasal dari orang Bugis, sedangkan *sawi* (anak buah) berasal dari orang Bajo. Demikian pula dari segi pemerintahan, bilamana lurah atau kepala desa berasal dari orang Bajo sendiri, maka mereka akan mendukung sepenuhnya. Bagaimana dengan orang Bajo di Sulawesi Tenggara?

3. Eymal B. Demmallino (dosen Universitas Hasanuddin)

Saat ini kita tidak bisa mengenali orang Bajo; atau identitas orang Bajo sekarang ini seperti sudah hilang karena sudah beradaptasi dengan penduduk di mana mereka berada. Apakah masih ada identitas orang Bajo yang masih bertahan hingga

sekarang?

4. Simon Petrus (dosen UKI Paulus Makassar)

Apakah Bajo itu sama dengan *Wajo*? Karena beberapa kosa kata di Sengkan (Kabupaten Wajo) huruf "w" berubah menjadi "b", misalnya kata "*watang*" menjadi "*batang*", "*watu*" menjadi "*batu*", "*waju*" menjadi "*baju*" dan sebagainya.

Jawaban Pemakalah

1. Sebenarnya orang Bajo memiliki sifat apatis. Mereka tidak mau berurusan dengan pemerintah. Banyak di antara mereka tidak memiliki kartu keluarga dan KTP. Setelah otonomi daerah, orang Bajo sudah mulai memasang strategi untuk kepentingan jati diri dan masyarakatnya. Di Wakatobi, populasi orang Bajo berkisar 12.000 orang dari total penduduk sebanyak 25.000 orang. Hal ini merupakan kekuatan besar dalam pemilukada. Kita semua sangat setuju agar pemerintah secara serius memikirkan dan memperhatikan hak-hak sipil orang Bajo untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sebenarnya orang Bajo dapat mengidentifikasi dirinya sebagai orang Bugis atau orang Bajo itu sendiri. Ia memiliki strategi adaptif yang cukup tinggi, bisa berbahasa daerah sesuai dengan bahasa yang digunakan masyarakat setempat. Mereka lancar dan fasih berbahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Kaledupa dan sebagainya. Ada waktu-waktu tertentu orang Bajo mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Bajo dan pada saat yang lain mampu mengidentifikasi dirinya sebagai orang Bugis. Hal itu disesuaikan dengan kepentingan yang menguntungkan dirinya. Tentang perilaku melakukan pemboman ikan, orang Bajo di Wakatobi juga menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Orang Bajo memiliki hubungan kerja dengan pedagang-pedagang dari luar, terutama orang Bugis. Orang Bugis mempercayai orang Bajo, sehingga berani memberi modal, perahu, alat tangkap, alat penyelam kepada orang Bajo. Persyaratannya sangat mudah, orang Bajo hanya menyetorkan hasil tangkapan ikannya. Dengan kemudahan itu, orang Bajo meningkatkan konsumsi mereka bukan hanya pada kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder, seperti *handphone*, televisi dan sebagainya. Untuk mengejar setoran, orang Bajo

melakukan apa saja untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan termasuk dengan cara pengeboman.

3. Identitas orang Bajo dapat dilihat dari bahasanya, yaitu bahasa “*sama*”. Kosa kata bahasa Bajo banyak mengadopsi bahasa Bugis. Hal ini disebabkan karena orang Bajo banyak berinteraksi dengan orang Bugis, baik di daerah pesisir maupun di pulau-pulau. Orang Bugis datang memberi pinjaman modal dan teknologi alat penangkapan ikan serta berperan sebagai *pongawa* (pemimpin sekaligus pemilik modal dalam kegiatan ekonomi), sementara orang Bajo sebagai *sawi* (anak buah). Pola-pola interaksi yang terjadi, orang Bugis sebagai pemilik modal, pemilik perahu, pemilik alat tangkap. Orang Bajo sebagai *sawi* yang hanya mengandalkan tenaga, kemudian menyerahkan ikan-ikan hasil tangkapannya kepada *pongawa*.
4. Kata Bajo mungkin berasal dari kata *Wajo*. Di Buton, terdapat pasar yang disebut pasar Wajo. Di pasar itu merupakan tempat interaksi antara orang Buton dengan orang Wajo (bukan orang Wajo yang ada di Sengkan, Sulawesi Selatan). Orang Wajo yang dimaksud di Buton tersebut adalah orang Bajo.

INTERAKSI ORANG BAJO DAN ORANG BUGIS

Dalam Konteks Kearifan Lokal - Global Di Desa Sulaho, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Pemakalah:

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si.

Moderator:

Dra. Dade Pratuntari, M.Si.

Notulis:

Drs. Faisal, M.Si.

A. Paparan

Pada awalnya, orang Bajo lahir, hidup dan mati di atas perahu yang disebut *bido*. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan mengembara dari suatu pesisir ke pesisir lain, atau dari suatu pulau ke pulau yang lain. Oleh karena kehidupan mereka sama, pola budaya sama walaupun berlainan tempat tinggal, maka mereka menyebut

dirinya sebagai *orang same* atau *sama*. Sedangkan orang lain yang hidup di darat di sebut *orang bagai* karena kehidupan mereka beraneka macam. Komunitas Bajo di Desa Sulaho, walaupun mayoritas orang Bajo dan hanya sedikit orang Bugis, tetapi di dalam interaksi sosial mereka ternyata orang Bajo menyesuaikan diri dengan orang Bugis yang minoritas. Hampir seluruh penduduk setiap hari menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa pengantar. Banyak anak-anak mereka tidak tahu lagi bahasanya sendiri. Sehingga muncul kekhawatiran bahwa suatu kelak bahasa Bajo termasuk unsur-unsur budaya mereka akan hilang dan punah tergantikan oleh budaya Bugis.

Dalam berbagai hal termasuk pembuatan perahu, keterampilan pembuatan perahu dikuasai oleh orang Bugis yang dikenal dengan sebutan *panrita lopi*. Ketergantungan atas pemenuhan kebutuhan perahu lambat laun orang Bajo mengadopsi keterampilan tersebut. Hal ini disebabkan karena orang Bajo selalu melakukan interpretasi terhadap apa yang mereka terima. Selain itu, ketergantungan orang Bajo juga berkaitan dengan berbagai kebutuhan primer yang kebanyakan bersumber di darat, sehingga orang Bajo senantiasa dipandang sebelah mata. Atas dasar itu, orang Bajo juga senantiasa berkeinginan untuk "menjadi" orang Bugis yang sukses dalam kegiatan ekonomi.

B. Diskusi

Tanggapan/pertanyaan

1. Surya Yuga

Kami akan melakukan peninjauan lokasi orang Bajo di Wakatobi, karena kami melihat bahwa pemukiman orang Bajo di darat akan terkesan unik dan menarik, karena selama ini orang Bajo tinggal di atas air atau di perahu. Apakah ada saran terbaik untuk lokasi yang dapat kami tinjau?

2. Raodah (staf peneliti BPSNT Makassar)

Orang Bajo di Bone rata-rata menggunakan alat tangkap destruktif, seperti bom dan bius. Menurut mereka penggunaan bom tidak merusak ekosistem laut terutama terumbu karang. Oleh karena itu perlu ada perhatian pemerintah untuk meningkatkan SDM orang Bajo agar mereka tidak hanya menggantungkan harapannya pada mata pencaharian sebagai

nelayan.

3. Suriadi Mappangara (dosen Universitas Hasanuddin)

Bagaimana kita mencari benang merah antara setiap komunitas orang Bajo, karena hampir semua komunitas Bajo memiliki latar budaya yang berbeda-beda? Selain itu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan orang Bajo? Apakah Bajo itu merupakan “bayang-bayang”, ataukah sebagai perompak besar ataukah sebagai manusia perahu?

Jawaban Pemakalah

1. Kalau ingin melakukan pengecekan orang Bajo di Wakatobi sebaiknya jangan di Kecamatan Wangi-wangi, sebab pemukiman orang Bajo di tempat tersebut sudah terpengaruh dengan kehidupan kota. Sehingga, keaslian budaya Bajo tidak dapat diamati lagi. Saya menyarankan peninjauan lokasi sebaiknya dilakukan di Kecamatan Kaledupa atau Binongko.
2. Penggunaan bom bagi orang Bajo bukan hanya di Bone tetapi hampir menyentuh semua komunitas Bajo di Sulawesi Tenggara terutama yang berdiam di sekitar kota. Pada umumnya, orang Bajo yang melakukan kegiatan pemboman pada saat menangkap ikan, biasanya memiliki interaksi yang sangat luas dengan nelayan dari luar komunitasnya, dan bertempat tinggal di pemukiman yang tidak terisolir.
3. Orang Bajo sebenarnya memiliki keterampilan dalam mengelola sumberdaya laut, seperti menangkap ikan, menangkap teripang dan sebagainya. Keterampilan seperti itu hampir dimiliki oleh semua komunitas Bajo di mana pun berada. Akan tetapi suatu hal yang mungkin membedakan antara suatu komunitas Bajo di Desa Sulaho dengan komunitas Bajo yang lain adalah mengikisnya penuturan penggunaan bahasa Bajo. Di desa Sulaho sudah banyak orang Bajo yang tidak tahu menuturkan bahasanya sendiri. Bahasa Bajo hanya digunakan oleh orang-orang tua untuk membicarakan mengenai sistem kekerabatan. Ada kekhawatiran bahwa identitas (bahasa) orang Bajo akan hilang. *****



Jembatan Antardesa di Wakatobi (Surya Yuga)

DINAMIKA KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI ORANG BAJO

Munsi Lampe

Universitas Hasanuddin, Makassar

Abstrak

Studi tentang fenomena kehidupan orang Bajo dengan topik “Dinamika Kelembagaan Sosial Ekonomi Orang Bajo” diangkat dalam tulisan ini lantaran kajian yang ada selama ini pada umumnya terarahkan pada karakteristik tradisional yang statis, kehidupan di perahu, dunia air dan kearifan lingkungan, pengembaraan pelayaran tanpa desa pemukiman permanen, keterbelakangan dan keterisolasian, termarginalisasi tanpa atau kurang pemihakan kebijakan politik, menjadi korban dari kelas-kelas pengusaha nelayan dari etnis lain, dan sebagainya.

Dari beberapa literatur, hasil penelitian, dan pengamatan langsung membuktikan bahwa justru beberapa komunitas atau keluarga orang Bajo menunjukkan suatu fenomena dinamika sosial budaya yang mencolok dalam beberapa unsur, terutama pola pemukiman, kelembagaan sosial ekonomi, sistem pertukaran/pasar, teknologi kebaharian, budidaya laut dan pelestarian ekosistem laut, sampai pada unsur-unsur bahasa, kesenian, religi, dan lain-lain.

Belajar dari proses dinamika kehidupan orang Bajo, khususnya kelembagaan sosial ekonominya, bukan hanya memperkaya koleksi bahan etnografi orang Bajo, tetapi lebih pada manfaat praktis bagi mengarahkan proses dinamika kehidupan yang bijak dan peningkatan martabat masyarakat nelayan miskin, khususnya komunitas nelayan Bajo di Nusantara ini.

Kata kunci: mengarahkan dinamika, kelembagaan sosial ekonomi, berbasis lokal, orang Bajo.

PENGANTAR

Studi-studi tentang kehidupan orang Bajo, khususnya yang di Indonesia, selama ini kebanyakan terfokuskan pada karakteristik tradisional yang statis, kehidupan di perahu, dunia air dan kearifan lingkungan, pola pengembaraan pelayaran tanpa pemukiman permanen, keterbelakangan dan keterisolasian, termarginalisasi tanpa atau kurang pemihakan kebijakan politik, menjadi korban eksploitasi dari kelas-kelas pengusaha nelayan mampu dari etnis lain, dan sebagainya.

Sebetulnya karya dan informasi yang melimpah dan akurat dari studi lapang seperti telah menyumbang kepada pengayaan etnografi dan sejarah Orang Bajo sebagai salah suku laut yang tertinggi kadar kemaritimannya. Meskipun demikian ada aspek yang kurang atau tidak tersentuh lantaran hasrat dan perbincangan tentang mereka larut dalam kenikmatan tradisinya. Aspek dimaksudkan ialah fenomena dinamika kehidupan (sosial budaya) pada beberapa unsur yang di sana-sini diperistiwakan oleh komunitas atau keluarga-keluarga Bajo hingga batas-batas tertentu.

Pola pemukiman menetap dengan rumah panggung, meskipun penuh dengan kebersahajaan merupakan loncatan drastis dari pola nomaden dan menjadikan perahu *vinta* dan *bido'* sebagai rumah dan desanya. Adopsi dan keterlibatan dalam kelompok *Ponggawa-Sawi* model Bugis-Makassar dengan organisasi produktif dan rapi adalah langkah menanjak dari kesatuan keluarga inti sebagai unit-unit produksi. Spesifikasi tangkapan (teripang, sirip hiu, kerang, lobster, ikan kerapu) sebagai komoditas pasar yang mahal dengan spesifikasi sarana tangkap yang melibatkannya dalam jaringan pasar ekspor



Desa Nelayan Suku Bajo dan Bugis di Wakatobi (Surya Yuga)

merupakan puncak dari proses evolusi budaya mencolok dari produksi subsisten. Praktik budidaya laut (teripang, kerang mutiara, lobster, kerapu, rumput laut) merupakan suatu loncatan evolusi dari berburu ikan liar dan meramu biota tidak liar di laut. Menanam bakau dengan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan perlindungan lahan pemukiman dan area tambak hingga fungsi ekonomi produktif merupakan buah pikiran jenius dan sangat unik mengingat kebanyakan orang Bajo suka membabat semak-semak di pulau-pulau atau tepi pantai karena takut setan atau hantu darat yang dipercaya bersemayam di situ.

Fenomena dinamika kehidupan budaya orang Bajo seperti disebutkan banyak menyamai kalau bukan melebihi yang diperistiwakan kebanyakan komunitas petani, apalagi pemburu di darat. Itulah sebabnya dengan semua pencapaian atau prestasi seperti ini orang Bajo semestinya diberi apresiasi tinggi dan dipihaki dalam proses pengembangannya lebih lanjut tidak berbeda dengan kelompok-kelompok etnis sebangsa setanah air lainnya yang hidup di darat.

Tulisan menyajikan konsep dinamika sosial budaya dalam perspektif antropologi, dinamika sosial budaya Bajo dalam catatan

sejarah dan antropologi, dinamika kelembagaan sosial ekonomi komunitas nelayan Bajo di Pulau Sembilan dan Kawasan Takabonerate (Sulawesi Selatan), dan mengarahkan dinamika kelembagaan sosial ekonomi sebagai penutup.

Material dari penulisan ini diambil secara selektif dari berbagai laporan penelitian lapangan yang saya dan kawan-kawan (Lampe dkk.) lakukan pada desa nelayan pulau-pulau dalam Kabupaten Pangkep dan Kodya Makassar, desa-desa nelayan Pulau Sembilan dan Tongke-Tongke (Sinjai) dan Kawasan Takabonerate (Selayar) Sulawesi Selatan dari paruh kedua periode 1990-an hingga tahun periode 2004, Kelurahan Dupa-Dupa Ternate (Maluku Utara) pada tahun 2005, dan *Gemeente Urk Provinsi Overijssel (Nederlands)* pada tahun 1986.

DINAMIKA SOSIAL BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI

Pada hakekatnya masyarakat dan kebudayaan (pengetahuan, bahasa, organisasi sosial, ekonomi, teknologi, religi, kesenian) di mana dan kapanpun, lambat atau cepat pasti mengalami dinamika atau perubahan, meskipun ada saja unsur-unsur tertentu bertahan karena masih efektif dan efisien dalam pemungisian bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat manusia pendukungnya. Demikianlah masyarakat nelayan, termasuk orang Bajo, yang dalam kondisi sesederhana bagaimanapun cepat atau lambat pasti mengalami proses dinamika, baik secara terencana maupun kurang terencana.

Dari perspektif antropologi, terdapat dua alur proses dinamika sosial budaya, yakni alur proses evolusi dan alur proses difusi (Keesing, 1981; Barnard, 2000). Dari perspektif evolusionis, diasumsikan bahwa setiap masyarakat dengan individu-individu yang potensial mengembangkan mental kreativitas dan inovatifnya dalam wujud ide, tindakan/perilaku, dan teknologi. Bilamana ide, tindakan, atau teknologi yang diperkenalkan oleh individu-individu terbukti bermanfaat dalam pemungisian pemenuhan kebutuhan hidup, maka ini selanjutnya dipolakan atau ditradisikan dan dikembangkan lagi, bahkan didifusikan ke atau ditiru oleh kelompok-kelompok masyarakat di tempat-tempat lain yang menyukainya. Orang Bajo yang dikenal sebagai salah satu suku laut yang terkenal di Asia Tenggara (Dick-Read, 2009), bahkan salah satu cikal bakal masyarakat bahari

Nusantara di samping Bugis, Makassar, Mandar, Buton, dan Madura (Horridge, 1978, 1980) tentu juga merupakan hasil dari perkembangan evolusionis sosial budaya sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Dalam rangka mengembangkan masyarakat bahari, khususnya masyarakat nelayan Bajo, karena itu, perlu penggalian potensi sosial budaya terutama yang mengandung kearifan lokal dalam wujud pengetahuan, jiwa kreatif dan inovatif, kelembagaan sosial ekonomi, teknologi, dan praktik pemanfaatan sumberdaya laut.

Dari perspektif difusionis diasumsikan bahwa fenomena dinamika sosial budaya suatu masyarakat bersumber dari tempat-tempat lainnya. Jarang sekali adanya unsur-unsur budaya baru yang tidak memiliki sejarah atau cerita asal usulnya dari tempat-tempat lainnya. Sumber



Kedatangan Wisatawan dengan Kapal Bermotor Ke Wakatobi (Surya Yuga)

perubahan dan kemajuan yang berarti, karena itu, banyak berasal dari luar. Bagi orang Bajo yang dikenal sebagai pengembara di laut (*sea nomaden/sea gypsi*) pengetahuan dan kepandaian membuat perahu dan melayarkannya sesungguhnya diwarisi dari ras Melayu-Polinesian Asia Tenggara ribuan tahun silam (Horridge, 1978, 1980). Suatu pengembangan terencana dan terarah bagi kebanyakan masyarakat nelayan Bajo yang dalam kondisi statis dan miskin, karena itu, semestinya banyak diusahakan dengan belajar kepada masyarakat nelayan berkembang dan sejahtera di tempat-tempat lainnya, tanpa mengikis tradisi yang ariflingkungan dan sosial.

ORANG BAJO DALAM CATATAN SEJARAH DAN ANTROPOLOGI

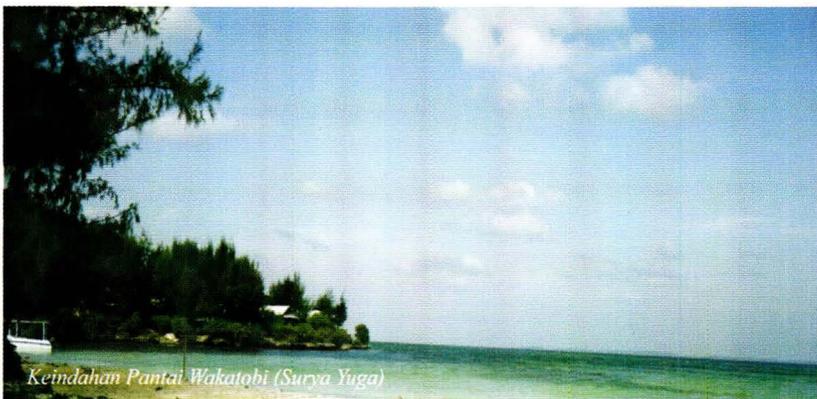
Orang Bajo, Bajau, Baju, Waju atau Bajoo merupakan salah satu kelompok suku pelaut nomaden yang terkenal dan tersebar di segala penjuru Indonesia, dari ujung Barat kepulauan Sumatera hingga Papua dan dari Selatan Pulau Timor hingga ujung Utara Nusantara. Beberapa penamaan yang mirip yang digunakan di berbagai tempat menunjukkan persebarannya di seluruh Nusantara (Dick-Read, 2009). Asal usul orang Bajo yang misterius menurut A.B. Lopian (1996; 2009) memungkinkan sekali dari Zulu (Filipina), Johor (Malaysia), dan daerah Sabah, Kalimantan Utara (Malaysia). Lain halnya beberapa sejarawan Eropa, termasuk Dick-Read, yang menghubungkan orang Bajo dengan bangsa pelaut lain seperti Bugis, Makassar, dan Mandar di kawasan timur Nusantara. Orang Bajo disebut-sebut berasal dari Sulawesi yang merupakan wilayah yang sama dengan Orang Bugis atau Tau-Wugi, dan memiliki kekerabatan yang dekat dengan orang Wugi tersebut. Di Sulawesi Selatan, menurut tradisi lisan, terdapat empat versi asal usul Bajo, yakni versi *Jampea*, versi *Kayuadi*, versi *Appa'tana*, dan versi tulisan *Iontara Ara*. Ketiga tempat pertama munculnya versi berada dalam wilayah Kabupaten Selayar, sedang versi keempat di Ara, Kabupaten Bulukumba. Pada intinya, keempat versi tersebut menghubungkan orang Bajo dengan mitologi *Sawerigading* dari Tana Luwu (Liebner dalam Robinson dan Mukhlis Paeni, 2005: 173-211).

Orang Bajo yang lebih kaya, menurut Dick-Read, tinggal di kapal yang disebut *vinta*, sejenis kapal cadik yang memiliki tiga atau empat penyangga. “Tak ada angin tak ada ombak”, kata orang Bajo, “kapal itu tetap bergoyang”. Di kawasan timur Nusantara, kebanyakan keluarga Bajo hidup di atas perahu yang disebut *bido*. Tidur, memasak, dan melahirkan keturunan mereka lakukan di atas perahu. Karena perahu merupakan tempat tinggal, maka setiap keluarga inti/keluarga batih memiliki sebuah perahu (Lopian, 2009).

Menurut Nimmo (dalam A.B. Lopian, 2009: 91-94), susunan masyarakat Bajo Asli yang masih tinggal di perahu dapat dibedakan dalam tiga tingkat, (1) *mataan*, (2) *pagmundah*, dan (3) *dakampungang*. *Mataan* adalah unit paling kecil yang terdiri dari unit-unit keluarga inti. Beberapa *mataan* membentuk sebuah *pagmundah*, dan beberapa buah

pagmundang membentuk sebuah *dakampungan*. Kesatuan kelompok kekerabatan *pagmundang* dipimpin oleh seseorang yang potensial di antara mereka yang dikenal *nakura*. Adapun *dakampungan* dipimpin oleh *panglima*. Susunan masyarakat Bajo yang asli tersebut terepresentasikan dalam kesatuan-kesatuan perahu sebagai kelompok-kelompok pemukiman terapung dan dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya, kemudian kembali lagi ke tempat-tempat semula. Di Bajoe Bone, yang merupakan kampung Bajo tertua, stratifikasi sosial masyarakat Bajo pada intinya ada empat, yaitu *Lolo Same* (bangsawan tertinggi), *Ponggawa Same* (bangsawan campuran), *gallarang* (golongan masyarakat biasa), dan *Ate* (golongan sosial paling rendah) (Saleh, 2004). Di masa lalu, kedua golongan pertama menjadi pemimpin dan tidak terlibat dalam kegiatan melaut. Ketika sistem negara kerajaan berhenti maka mulailah mereka ikut ke laut dan mengembara bersama dengan kedua lapisan di bawahnya. Dari struktur sosial orang Bajo di Sulawesi Selatan tersebut menunjukkan kedekatan hubungan antara orang Bajo dan Bugis-Makassar. Bahkan sangat diduga merupakan hasil proses akulturasi atau adopsi dari stratifikasi sosial kedua etnis besar tersebut.

Orang Bajo adalah orang-orang yang menyukai kedamaian, sering berkelana tanpa membawa senjata, dan sering diganggu oleh bajak laut. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membela diri secara terorganisasi, dan faktor itulah yang membuat mereka tersebar hingga ke wilayah yang luas. Menurut para peneliti, bahwa bangsa Bajo memiliki kecenderungan untuk tetap berkelompok, dan menyingkir mencari tempat tinggal lain jika diganggu.



Mengakar dalam pandangan orang Bajo bahwa tidak akan bahagia apabila hidup di darat, yang harus menunggu waktu panen relatif lama. Lain halnya di laut, mereka dapat segera memperoleh kebutuhan pangan tiap hari dari hasil tangkapan ikan. Mereka beranggapan, adalah lebih penting memberikan pelajaran menangkap ikan kepada anak-anak mereka daripada menyekolahkan mereka. Itulah sebabnya banyak anak-anak orang Bajo yang tidak atau putus sekolah sebab mereka diharuskan oleh orangtuanya kembali segera menangkap ikan di laut lalu menjualnya demi pemenuhan kebutuhan hidup sanak keluarganya (Pramono, 2005).

Di bagian Timur Nusantara, orang Bajo pengembara di laut hidup bersimbiotik dengan kerajaan di darat Sulawesi Selatan, terutama kerajaan Gowa dan Tallo Makassar dan dengan Kerajaan Bone Bugis (Curtin, 1984: 158-166). Di abad ke-16 dan 17, orang Bugis dan Makassar telah mencapai puncak perkembangannya yang cukup pesat dalam dunia pelayaran dan perdagangan dengan mengikutsertakan kebanyakan orang Bajo. Adapun orang Bajo selebihnya telah jatuh dalam kondisi kemiskinan dan hidup di pinggiran wilayah kerajaan. Jauh sebelumnya, menurut catatan sejarah, orang Bajo dan Bugis-Makassar dan Suku Laut terkenal lainnya seperti Mawken diakui sangat berjasa dalam membantu pertahanan dan perang Kerajaan Sriwijaya melawan musuh-musuhnya.

Meskipun orang Bajo pada umumnya relatif hidup otonom dengan mobilitas pengembaraan yang tinggi dan bermodalkan sistem teknologi kebaharian bersahaja, namun mereka dalam kondisi miskin, menurut penilaian orang luar. Adalah mengejutkan hasil penelitian dari Herald Broch (dalam A.B. Lopian, 1997) yang menginformasikan bahwa komunitas-komunitas Bajo di Bonerate (Sulawesi Selatan) dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara) adalah dinamis dan pandai mengusahakan kekayaan. Demikian halnya orang Bajo di Pulau Wangiwangi Wakatobi (Matsuzawa Yoshihiko dalam Lopian, 1996). Sesungguhnya memang keliru beranggapan bahwa semua orang Bajo adalah statis dan dalam kondisi miskin (ekonomi, teknologi, pengetahuan, kesehatan). Dari beberapa penelitian pada desa-desa pantai dan pulau-pulau Sulawesi Selatan dengan penduduk nelayan mayoritas Bajo, Bugis, dan Makassar menunjukkan adanya sebagian keluarga Bajo dalam kondisi ekonomi berkecukupan setara dengan kebanyakan keluarga Bugis dan Makassar sedesanya. Sebaliknya,



Pemukiman Bugis - Bajo di Wakatobi (Surya Yuga)

keluarga-keluarga Bajo yang mengambil jarak dari pemukiman orang Bugis dan Makassar dan hidup otonom tanpa menjalin kerjasama ekonomi melalui keterlibatan dalam kelompok *Ponggawa-Sawi* pada umumnya dalam kondisi miskin pendapatan, pemukiman kumuh dengan isi rumah/perabot rumah tangga kurang lengkap.

Dari kecenderungan tersebut dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa dalam konteks Sulawesi Selatan, proses dinamika kehidupan orang Bajo banyak disumbang oleh interaksinya dengan dan keterlibatannya dalam sistem kerjasama ekonomi dengan nelayan Bugis dan Makassar. Dalam rangka pengembangan sosial ekonomi dan pelestarian budaya masyarakat Bajo ke depan diperlukan kajian lebih mendalam secara empirik serta holistik.

DINAMIKA KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI KOMUNITAS NELAYAN BAJO DI PULAU SEMBILAN (SINJAI) DAN KAWASAN TAKABONERATE (SELAYAR)

Berdasarkan literatur dan laporan penelitian ilmiah membuktikan bahwa komunitas nelayan Bajo pada umumnya

dalam kondisi statis dan miskin, bahkan pada awalnya mereka menjadikan *bido*' (tipe perahu asli orang Bajo) sebagai rumahnya. Pada kenyataannya, berdasarkan laporan penelitian antropologi yang baru dan perbincangan langsung dengan orang Bajo menunjukkan beberapa komunitas Bajo di Indonesia, terutama yang berasosiasi dengan nelayan Bugis dan Makassar di kawasan Timur Indonesia, adalah dinamis dan cukup progresif dalam sistem ekonomi dan perubahan pola pemukiman. Dari perspektif dinamika budaya, bahwa semua masyarakat di mana dan kapan pun cepat atau lambat pasti mengalami perubahan atau dinamika. Dari hasil penelitian lapangan saya dan



Pola Pemukiman Masyarakat Bajo di Wakatobi (Surya Yuga)

kawan-kawan di Sinjai dan Selayar sejak paruh kedua periode 1990-an hingga tahun 2006, menunjukkan adanya beberapa komunitas nelayan Bajo yang berkembang hingga tingkat-tingkat tertentu, yang ditunjang dengan mental kreatif-inovatif, adaptif terhadap unsur-unsur baru dari luar, bahkan arif lingkungan. Berdasarkan pada berbagai hasil penelitian tersebut, maka tulisan ini menyajikan fenomena dinamika kelembagaan sosial ekonomi komunitas Bajo dengan mengangkat beberapa kelompok etnis Bajo di Desa Samataring dan Kecamatan Pulau Sembilan Sinjai dan beberapa desa pulau kawasan Takabonerate Selayar Sulawesi Selatan sebagai contoh kasus.

a. Menerapkan Pola Perkampungan Menetap: Sebuah Fenomena Umum bagi Komunitas Bajo di Sulawesi Selatan

Pola pemukiman menetap komunitas Bajo di tepi pantai dan pulau-pulau, termasuk yang di Sulawesi Selatan, sebetulnya merupakan sebuah perkembangan mencolok dari pola pemukiman asli di atas perahu tipe-tipe *vinta* dan *bido*, yang berpindah-pindah dengan mobilitas tinggi dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya menurut kehendak penghuninya. Di Sulawesi Selatan, khususnya Desa Bajoe Bone, Pulau Sembilan Sinjai, dan beberapa tempat di Selayar (Appa' Tana, Jampea, Kayuadi, Bonerate, Kawasan Taka Bonerate, dan lain-lain), komunitas-komunitas Bajo pada umumnya telah memiliki kampung atau desa induk permanen. Bahkan sudah ada beberapa keluarga mendapatkan lahan perumahan yang letaknya hingga beberapa ratus meter dari bibir pantai. Karena mampu beradaptasi fisik/alam dan sosial budaya di darat sehingga sebagian di antaranya bisa berkebun kecil-kecilan, beternak (memelihara unggas beberapa ekor), menjual bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam pergaulan mereka harus menguasai bahasa daerah setempat, bahkan lebih jauh lagi kawin-mawin dengan orang etnis setempat, menjadi pegawai negeri. Kasus-kasus dinamika kehidupan seperti ini ditemui di daerah Luwu, Selayar, daerah Kolaka, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka yang sudah jauh berinteraksi dengan masyarakat setempat, menguasai bahasa lokal, dan sudah beranak bercucu mengaku sebagai orang Bugis, Makassar atau Buton. Dalam kepastakaan antropologi, strategi bertahan hidup seperti ini disebut '*ethnic marker*'.

Di Taka Bonerate, memang masih ada beberapa desa Bajo yang melakukan migrasi musiman ke dan tinggal beberapa bulan pada musim timur di beberapa pulau karang (Pulau Tarupa Kecil, Pulau Tinabo, Bungin Belle, dan Pasitallu Barat) yang dimaksudkan untuk mendekati daerah penangkapan ikan (*fishing grounds*) yang diklaimnya secara komunal. Namun dalam musim barat dan pancaroba, mereka kembali lagi ke desa induk untuk mengaktifkan kegiatan sosial yang *profane* atau sakral maupun yang formal menurut anjuran Kepala Kampung.

Meskipun pola pemukiman, bentuk rumah, dan kualitas bahan bangunan diadopsi dari budaya Bugis-Makassar, -demikian halnya yang di daerah-daerah luar Sulawesi Selatan- namun hal ini perlu diapresiasi karena merekalah yang berkeinginan dan merespon untuk

mengadopsinya. Demikian halnya penerimaan unsur-unsur budaya lainnya yang tak kalah pentingnya seperti bahasa, tatacara, agama Islam, seni, teknologi, yang banyak diadopsi dari kelompok-kelompok etnis setempat yang dominan. Tinggal di pemukiman permanen bercampur dengan etnis lain seperti Bugis dan Makassar, secara berangsur-angsur menumbuhkan keinginan dan upaya orang Bajo memperbaiki rumah dan memperkaya daftar kebutuhan, yang pada gilirannya para wanita bisa mengusahakan aktivitas sampingan seperti menjual bahan kebutuhan pokok di kolong rumah, menjual ikan, membuat kue, belajar menjahit, dan sebagainya. Fenomena kemajuan seperti ini ditemukan di hampir semua desa nelayan Sulawesi Selatan yang berpenduduk Bajo bercampur Bugis dan Makassar.

b. Menerapkan Kelompok Kerja *Ponggawa-Sawi*: Sebuah Fenomena Umum bagi Komunitas Bajo di Sulawesi Selatan

Dalam literatur dan perbincangan langsung dengan orang Bajo diketahui bahwa dalam aktivitas ekonomi melaut orang Bajo pada mulanya terkelompokkan dalam unit-unit keluarga inti (keluarga sebagai unit produksi) yang jumlah anggotanya 5 atau 7 orang. Sebetulnya hingga sekarang bentuk kerjasama nelayan Bajo yang asli seperti ini masih banyak ditemukan di kawasan timur Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Untuk melaut dekat pantai, mereka menggunakan sampan dan *jarangka'* (tipe perahu asli Bajo) bilamana daerah operasinya agak jauh dari pantai. Di perairan Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kepulauan Togian (Sulawesi Tengah), menurut beberapa laporan penelitian, masih sering ditemukan kelompok keluarga Bajo tinggal di dalam dan mengoperasikan *bido'* (tipe perahu asli Bajo yang dijadikan sebagai rumah).

Mereka menggunakan beberapa macam teknik tangkap tradisional/sederhana (pancing tunggal, panah, tombak/*ladung*) untuk menangkap berbagai jenis biota laut liar (sumberdaya perikanan) dan biota tidak liar. Wanitanya suka meramu rumput laut (agar-agar dan *sango-sango*), dan akar bahar di kawasan karang yang dangkal airnya (model diversifikasi). Dalam menyelam menangkap biota tidak liar (teripang, kerang, dan lain-lain) hanya menggunakan ketahanan nafas.

Sebuah perkembangan mencolok ketika komunitas Bajo mengubah kelompok kerja yang berpusat pada unit rumah tangga/keluarga ke lembaga atau kelompok kerja *Ponggawa-Sawi* model Bugis-Makassar

dan Mandar. Pada mulanya, penerapan kelompok *Ponggawa-Sawi* dengan struktur asli/elementer (juragan/pemimpin di perahu dan anak buah/*sawi*), kemudian meningkat ke struktur kompleks (*Ponggawa*/pemilik usaha berkerjasama dengan *Sawi*). Perubahan bentuk kelompok diikuti dengan perubahan perahu *jarangka* (tipe perahu Bajo) ke perahu tipe *Jolloro* (tipe perahu Bugis-Makassar) yang diawaki 5 hingga 9 orang, yang digerakkan dengan mesin/motor tempel atau motor dalam (*out-inboard motor*). Demikian halnya beberapa jenis alat tangkap tradisional milik Bajo diganti dengan tipe-tipe alat tangkap baru lebih besar dan berkualitas serta produktif, seperti *bubu* rak kawat, teknik pukat *bagang*, sarana selam modern (tabung dan kompresor). Jaring asli Bajo seperti *lambik* dan *lanra* diperbesar volumenya dan ditingkatkan kualitas bahannya. Perubahan mencolok juga pada pilihan tangkapan dari diversifikasi (menangkap berbagai macam jenis dengan pemilikan berbagai jenis alat tangkap) ke spesifikasi jenis tangkapan (satu atau lebih) dengan pengkhususan alat tangkap andalan.

Bagi orang Bajo, unsur mencolok dalam dinamika kelembagaan *Ponggawa-Sawi* ialah struktur sosial atau pola hubungan antara *Ponggawa* dan *Sawi* yang dicirikan dengan hubungan *patron-client*, yang berbeda dengan struktur sosial rumah tangga/keluarga inti yang otonom dan egalitarian. Demikian halnya dengan diterapkannya sistem aturan bagi hasil, yang sebelumnya hasil langsung masuk dalam kas rumah tangga.

Ada pandangan yang mulai mengakar pada peneliti dan beberapa pihak lainnya, termasuk pemerintah, dan LSM, bahwa menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat nelayan Bugis-Makassar dan terlibat kelompok kerja *ponggawa-sawi* mengkondisikan ketertinggalan dan kemiskinan lapisan bawah, terutama orang Bajo. Ini adalah sebuah pandangan generalisasi, totalitas, dan abstrak yang belum dibuktikan secara empirik. Sebab pada kenyataannya, pada suatu tempat tertentu, waktu tertentu, dan orang (komunitas Bajo dan *ponggawa* Bugis atau Makassar) tertentu, ditemukan pula fenomena kehidupan ekonomi berkecukupan.

Sebagai contoh, di beberapa desa pulau seperti Barranglompo (Kota Makassar), Desa Samataring (Kecamatan Sinjai Timur), beberapa desa dalam Kecamatan Pulau Sembilan seperti Kambuno, Kodingare, Batanglampe, dan Kanalo Satu. Demikian halnya di Kawasan Taka Bonerate (Selayar) seperti desa-desa pulau Rajuni, Latondu, Tarupa,

dan Pasitallu Timur, teramati rumah-rumah orang Bajo yang tidak lebih sederhana daripada rumah-rumah nelayan Bugis dan Makassar. Bahkan di setiap desa pulau tersebut sudah ada orang Bajo berstatus *pongawa* (pemilik usaha/alat-alat produksi) dan telah menunaikan ibadah haji. Demikian halnya di dunia pendidikan, sudah beberapa orang Bajo yang mampu menyekolahkan anaknya hingga meraih gelar Sarjana S.1. Di Batanglampe Pulau Sembilan, Bapak Ruskimin dan Ibu Nursia mulai mempraktikkan budaya laut, demikian pula halnya dengan Haji Duskin di Kambuno dan Pak Toyyp, Ketua Lembaga ACL, telah menunjukkan suatu prestasi besar di kalangan orang Bajo sehingga mendapatkan Kalpataru dari Presiden Suharto pada tahun 1980-an.

Memang ada pula kecenderungan kebanyakan penduduk Bajo mengambil jarak atau bersikap eksklusif terhadap penduduk dari etnis lain seperti Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Contohnya, di Batanglampe terdapat lebih dari 10 keluarga bermukim di sebelah tepi dari pusat dusun; di Tarupa diperkirakan tigaperempat rumah tangga memisahkan diri di bagian Timur pulau, sedangkan sebagian lainnya bercampur dengan penduduk Bugis dan Selayar di depan dekat dermaga. Dusun Pulau Pasitallu Timur hampir sepenuhnya dihuni orang Bajo. Penduduk nelayan Bajo Takabonerate yang cenderung bersikap eksklusif ini hingga sekarang masih mempraktikkan pola penangkapan ikan secara musiman ke daerah-daerah penangkapan mereka masing-masing. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa keluarga-keluarga nelayan Bajo yang cenderung tertutup dan otonom berada dalam kondisi statis dan miskin.

c. Budidaya laut di Batanglampe, Pulau Sembilan: Sebuah Gagasan dan Praktik yang Cerdik

Di banyak desa nelayan di Indonesia sebetulnya sudah dimulai praktik budidaya laut, bahkan di beberapa tempat usaha yang prospektif tersebut sudah memberikan hasil yang cukup memuaskan bagi pengelolanya. Di Takalar, Jennepono, Bantaeng, Bulukumba di Sulawesi Selatan (lihat Anand Gaffar, 2005; Abraham Laode, 2005) dan beberapa daerah dalam provinsi Sulawesi Tenggara (lihat Tang dkk, 2005) sudah banyak petani nelayan budidaya rumput laut yang memperoleh hasil panen yang memuaskan. Demikian halnya beberapa kelompok keluarga nelayan Nelayan Bajo di Pulau Sembilan (Sinjai) telah mencoba budidaya rumput laut, pembesaran bibit lobster dan

kerang (japing, mutiara) dalam keramba sejak beberapa tahun sejak tahun 1995 (Lampe, dkk., 1996/1997; 1989; 2006).

Ruskimin (50 tahun) dari keluarga Bajo di Batanglampe mengaku sudah berkali-kali memanen lobster, seperti halnya H. Duskin di Kambuno yang sudah pernah mengambil biji-biji mutiara hasil budidaya kerangnya (Lampe, 2006). Usaha budidaya di Pulau Sembilan tersebut sebetulnya diupayakan sebagai usaha alternatif nelayan dari aktivitas utama berupa menangkap ikan, yang dari hari ke hari hasilnya semakin merosot akibat dari penangkapan berlebih dan kerusakan habitat terumbu karang. Meskipun belum lama dicoba oleh sebagian komunitas nelayan, namun praktik budidaya laut telah terbukti menunjukkan tanda-tanda dampak positifnya baik dalam segi ekonomi maupun pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang yang disebabkan perilaku nelayan pengguna bahan peledak dan bus beracun. Ruskimin adalah salah seorang di Batanglampe yang sejak tahun 1995 mulai mempraktikkan peneluran dan pembesaran bibit lobster dan kerapu dalam keramba. Selain lobster dan ikan, Ruskimin juga membudidayakan teripang dan rumput laut. Karena lokasi dalam dan sekitar budidaya diawasinya secara ketat siang dan malam dari praktik pembom dan pembius sehingga karang-karang yang pernah mengalami kerusakan parah di dasar mulai bertunas dan tumbuh kembali dengan segar. Lokasi tersebut juga mulai kaya dengan anak-anak ikan dan lobster, yang menurut Ruskimin, pada mulanya adalah bibit yang menetas dalam keramba-keramba miliknya dan lolos ke luar. Di sini ada dampak positif yang pada mulanya tidak direncanakan berupa proses pemulihan atau pembentukan habitat/ekosistem baru.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi nelayan, praktik usaha budidaya dari berbagai jenis biota laut bernilai ekonomi tinggi semestinya didorong dan difasilitasi pengembangannya. Upaya pengembangan usaha budidaya laut sebetulnya bukan hanya menjanjikan pendapatan ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga merupakan suatu proses yang secara otomatis mengarah pada pembentukan dan penguatan kelembagaan hak-hak individual, kelompok keluarga, atau komunal atas lokasi-lokasi perairan tertentu. Terbentuknya kelembagaan hak-hak pemilikan dan kontrol seperti ini akan mengkondisikan terbentuknya pola-pola pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan tumbuhnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat pengelola usaha perikanan budidaya laut.

d. Menanam bakau, berdirinya Lembaga ACL, dan Memperluas Peluang Ekonomi di Tongke-Tongke, Sinjai Timur

Penanaman dan pemeliharaan bakau di Tongke-Tongke dan sekitarnya merupakan salah satu contoh dari praktik komunitas pantai yang arif lingkungan dan ekonomis atas prakarsa seorang tokoh masyarakat Bajo, Pak Toyyeab (70 tahun, nelayan). Ceritanya, di masa lalu di paruh kedua periode 1950-an, sekelompok orang Bajo dari Mare (Bone) -mereka sebelumnya datang dari Kampung Bajoe Bone- bermigrasi ke Sinjai. Niat awalnya mau ke Pulau Sembilan, akan tetapi ternyata semua pulau dalam Kepulauan Sembilan sudah ter huni oleh orang Bajo dan Bugis yang berasal dari beberapa desa pantai Teluk Bone, sehingga mereka muncul di pantai timur Sinjai, tepatnya di Tongke-Tongke sekarang. Pak Toyyeab memohon kepada Raja Sinjai Timur untuk diberikan lahan yang terletak di bibir pantai untuk membangun pemukiman.

Berkat permohonannya dikabulkan sehingga mereka membangun pemukiman di situ. Oleh karena dari waktu ke waktu bibir pantai terkikis oleh ombak, maka muncullah gagasan cerdas untuk menanam pohon bakau sebagai penahan ombak. Jadi pada mulanya, menurut keterangan Pak Toyyeab, fungsi yang diharapkan dari hutan bakau semata-mata untuk untuk perlindungan lahan pemukiman pantai dari ancaman abrasi ombak laut. Ketika hutan bakau semakin besar dan meluas areanya barulah masyarakat sadar akan berbagai kegunaannya yang praktis.

Area hutan bakau Sinjai Timur dan Sinjai Utara sekarang telah menutupi kawasan pantai sepanjang minimal 5 km dengan lebar (ketebalan) bervariasi dari 50 m hingga 750 m ke laut. Dalam wilayah Dusun Tongke-Tongke saja ketebalan hutan bakau bervariasi dari 500 m hingga 750 m atau lebih. Seperti halnya di mana-mana, lahan bakau itu pada mulanya adalah laut secara yang secara berangsur-angsur muncul sebagai tanah timbul dari proses penumpukan sisa-sisa yang tersaring pada akar-akar bakau. Umur pohon bakau Tongke-Tongke bervariasi dari 2 tahun hingga 25 atau 30 tahun. Hutan bakau yang luas tersebut terdiri dari petak-petak yang luasnya bervariasi dimiliki oleh keluarga-keluarga yang menanamnya. Hingga sekarang, menurut Toyyeab, tokoh masyarakat sekaligus ketua lembaga konservasi hutan bakau “Aku Cinta Lingkungan (ACL)”, bahwa sampai tahun 2004 masyarakat Tongke-Tongke masih terus menanam bakau. Bagi mereka,

aktivitas menanam bakau adalah mudah karena tersedianya bibit lokal yang melimpah dan mereka mempunyai keterampilan melakukan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan.

Bagi masyarakat Tongke-Tongke yang sebagian besar nelayan, bakau sekarang mempunyai berbagai macam fungsi, seperti untuk perlindungan pemukiman dari abrasi ombak laut, perolehan lokasi perumahan dari tanah timbul, perolehan lahan tambak yang dikonversi dari lahan bakau, memanfaatkan daun-daun bakau untuk makanan kambing, perolehan kayu bakar, dan bahan bangunan rumah kayu, dan sewaktu-waktu lahan bakau dapat diperjualbelikan ketika pemiliknya (mereka yang menanam bakau) memerlukan uang secara mendadak. Fungsi yang tak kalah pentingnya dari hutan bakau ialah sebagai tempat perkembangbiakan berbagai jenis biota (sumberdaya perikanan) seperti kerang, kepiting, ikan, udang, dan lain-lain, yang memberi peluang yang baru bagi aktivitas ekonomi kaum perempuan.

Hal yang berkaitan dengan fungsi konservasi lingkungan bahwa hutan bakau telah membentuk ekosistem baru dengan rantai ekosistem yang kompleks. Hutan bakau pada lapisan dasar telah membentuk rantai ekosistem dari berbagai jenis ikan, kepiting, kerang, belut laut, ular, biawak, dan lain-lain. Pada lapisan permukaan, hutan bakau



Negeri di Atas Air (Surya Yuga)

menjadi habitat dari berbagai jenis burung, terutama kelelawar. Pada tingkat fungsi makronya, hutan bakau Tongke-Tongke dan sekitarnya telah mampu melindungi pemukiman penduduk pantai timur Sinjai dari peristiwa tsunami yang berpusat di Maumere pada awal tahun 1990-an. Demikian pula sebaliknya, ekosistem tersebut hingga batas-batas tertentu dapat melindungi pertumbuhan terumbu karang kawasan Taka Pulau Sembilan dari pencemaran yang bersumber dari darat di musim penghujan. Perlu diingat bahwa kondisi terjaganya ekosistem *mangrove* Tongke-Tongke ditentukan oleh pengelolaan komunitas sebagai komponen pemanfaat dan penyumbang dari ekosistem tersebut.

PENUTUP:
SARAN DALAM MENGARAHKAN
DINAMIKA KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI
BERBASIS LOKAL

1. Penguatan dan pengakuan terhadap eksistensi orang Bajo sebagai salah satu suku laut dalam NKRI setara dengan eksistensi ratusan etnis besar dan kecil lainnya di darat. Untuk itu semestinya dilakukan revitalisasi dan pengembangan potensi sosial budaya sebagai salah satu asset kekayaan budaya bangsa;
2. Melakukan program pemberdayaan dengan penataan perkampungan Bajo di tepi laut, rekonstruksi perahu *vinta*, *bido*, dan *jarangka* sebagai penguatan identitas budaya Bajo dalam kerangka *Bhinneka Tunggal Ika*.
3. Pengembangan kelembagaan sosial ekonomi yang berbasis lokal dengan modifikasi lembaga *pongawa-sawi* pada komponen-komponen hak kepemilikan usaha, sistem bagi hasil, dan lain-lain;
4. Pelatihan tentang pengelolaan pengembangan modal yang diarahkan pada perikanan tangkap arif lingkungan, usaha budidaya laut, dan menjadikan kawasan terumbu karang (kawasan Taka Pulau Sembilan, kawasan Takabonerate, kawasan terumbu karang Kepulauan Spermonde, Wakatobi, dan lain-lain) sebagai hak wilayah kelola suku Bajo. Untuk itu, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan formal kejuruan perikanan laut berbasis lokal dan modern dengan SPP rendah dan rangsangan beasiswa;

5. Pengembangan usaha produktif alternatif terkait perikanan yang memberikan kesempatan kerja kepada kaum perempuan;
6. Melibatkan orang Bajo dalam program studi banding ke komunitas-komunitas nelayan lain yang sejahtera, dan
7. Melibatkan generasi muda Suku Bajo dalam satuan tugas pertahanan dan keamanan laut melalui pendidikan kejuruan pelayaran dan kemiliteran.

Dengan arahan dinamika seperti ini, diharapkan sekaligus sebagai upaya meningkatkan harkat/martabat suku Bajo.

Daftar Pustaka:

- Barnard, Alan. 2000. *History and Theory in Anthropology*. Cambridge: University Press.
- Curtin, Philip D. 1984. *Cross-Cultural Trade in World History*. London, New York: Cambridge University Press.
- Dick-Read, Robert. 2009. *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*. PT. Mizan Pustaka.
- Horridge, Adriand. 1981. *The Prahú; Traditional sailing boat of Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Horridge, Adrian. 1986. *Sailing Craft of Indonesia*. Oxford University Press, Oxford, New York.
- Keesing, Roger M. 1981. *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspectives*. Holt, Rinehart and Winston, New York and Chicago.
- Lampe, Mungsi. 2008. "Wawasan Sosial Budaya Bahari" (Tidak dipublikasi). Buku Modul untuk pembelajaran Mata Kuliah Umum Wawasan Sosial Budaya Bahari di Universitas Hasanuddin.
- Lampe, Mungsi, dkk. 1996/1997. "Studi Analisa Sosial – COREMAP Propinsi Sulawesi Selatan". Laporan penelitian. Universitas Hasanuddin –PPT-LIPI. Jakarta. Proyek Dibiayai Bank Dunia.
- Lampe, Mungsi, dkk. 1997/1998. "Studi Analisa Sosial – COREMAP Provinsi Sulawesi Selatan". Laporan penelitian. Universitas Hasanuddin – PPT -LIPI. Jakarta, Proyek dibiayai oleh Bank Dunia.

- Lampe, Mungsi, dkk. 2000. *“Studi Pemanfaatan Sumberdaya Laut dalam Rangka Optimasi Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate”*. Laporan penelitian. Universitas Hasanuddin Bekerjasama COREMAP LIPI, Jakarta.
- Lapian, A.B. 2009. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*.
- Lapian, A.B. dan Nagatsu Kazufumi. 1997. *Research on Bajo Communities: Maritime People in Southeast Asia*. Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan Hotel Indonesia 26-28 Agustus 1997.
- Liebner, Horst H. 2005. *“Empat Versi Lisan Cerita Leluhur Orang Bajo di Selayar Selatan. Dalam Tapak-Tapak Waktu*. Makassar: Inninawa.
- Pramono, Joko. 2005. *Budaya Bahari*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Saleh, Sukmawati. 2004. *Pengetahuan Lokal Orang Bajo dalam Pengelolaan Pelestarian Sumberdaya Laut di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone*. Tesis S2 Program Pascasarjana Unhas.
- Sallatang, Arifin. 1982. *Punggawa-Sawi: Suatu Studi Kelompok Kecil* (Disertasi), Universitas Hasanuddin.
- Winarto, Yunita T. dan Mungsi Lampe. 1999. *Abrasion, Mangrove Conservation, Coral Reef Degradation*.
- Zacot, Francois-Robert. 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*. Jakarta: KPG/Kepustakaan Populer Gramedia.



Zonasi Taman Nasional Wakatobi (Surya Yuga)



Dermaga di Wakatobi (Surya Jiga)

SISTEM PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS BAHARI

Eymal B. Demmallino

Universitas Hasanuddin, Makassar

Abstrak

Tesis utama yang ingin diungkapkan dalam tulisan ini adalah navigasi tradisional dan kepercayaan lokal pelaut ulung Tanjung Bira dalam kerangka Sistem Pengetahuan dan Kepercayaan Komunitas Bahari di Sulawesi Selatan, sebuah karya besar bangsa yang telah terlahap “api modernisasi”. Navigasi tradisional adalah pengetahuan praktis yang telah teruji secara empirik dan terbentuk secara lokal dari masyarakat pemakainya. Jenis pengetahuan yang tumbuh kokoh di atas landasan kepercayaan yang dianut oleh mereka. Karena itu suatu kekeliruan besar jika kemudian sistem pengetahuan lokal ini dipandang sebagai penghalang modernisasi. Tulisan ini bermaksud untuk mengajak pemerhati dan pemikir peradaban

bangsa, mengubah cara berpikir dalam melihat potensi bangsa, hanya dengan cara ini kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya, bangsa yang berperadaban maritim.

Kata kunci: navigasi tradisional, kepercayaan, modernisasi, dan perubahan cara berpikir dalam melihat potensi bangsa.

PROLOG

Landasan Pemikiran

Pertama-tama penulis harus menyatakan bahwa “sebuah karya yang besar hanya dapat dilahirkan bilamana kita menyatukan diri dengan lingkungan” (Fukuoka, 1978). Lebih jauh Chambers (1987), secara tegas menyatakan bahwa tak jarang ilmuwan kita dalam memahami alam atau objek kajiannya selalu membuat kutub atau jarak dengan objek atau fakta yang ingin difahaminya. Ia tak jarang terperangkap ke dalam apa yang disebut “perangkap intelegensi” (ide dan epistemologi bawaan dari “luar”) dan mengabaikan yang lain (dari “dalam”) yang mungkin justru lebih mendekati kebenaran.

Salah satu perangkap intelegensi adalah apa yang disebut “modernisasi”, yang sampai abad XXI ini, masih difahami sebagai suatu kondisi kemajuan yang hanya ada di belahan Eropa dan karena itu jika negara-negara di luar Eropa berkeinginan untuk maju, maka harus mengikuti atau berkiblat ke Eropa atau ke Barat, atau tepatnya harus mengikuti seluruh proses yang berlangsung di Eropa dan mengabaikan atau menganggap segala “potensi” yang dimiliki oleh negara berkembang sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. Sebuah pemahaman tentang modernisasi yang sama sekali keliru (Eropanisasi), terperangkap dalam pandangan dikotomis (modern vs tradisional), pada hal modernisasi sesungguhnya tidak terdapat di suatu negara tertentu di dunia, tetapi justru sesungguhnya terdapat di negara manapun di dunia, pengabaian terhadap potensi sebuah negara, justru menjadi penghalang bagi kemungkinan modernisasinya sendiri (Ramos, 1985).

Teknologi yang dikembangkan di negara-negara berkembang yang pada umumnya diimpor dari luar atau apa yang disebut “transfer teknologi,” pada umumnya tidak menunjukkan “kebertubuhan” (Don Ihde dalam Lim, 2008) atau “koneksitas” (Makagiansar, 1997) dengan



Pantai Bira, Bontobahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Surya Yuga)

teknologi dan budaya lokal, termasuk dengan lingkungan alam di mana teknologi yang bersangkutan diterapkan. Akibatnya tidak heran jika kemudian kehadiran teknologi itu justru berdampak pada “perampokan” budaya lokal, hak-hak ekonomi masyarakat, dan kerusakan lingkungan, sebuah “teknologi yang tak berwajah kemanusiaan” (Schumacher, 1979). Tulisan ini mengangkat salah satu unsur kebudayaan, yang sepatutnya dibanggakan dan dikembangkan dalam perspektif modernisasi yang sesungguhnya, yakni Sistem Pengetahuan dan Kepercayaan Komunitas Bahari, khususnya yang bertalian dengan navigasi tradisional dan kepercayaan lokal komunitas pelaut ulung yang berasal dari Tanjung Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

SISTEM PENGETAHUAN

Navigasi Tradisional dalam Pelayaran Perahu Pinisi

Sistem Pengetahuan Komunitas Bahari sedikitnya terdiri atas: (1) seperangkat pengetahuan tentang pembuatan perahu, yakni sebuah pengetahuan teknis yang secara khusus dimaksudkan untuk membangun perahu, baik untuk perahu *pakkaja* (nelayan) yang kini telah bertonase hingga 12 ton, maupun untuk perahu *pasompe* (pelaut pedagang) yang kini bertonase 150–350 ton bahkan ada yang mencapai 500 ton, dan (2) seperangkap pengetahuan teknis tentang pelayaran perahu (*pa'lo pian*), dengan menggunakan tenaga angin sebagai sumber penggerak utamanya. Dalam tulisan ini, pembahasan difokuskan pada

sistem pengetahuan teknis pelayaran atau apa yang populer disebut navigasi tradisional dalam pelayaran perahu pinisi.

Terdapat tiga hal yang substansial yang harus difahami dalam navigasi tradisional dalam pelayaran perahu pinisi, yakni: (1) pemahaman terhadap alam (angin), khususnya yang bertalian dengan angin yang menjadi sumber penggerak utama pelayaran, (2) penggunaan alat bantu: peta *kar*, kompas, dan simbolisasi alam, khususnya dalam penentuan jalur pelayaran atau arah pelayaran dan ancaman pelayaran, dan (3) pengendalian perahu (pelayaran) atas dasar informasi alam (khususnya pengetahuan tentang angin sebagai sumber tenaga penggerak pelayaran) dan penggunaan peta *kar*, kompas, dan simbolisasi alam.

1. Pemahaman Terhadap Alam:

Angin sebagai Sumber Tenaga Penggerak Pelayaran

Dalam pemahaman pelaut ulung Tanjung Bira, angin diklasifikasikan atas angin *muson* (angin Barat dan Timur) dan angin lokal (angin darat dan laut). Angin *muson* yang bertiup dari kawasan Barat ke kawasan Timur secara lokal disebut “angin Barat”, sebaliknya angin *muson* yang bertiup dari kawasan Timur ke kawasan Barat secara lokal disebut “angin Timur”. Kedua jenis angin *muson* ini masing-masing berlangsung selama enam bulan secara bergantian dalam setiap tahun. Pada saat angin Barat bertiup biasanya disertai dengan hujan yang tinggi, karena itu disebut pula musim penghujan (Musim Barat) dan pada saat angin Timur bertiup hampir dapat dipastikan tidak terjadi hujan atau kurang hujan karena itu disebut pula musim kemarau (Musim Timur).

Pada setiap musim, dikenal dua kelompok mata angin yang secara bergantian bertiup-bersilangan mewarnai musim yang sedang berlangsung. Pada Musim Barat dikenal kelompok mata angin (Barat Laut, Barat-Barat Laut, Utara Barat Laut) yang bertiup dari kawasan Barat di atas Garis Khatulistiwa bergerak lurus menuju kawasan Timur dan kelompok mata angin (Selatan Daya, Barat Daya, dan Barat-Barat Daya) yang bertiup dari kawasan Barat di bawah Garis Khatulistiwa menuju kawasan Timur. Begitu pula pada Musim Timur juga dikenal kelompok mata angin (Utara Timur Laut, Timur Laut, dan Timur Timur Laut) yang bertiup dari kawasan Timur di atas Garis Khatulistiwa bergerak menuju kawasan Barat, dan kelompok mata angin (Timur

Manunggara, Tenggara, dan Selatan Manunggara) yang bertiup dari kawasan Timur di bawah Garis Khatulistiwa bergerak menuju kawasan Barat.

Pengalaman pelaut menunjukkan bahwa tidak ada kepastian kapan setiap jenis mata angin tersebut bertiup. Hal ini dapat dimaklumi mengingat selain daya tiup kelompok mata angin yang dimaksud tidak begitu menonjol, kecuali angin Barat dan Timur, juga karena kondisi geografis kepulauan Indonesia yang tersebar, yang kemudian berpengaruh terhadap perubahan arah angin, sementara pelayaran perahu pinisi umumnya berada di sekitar pulau-pulau yang dimaksud. Meskipun demikian pelaut pada umumnya tetap mengenal puncak-puncak tiupan angin Barat (*Barat Tappa'*) yang berhembus pada setiap bulan Januari dan puncak tiupan angin Timur (*Timoro' Tappa'*) yang berhembus pada setiap bulan Agustus.

Angin *muson* tersebut di atas pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh pelaut dalam pelayaran di laut lepas, seperti pada pelayaran antara Pulau Sulawesi ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, dan dari Pulau Sulawesi ke kawasan Timur Indonesia (Maluku dan Jayapura) atau sebaliknya. Sedang pada pelayaran di sekitar pulau atau sepanjang pulau yang bersangkutan, pada umumnya hanya memanfaatkan angin lokal. Secara umum, angin lokal ini hanya terdiri atas: angin laut dan angin darat. Angin laut umumnya berhembus pada siang hari, sedang angin darat pada umumnya hanya berhembus pada malam hari. Pergantian hembusan angin tersebut pada umumnya disebabkan karena perbedaan tekanan udara antara daratan dengan lautan sebagai akibat langsung dari pancaran sinar matahari. Mengikuti Hukum *Buys Ballot* yaitu pada siang hari berkat karena sifatnya yang lambat menerima panas mengakibatkan tekanan udara di atas lautan meninggi, atas dasar itu angin bertiup dari laut menuju ke darat. Sebaliknya pada malam hari di mana suhu daratan sudah turun mengakibatkan naiknya tekanan udara, akibatnya angin bertiup dari darat ke laut (Hanafi dkk., 1989).

2. Penggunaan Alat Bantu:

Peta Kar, Kompas, dan Simbolisasi Alam

Peta *Kar (Kara)* menyediakan informasi tentang sejumlah pulau kecil, batu karang, dan kedalaman air laut, yang terkadang tidak dapat diantisipasi dalam pelayaran, sehingga tidak jarang perahu harus

tenggelam atau terdampar karenanya. Peta *Kar* selain sebagai sumber informasi, juga sekaligus, melalui alat bantu lainnya, yang secara lokal disebut *juku-juku* (duplikat kompas), dipergunakan sebagai alat utama dalam penentuan jalur pelayaran, khususnya pada pelayaran antarpulau atau pelayaran di laut lepas. Cara penggunaannya adalah dilakukan dengan menempatkan *juku-juku* tersebut pada posisi pulau asal, lalu kemudian ditarik benangnya ke arah garis lurus pada pulau yang dituju, misalkan dari Pulau Jawa (Semarang) ke Pulau Kalimantan (Pontianak). Dalam navigasi modern, cara ini disebut “pembaringan”.

Dengan memperhatikan arah dan kekuatan angin, arus dan gelombang, maka dapat ditarik garis (ke arah sebelah kanan garis benang bila arah angin dari Timur dan atau ke sebelah kiri garis benang bila arah angin dari Barat), yang selanjutnya ditetapkan sebagai jalur yang harus dilalui dalam pelayaran. Semakin kuat angin bertiup, arus, dan gelombang, maka garis jalur pelayaran tersebut juga semakin di arahkan (secara berlawanan) dengan arah angin, arus, dan gelombang yang bersangkutan. Proses penetapan jalur pelayaran yang dilakukan secara berlawanan dengan arah angin, arus, dan gelombang, dalam istilah lokal disebut *allinjai*, sebuah proses pengambilan keputusan dalam penetapan jalur pelayaran atas dasar pertimbangan kekuatan hembusan angin, arus, dan gelombang.

Kompas, pada hakikatnya adalah penunjuk arah (Utara, Selatan, Timur, atau Barat). Bila kompas dihubungkan dengan bendera kecil (*pandi-pandi*) yang secara khusus dipasang pada tali tiang belakang perahu (*panambera jalan*), maka kompas dapat sekaligus berfungsi sebagai penunjuk sumber mata angin. Selanjutnya bila kompas dihubungkan dengan jalur pelayaran yang telah ditetapkan, maka akan segera memberi isyarat bahwa dalam pelayaran, pergerakan perahu harus tetap berada pada posisi derajat garis lurus yang telah ditetapkan sebagai jalur pelayaran.

Jauh sebelum kompas dan peta *kar* ditemukan, pelaut ulung Tanjung, pada umumnya hanya menggunakan simbol-simbol alam atau tepatnya simbolisasi alam. Simbolisasi alam ini secara garis besar dapat dikelompokkan atas dua, yakni: (1) simbolisasi alam di malam hari (seperti: bintang, kilat, bunyi, dan bau lautan atau daratan), dan simbolisasi alam di siang hari (seperti: matahari, warna air laut, angin, arus, dan gelombang), baik dalam fungsinya sebagai penunjuk arah maupun dalam fungsinya sebagai penunjuk bahaya dalam pelayaran.

Penggunaan simbolisasi alam di waktu malam sesungguhnya merupakan refleksi pengalaman pancaindera, khususnya mata (penglihatan), telinga (pendengaran), dan hidung (penciuman) terhadap benda-benda alam yang terlihat atau pun yang terdeteksi selama dalam pelayaran di waktu malam. Tentulah refleksi pengalaman seperti ini telah banyak teruji keabsahannya, sehingga memang pantas bila hal ini menjadi acuan berlayar yang dapat diterima dan dipelajari secara turun temurun.

a. Simbolisasi Alam di Malam Hari

Pertama, bintang. Terdapat enam jenis bintang yang kerap kali memancarkan sinarnya di malam hari dan sekaligus dapat dijadikan sebagai penunjuk arah dalam pelayaran. Keenam jenis bintang itu adalah: (1) bintang *bahi*, biasanya terbit pada jam 19.00 Wita dan tepat berada pada posisi Barat, (2) *bintang lohe*, biasanya terbit pada jam 04.00 Wita (subu hari) dan tepat berada pada posisi Timur, (3) *bintang balu*, biasanya terbit pada jam 22.00 Wita dan tepat berada pada posisi Selatan, ketiga jenis bintang itu masing-masing hanya berjumlah satu buah, (4) *bintang tallu*, biasanya terbit pada jam 21.00 Wita, berjumlah tiga buah dan tampak berbentuk segitiga, dan berada pada posisi Barat-Barat Laut, (5) *bintang sapo sala*, biasanya terbit pada jam 04.00 Wita bersamaan dengan bintang *lohe*, berjumlah empat buah dan tampak berbentuk segi empat, berada pada posisi Timur Laut, dan (6) *bintang purung-purung*, biasanya terbit pada jam 22.00 Wita, berjumlah banyak dan tampak bagaikan kerumunan, serta tepat berada pada posisi Timur *Manunggara*.

Kedua, kilat. Kilat tidak hanya sekedar sebagai penunjuk arah tetapi juga sekaligus dapat berfungsi sebagai penunjuk bahaya. Bagi pelaut, setiap pancaran kilat memiliki arti tersendiri. Bila kilat memancar secara vertikal, hal itu berarti di tempat itu terdapat pulau besar (seperti Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan sebagainya), sehingga terhadapnya perlu mengarahkan pelayaran ke arah yang bersangkutan, dan bila kilat memancar secara horizontal, hal itu berarti pada tempat itu terdapat pulau kecil atau terumbu karang atau pun lautnya dangkal, sehingga terhadapnya perlu diwaspadai.

Ketiga, bunyi. Bunyi yang dimaksud adalah bunyi gesekan badan perahu dengan kemungkinan dangkalnya perairan sekitar pelayaran, terutama di malam gelap geilita. Bila terdengar bunyi *swit ...* berarti

pelayaran perahu berada di sekitar perairan dangkal atau lumpur dan karena itu perlu mengendalikan perahu ke arah yang lebih dalam, dan bila terdengar bunyi *tak tak tak ...*, maka hal itu berarti perairan di sekitar pelayaran terdapat terumbu karang dan harus segera mengendalikan perahu agar tidak terdampar.

Keempat, bau. Bagi pelaut, bau daratan dan lautan masing-masing memiliki kebauan yang spesifik. Daratan pada umumnya lebih berbau buah-buahan dan dengan bau itu memberi indikasi bahwa pelayaran telah mendekati *puntana* (pulau yang dituju). Sedang lautan pada umumnya berbau amis, terlebih jika mendekati pulau kecil atau terumbu karang, dan dengan bau itu memberi peringatan bahwa pelayaran harus segera dikendalikan agar terhindar bahaya.

b. Simbolisasi Alam di Siang Hari

Pertama, warna. Permukaan laut yang meliputi: warna hitam, biru, dan abu-abu. Permukaan air laut yang berwarna biru kehitaman memberi indikasi bahwa lokasi perairan yang bersangkutan memiliki kedalaman lebih dari 500 meter dan hal ini berarti lampu hijau atau pelayaran berada pada daerah yang aman. Permukaan air laut yang berwarna biru langit memberi indikasi bahwa lokasi perairan yang bersangkutan memiliki kedalaman antara 30 s/d 500 meter dan hal ini berarti lampu kuning atau pelayaran harus segera berhati-hati. Selanjutnya, permukaan air laut yang berwarna abu-abu kehijauan (*pussa'*) memberi isyarat bahwa pelayaran berada pada jalur yang amat berbahaya, karena berada pada kedalaman perairan kurang dari 30 meter, dan karena itu pula perahu harus dikendalikan secara perlahan-lahan sambil mendeteksi kedalaman secara berulang-ulang, dengan bantuan peralatan yang secara lokal disebut *ladung* (besi dengan berat 0,5 kg yang diikat dengan seutas tali).

Kedua, matahari. Bilamana kompas tidak berfungsi atau tidak ada sama sekali, maka posisi matahari dapat berfungsi sebagai penunjuk arah dalam pelayaran. Sebagaimana pergerakan alamiahnya, matahari selalu bergerak dari Timur ke Barat dan dengan posisi ini akan sangat membantu dalam mengoreksi apakah pelayaran tetap berada pada jalur yang ditetapkan.

Ketiga, angin, arus, dan gelombang. Ketiga kondisi alam ini bagaikan tiga sekawan yang selalu bergerak se arah yang pada umumnya berada di bawah pengaruh musim (Musim Barat atau Timur)

dan kondisi (alur) geografis kepulauan. Pengaruh musim terhadap pergerakan ketiga benda alam itu terutama pada perairan laut lepas, sedang pengaruh geografis terutama pada alur pelayaran sekitar perairan pantai. Berdasarkan pengaruh musim dan kondisi geografis, para pelaut menklasifikasikan arus dan gelombang tersebut berdasarkan kekuatannya: (1) arus dan gelombang kecil, jika kekuatannya sangat lemah atau sesuai dengan keadaan angin yang bertiup secara normal, (2) arus dan gelombang sedang, yang umumnya terjadi berselang 2 - 3 hari setelah angin penggerak bertiup, dan (3) angin dan gelombang besar, yakni jenis arus dan gelombang yang kekuatannya paling besar, dan biasanya berlangsung pada bulan Januari (pada Musim Barat) dan bulan Agustus (pada Musim Timur). Bagi para pelaut, jenis arus dan gelombang yang ketiga ini kerap kali dihindari, terlebih jika berlangsung pada puncak Musim Barat, ditandai dengan curah hujan yang tinggi, disertai dengan angin yang sangat kencang. Selanjutnya, angin sebagai penggerak utama arus dan gelombang juga diklasifikasikan atas tiga, yakni : (1) angin biasa, yaitu jenis angin yang paling lemah kekuatannya dibanding dengan jenis angin lainnya, (2) angin sedang, yaitu jenis angin yang sebelum bertiup tampak kehitam-hitaman dari kejauhan (di atas permukaan air laut), dan (3) angin berbahaya, yaitu jenis angin yang pada saat sebelum bertiup nampak terlihat seperti kabut di atas permukaan air laut. Bagi para pelaut, jenis angin yang ketiga ini perlu mendapat perhatian dalam pengertian bagaimana menyesuaikan antara keadaan angin yang berbahaya itu dengan pergerakan perahu sehingga dapat terhindar dari malapetaka di laut.

3. Pengendalian Perahu: Bagaimana Melayarkan Perahu (Pelayaran)

Pertama-tama yang harus difahami dalam pengendalian perahu adalah bahwa perahu yang dikendalikan harus diasumsikan berada pada posisi di tengah pusat lingkaran penjurur mata angin. Dari sini kemudian baru perahu mulai digerakkan dengan langkah-langkah yang dimulai dari:

1. menetapkan jalur pelayaran;
2. menarik jangkar;
3. mengembangkan layar, dan
4. mengendalikan perahu berdasarkan arah mata angin, arus dan gelombang.



Seperti yang dikemukakan di muka, jalur pelayaran ditetapkan berdasarkan informasi alam tentang kekuatan angin, arus dan gelombang, dan dengan bantuan peta *kar*, kompas, dan duplikat kompas, jalur pelayaran dapat ditetapkan. Selanjutnya ketika jalur pelayaran telah ditetapkan, maka kedua jangkar (muka dan belakang perahu) ditarik hingga tampak terlihat tergantung baik pada bagian depan maupun pada bagian belakang perahu. Setelah itu layar dikembangkan secara bertahap mulai dari layar depan (*cocoro*'), dilanjutkan dengan layar tengah (*sombala bakka*), diikuti layar belakang (*sombala ri boko*), dan masing-masing layar atas depan (*tampase're riola*) dan layar atas belakang (*tampase're ri boko*). Ketika semua layar telah dikembangkan, maka perahu mulai diarahkan berdasarkan arah mata angin dan arah tempat tujuan pelayaran. Jika jalur pelayaran yang akan dilayari bertolak dari Selatan ke Utara (sebutlah dari Surabaya ke Banjarmasin) dengan arah angin bertiup dari Timur ke Barat, maka pengendalian perahu dilakukan dengan cara *attunggeng*: mencari posisi *start* untuk kemudian terus melaju menuju ke Banjarmasin. Tetapi jika ternyata arah angin yang sedang bertiup tepat berasal dari Utara, hal itu berarti pengendalian perahu harus berlawanan dengan arah angin, pengendalian perahu dengan cara seperti ini secara lokal disebut *akkarakkaji* (menggerakkan perahu secara *zig-zag* seraya menantang kehendak alam). Baik *attunggeng* maupun *akkarakkaji*, keduanya dimaksudkan agar semua layar dapat berfungsi secara optimal dan perahu dapat melaju secara optimal pula.

Dalam pengendalian perahu dengan cara *attunggeng* dan terlebih pada cara *akkarakkaji*, kerap kali dilakukan pembelokan perahu atau apa yang secara lokal disebut *appabilu'lopi*. Dalam pelayaran perahu, *appabilu'lopi* tidak hanya dilakukan dengan cara menggeser posisi kemudi bagai memutar setir mobil, tetapi seiring dengan itu pula dilakukan pengencangan tali layar belakang (*anripisi kalla sombala riboko*), fungsinya adalah untuk mempercepat pergerakan buritan perahu pada posisi yang dikehendaki. *Anripisi kalla* sesungguhnya tidak hanya dilakukan pada saat pembelokan perahu, tetapi juga dilakukan bila arah angin tepat berada dari sisi kanan atau kiri perahu. Pada posisi ini seluruh tali pengendali layar dikencangkan agar fungsinya dapat lebih optimal. Tetapi jika arah angin berasal dari samping kanan atau kiri belakang, maka tali pengendali layar sedikit dilonggarkan atau dalam istilah pelaut disebut *appaangga kalla* dan selanjutnya jika arah angin tepat dari arah belakang (buritan perahu),

maka semua tali pengendali layar perahu dilonggarkan dan layar tengah dan belakang dipasang secara bersebelahan. Cara ini secara lokal disebut *appanggang sombala-kalla*. Jika posisi layar pada *anripisi kalla*, *appaongga kalla*, dan *appanggang kalla-sombala* diperbandingkan satu sama lain, pengalaman para pelaut menunjukkan bahwa pada posisi pengendalian layar dengan cara *appaongga kalla* adalah lebih cepat.

Bertalian dengan gerakan gelombang yang kerap kali datang menggempur perahu dalam pelayaran, maka terdapatnya terdapat tiga gerakan pengendalian perahu yang umumnya dihindari oleh para pelaut, yakni:

1. gerakan mengikuti arah gelombang atau membiarkan perahu berjalan se arah arah gelombang;
2. gerakan yang melawan arah gelombang atau menghadapkan perahu ke arah gempuran gelombang (*nipasumpala'*), dan
3. gerakan perahu yang merintanggi gelombang secara horizontal atau membiarkan perahu berjalan di atas gelombang.

Dalam pengalaman para pelaut, gerakan yang benar adalah gerakan yang sedikit merintanggi arah gelombang (membuat sudut 45 derajat dari arah datangnya gelombang) atau apa yang secara lokal disebut *nipikinrissi bombanginya*. Bila ada pelaut yang mengendalikan perahu dengan cara salah satu dari ketiga gerakan perahu yang harus dihindari tersebut di atas, maka kerap kali terjadi patah tiang, putus tali temali, layar sobek, dan bahkan dapat membalikkan perahu atau tenggelam.

SISTEM KEPERCAYAAN

Akar-akar Kepercayaan Komunitas Bahari

1. Tradisi Kebaharian

Seluruh tradisi kebaharian adalah dimaksudkan untuk memperkuat jiwa bahari dalam diri pelaut dan sekaligus untuk membangun budaya bahari selaras dengan aktivitas daratan. Aktivitas pelayaran-perdagangan sepenuhnya hanya dilakukan dalam tempo waktu enam bulan (Mei s/d Oktober) dan enam bulan berikutnya (November s/d April) dipergunakan untuk kembali berkumpul dengan keluarga, menikmati hasil, melakukan pesta perkawinan, memperbaiki rumah, mengamankan perahu dengan cara menyangga sehingga memudahkan untuk pemeliharaan dan menjelang keberangkatan

(Februari s/d April) seluruh perahu berada dalam pemeliharaan atau perbaikan.

Seiring dengan aktivitas kebaharian tersebut di atas, maka dalam komunitas bahari dikenal ada musim perkawinan dan musim industri rumah tangga. Musim perkawinan berlangsung ketika kondisi alam tidak memungkinkan untuk berlayar, secara lokal disebut Musim Barat (November s/d April) dan musim industri rumah tangga berlangsung ketika pelayaran sedang berlangsung (Mei s/d Oktober), secara lokal disebut Musim Timur atau disebut pula Musim Pelayaran. Pada Musim Timur, seluruh anggota keluarga dalam komunitas bahari membatasi dirinya (berpantangan) untuk keluar rumah dan karena itu agar tidak jenuh di dalam rumah, mereka pada umumnya bertenun sarung bercorak lokal (*lipa' nijai* dan *lipa' samarinda*), menjahit bordir (*assulan*), dan membuat kue benang-benang (*uhu'-uhu'*) yang dapat bertahan lama hingga bertahun-tahun. Bukan hanya itu, jenis sayurannya pun secara khusus ditanam di pekarangan rumah, yang setiap hari dapat dipetik dan semakin dipetik semakin bertumbuh subur. Secara lokal jenis sayur ini disebut *taha kambang* (daun kelor). Begitu juga bahan-bahan laut pauk lainnya seperti belimbing dan pisang juga umumnya ditanam di pekarangan rumah. Belimbing adalah bahan masakan ikan, sehingga kuahnya terasa asam dan mengenangkan. Sedang pisang, buahnya selain untuk dikonsumsi secara langsung juga dapat dibuat sayur dan isi batang pohonnya pun juga biasanya digunakan untuk bahan masakan ikan (*pallu' mara*), sehingga ikan dapat bertahan lebih lama dan lebih banyak untuk dikonsumsi. Di Musim Barat, umumnya mereka (bersama suami) mengumpulkan daun-daun yang secara lokal disebut *taha kadien* (bahan campuran untuk sayur yang dipadukan dengan ikan kering atau pun daging rusa, sapi, atau kerbau) dan rumput laut (bahan campuran daun kelor yang secara lokal disebut *utang bongga*). Baik *taha kadien* maupun *utang bongga*, keduanya dapat diolah atau diawetkan sehingga dapat bertahan lebih lama hingga bertahun-bertahun. Bahan-bahan itu pun biasanya juga dibawa oleh suaminya atau sanak keluarganya untuk persediaan berlayar. Kesemuanya itu dimaksudkan agar mereka dapat “bertahan di dalam rumah” menunggu dengan sabar datangnya Musim Barat alias datangnya suami dan sanak keluarga dari rantau perdagangan.

Menjelang keberangkatan (Februari~April), para pelaut telah



Rumah Ponggawa dengan Rumah Sawi Saling Berdampingan (Surya Yuga)

disibukkan dengan kegiatan reparasi perahu. Kayu badan perahu dibersihkan atau yang dipandang sudah tidak layak diganti, lalu kemudian keseluruhan badan perahu didempul (*nilepa*) dengan bahan-bahan dasar lokal (adonan kapur yang dibuat secara khusus) dan dicat dengan warna sesuai dengan kehendak bersama nakhoda dan para *sahi* (ABK)-nya. Setelah selesai dicat, perahu diluncurkan, bisanya hanya menunggu pasang tertinggi, dan setelah diluncurkan, layar juga direparasi dan diganti jika sudah tidak layak layar lagi atau kekecilan. Ketika seluruhnya telah siap atau berlayar, segera dilaksanakan tradisi *appassili* (tradisi tolak bala) yang secara khusus dilakukan di atas perahu. Biasanya dilakukan dengan penyembelian seekor kambing dan beberapa ekor ayam, yang kesemuanya disajikan dalam bentuk *sesajen*. Doa dibacakan oleh seorang yang secara khusus berprofesi sebagai tukang baca doa (*Pinati*). Dahulu sebelum Islam datang, *doa pinati* biasanya dalam bentuk mantera-mantera, tetapi kemudian setelah Islam datang, seluruh doa yang dibaca oleh *pinati* diganti dengan doa-doa keselamatan (*pappala' pala'kang*) dalam Islam. Setelah tradisi *appassili* dilaksanakan di atas perahu (*appassili lopi*) yang diartikan sebagai upaya pencegahan secara gaib agar perahu dapat terhindar dari malapetaka laut, maka tradisi ini pula diikuti oleh masing-masing ABK termasuk nakhoda di rumah masing-masing dengan apa yang disebut *assongko bala*, yang juga secara khusus dimaksudkan agar para pelaut secara individu maupun kelompok juga dapat terhindar dari malapetaka laut. Doa juga dilantunkan oleh seorang *pinati* yang secara khusus berprofesi sebagai “Tukang Baca

Doa”, dan biasanya adalah guru mengaji atau Imam Kampung. Tradisi *assongko bala* ini umumnya dilakukan dalam bentuk penyembelian beberapa ekor ayam dan disajikan dalam bentuk sesajen yang kesemuanya~seperti juga pada tradisi *appassili*, bermakna kegaiban. Puncak tradisi kegaiban kemudian bagi para pelaut dilakukan di hari keberangkatan. Suami dan isteri, anak (pelaut) dan ibunya, berjabat tangan secara sakral di atas selembar kain putih atau sekurang-kurangnya di atas sajadah, duduk berhadapan, berkonsentrasi penuh, membaca kalimat *syahadatain*, dimana yang dituakan (suami atau ibu) mengucapkan kalimat syahadat pertama lalu kemudian dilanjutkan secara bersambung oleh yang lebih muda (isteri atau anak) dengan kalimat syahadat yang kedua, dan seterusnya dilanjutkan dengan lantunan doa bersama kepada Tuhan agar keduanya tidak terpisahkan (oleh kematian) sebelum mereka berjumpa lebih dahulu, sekalipun para pelaut yang bersangkutan tertimpa malapetaka laut. Baik tradisi *appassili*, tradisi *assongko bala*, maupun tradisi *baiyat* dengan kalimat *syahadatain* tersebut di atas, ketiganya adalah dimaksudkan untuk memperkuat batin (jiwa) secara internal. Karena itu jika perahu telah direparasi, layar telah dipersiapkan dengan baik (penguatan secara eksternal), lalu kemudian dilanjutkan dengan tradisi *appassili*, *assongko bala*, dan *baiyat* keluarga (penguatan secara internal), maka bagi pelaut dipandang telah siap mengarungi lautan dan menjelajah di Nusantara, termasuk di dalamnya untuk menghadapi perompak (bajak laut) dan para pencuri atau perampok yang kerap kali nekat untuk merampas muatan perahu baik di laut maupun di pelabuhan.

2. Sumber Kepercayaan

Seluruh tradisi kebaharian pada awalnya bersumber dari kepercayaan pra-Islam (animisme dan dinamisme), yang dalam perkembangannya kemudian tetap “dipelihara” oleh “Islam Awal”. Islam Awal (Sufisme) yang juga bernuansa mistik-kegaiban tetap memberi toleransi terhadap seluruh pelaksanaan tradisi kebaharian, terkecuali substansi dan bacaan doanya, yang sebelumnya berupa mantera-mantera, keseluruhannya telah diganti dengan doa-doa keselamatan yang dilandasi oleh ketauhidan dalam Islam. Jika sebelumnya mantera-mantera ditujukan pada roh gaib (“penguasa bumi dan laut”), maka setelah Islam datang, doa-doa keselamatan dilantunkan dan hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Ta’ala dan Rasulullah SAW, sebagaimana makna yang terucapkan dalam kalimat

syahadatain. Akan tetapi kemudian karena model pengislaman sufi (yang diusung atau ditokohi oleh Dato' ri Tiro: *dato* bungsu dari tiga *dato* yang mengislamkan Bugis Makassar, yang secara khusus mengambil wilayah pengislaman di bagian Timur dan Selatan Sulawesi Selatan) menggunakan “model pengislaman lunak” sesuai dengan tradisi mistik yang berlangsung di sana, maka upaya pengislamannya tidak dapat berlangsung “sempurna~dewasa”. *Tawasul* (sistem perwakilan) dalam permohonan doa dan pelibatan roh-roh keluarga yang telah lama meninggal juga tetap turut “dihadirkan” dalam setiap pembacaan doa, bahkan tidak jarang justru roh-roh gaib tersebut juga diminta agar doa mereka dilanjutkan dan dimintakan kepada Tuhan, termasuk pada roh Dato ri Tiro melalui kunjungan atau ziarah di pemakamannya. Terlepas dari segala kelemahannya, Islam Awal (Sufisme-Kebatinan) yang dibawa oleh Dato ri Tiro telah mampu memperkuat batin-jiwa para pelaut dalam menghadapi kekuatan alam laut (dinamisme), di mana angin, arus, dan gelombang terkadang datang dengan “maha dahsyatnya”, sehingga tidak jarang di antara mereka harus tenggelam bersama dengan perahu mereka. Pembatinaan melalui tradisi *apassili*, *assongko bala* (secara vertikal dalam hubungannya dengan Tuhan) dan *baiyat syahadatain* (secara sosial dalam hubungan dengan keluarga melalui penyaksian Tuhan), mereka pada akhirnya berkata “*akomo malla'-mallakki a'lampa a'lopi, nasaba 'mannaki lalang ri patti, umpaki na mate matejaki*” (tidak perlu anda takut berlayar, sebab jika ajal akan datang menjemput, tak dapat kita bersembunyi, sekali pun kita berada dalam peti, Tuhan tetap akan mengambil nyawa kita). Kepercayaan inilah yang memperkuat jiwa~batin mereka, sehingga mereka tetap bersemangat dan tetap kokoh dalam menghadapi segala rintangan dalam pelayaran.

3. *Kualleangi Tallanga Natoalia*

K*ualleangi Tallanga Natoalia* memiliki makna yang beragam sebagaimana yang dipahami banyak orang. Kebanyakan orang memahaminya sebagai sumpah para pelaut atas keberaniannya dalam menghadapi keganasan laut dan ada pula yang memahaminya sebagai sebuah pernyataan yang lahir karena segala sesuatunya telah dimatangkan sebelum berangkat. Dalam pandangan penulis, agaknya makna yang terakhir ini lebih tepat dan lebih memungkinkan untuk ditelusuri dan dipelajari oleh generasi pelaut. Ketika badan perahu (*kale lopi*) telah direparasi atau diperbaharui atas segala sesuatu yang

dipandang tidak layak layar, tali-temali dan layar (*pakakkasa' pannyombalang*) telah diperbaharui atau secara eksternal telah dinyatakan layak layar, dan ketika tradisi *appassili*, *assongko bala*, dan *baiyat* diri dan keluarga telah dilaksanakan dengan “*khusu*”-sakral” atau secara internal telah siap untuk berlayar, maka barulah pernyataan “*Kualleangi Tallanga Natoalia*” keluar dari mulut seorang pelaut. Dengan demikian pernyataan *Kualleangi Tallanga Natoalia* sesungguhnya lebih bermaknakan “Kematangan Perencanaan” baik secara eksternal (fisik-keperahuan) maupun secara internal (jiwa-semangat), meskipun itu kedengarannya bagaikan sumpah dari keberanian seorang pelaut. Dengan kata lain keberanian seorang pelaut bukan sekedar keberanian semata (*teyai pa'bambangan natolo*), tetapi lebih merupakan keberanian yang dilandasi oleh pertimbangan rasional (intelektual, emosional, dan spiritual).

EPILOG

Masa Depan Komunitas Bahari

Kehadiran modernisasi kemudiaan (paro ketiga abad XX) ke dalam masyarakat bahari, yang dikenal dengan istilah motorisasi atau yang penulis sebut “Teknologi Percepatan Pelayaran” secara perlahan-lahan telah mencopot layar perahu pinisi. Mula-mula layar belakang (*sombala ri boko dan tampase're ri boko*) dan dua layar depan (*cocoro' ri olo dan cocoro' tangga*) dicopot karena dianggap sudah tidak relevan, sehingga yang bertahan hanya layar tengah (*sombala bakka*), layar atas depan (*tampase're ri olo*) dan layar depan besar (*cocoro' bakka'*). Bukan hanya itu, ketiga layar yang dipertahankan tersebut juga semakin diperkecil ukurannya seiring dengan peningkatan kapasitas mesin penggerak pelayaran, dan akhirnya sekarang ketiga layar itu hanya berfungsi sebagai simbol untuk mengelabui petugas pelabuhan agar pajak mereka tidak disamakan dengan kapal-kapal mesin lainnya. Di sinilah muncul istilah baru dalam pelayaran, yakni Perahu Layar Motor (PLM), meski sesungguhnya secara fungsional tepatnya adalah Perahu atau Kapal Motor (KM). Tak seorang pun yang sadar ketika itu, bahwa pencopotan layar adalah juga sekaligus bermaknakan pencopotan keterampilan navigasi tradisional yang selama ini dibanggakan oleh para pelaut kita. Bukan hanya itu aktivitas sosial kebaharian juga semuanya ikut tercopot, musnah bagaikan dilahap “api modernisasi”. Inilah yang dimaksud “teknologi yang tidak bertubuh” (Don Ihde dalam Lim,

2008) atau “teknologi yang tidak *konek*” (Makagiansar, 1997). Bahkan lebih jauh kehadirannya kini selain semakin membebani biaya operasional juga telah merampok hak-hak ekonomi para pelaut, dengan adanya bagian khusus untuk mesin melebihi bagian pelaut atau sama dengan keseluruhan bagian pelaut, sebagai konsekuensi dari semakin besarnya biaya operasional. Perampokan seperti ini dipandang sangat tidak manusiawi dan karena itu pula kehadirannya dipandang sebagai “teknologi yang tidak berwajah kemanusiaan” (Schumacher, 1979). Jika kehadiran sebuah teknologi tidak bertubuh, tidak terkoneksi, dan tidak berwajah kemanusiaan atau tepatnya menghancurkan kebudayaan setempat, maka kehadirannya tidak dapat dipandang sebagai “modernisasi” (Ramos, 1985). Ke depan, jika budaya kebaharian ingin dipertahankan, sebagai kebanggaan masyarakat Bugis-Makassar Sulawesi Selatan bahkan kebanggaan nasional, maka penggunaan motorisasi harus dapat dipertahankan sampai pada tingkat



Pembuatan Perahu oleh Suku Bugis di Desa Juru Seberang, Belitung

di mana navigasi tradisional yang menjadi kebanggaan bangsa harus tetap dipertahankan. B.J. Habibie melalui BPPT dan Menristek bekerjasama dengan PT. PAL Surabaya telah pernah menciptakan Kapal Layar Motor (KLM) Maruta Jaya 900, sebuah kapal layar motor berkekuatan 900 ton dan mampu berlayar dengan kecepatan 8 – 9 knot per jam pada saat cuaca normal dengan penghematan BBM hingga 70 % dari kapal kargo sejenisnya. Jika kapal sejenisnya mengkonsumsi solar 3.000–4.000 liter per hari, maka Kapal Maruta Jaya ini hanya mengkonsumsi 900–1.000 liter per hari. Bukan hanya itu, pelaut dari Tanjung Bira juga pernah menciptakan Perahu Lambo Berlayar Pinisi (1960-an) dan ternyata mampu berlayar dengan kecepatan 9–10 knot per jam pada saat cuaca normal. Jika dibandingkan dengan Kapal Ferry sekarang yang menempuh rute Bira - Selayar memerlukan waktu 3–4 jam, Perahu Lambo Pinisi ini hanya memerlukan waktu 1–2 jam saja.

Dua produk teknologi yang dimaksud jelas sangat menyatu dengan alam dan budaya bangsa, bangsa maritim, bukan bangsa daratan-pedalaman atau kontinental. Karena itu sudah seharusnya bila para pemimpin dan cendekiawan bangsa sadar bahwa hanya karya seperti inilah yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai “Karya Besar” (Fukuoka, 1978), karya yang patut dikagumi oleh bangsa yang mengaku sebagai bangsa maritim.*****

Daftar Pustaka

- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Demmallino, Eymal B. 1984. *Sistem Pengetahuan Lokal Bugis Makassar Konjo Mengenai Kebaharian (Pa'lo pian)*. Makassar: Toyota Foundation Japan–Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia–Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- , 1997. *Transformasi Sosio–Kultural: Model Pengembangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus pada Komunitas Nelayan Makassar di Dua Desa Pantai Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Bandung: Tesis Program Magister Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- , 2011. *Transformasi Sosio–Kultural: Menggagas Pembaharuan Masyarakat Maritim di Negeri Bugis–Makassar Sulawesi Selatan*. Makassar: Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Fukuoka, Masanobu. 1991. *Revolusi Sebatang Jerami: Sebuah Pengantar Menuju Pertanian Alami*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hanafi, dkk. 1989. *Geografi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Lubuk Agung.
- Lim, Francis. 2008. *Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Makagiansar, Makaminan. 1997. *Meneropongi Perguruan Tinggi Indonesia dalam Dunia yang Saling Ketergantungan dan Senantiasa Penuh Perubahan*. Makassar: Orasi Ilmiah Disampaikan pada Dies Natalis ke 41 UNHAS pada Tanggal 10 September 1997.
- Ramos, Alberto Guerrero. 1980. “Menuju Suatu Model Kemungkinan” dalam W.A. Belling dan G.O. Totten, *Modernisasi: Masalah Model Pembangunan*. Jakarta: YIIS.
- Schumacher, E.F. 1979. *Kecil Itu Indah: Ilmu Ekonomi yang Mementingkan Rakyat Kecil*. Jakarta: LP3ES.



NOTULA SESI KEDUA

DINAMIKA KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI ORANG BAJO

Pemakalah:

Dr. Mungsi Lampe, M.Si

Moderator:

Dra. Dade Pratuntari, M.Si.

Notulis:

Drs. Faisal, M.Si.

A. Paparan

Studi sejarah dan antropologi tentang kehidupan orang Bajo, khususnya di Indonesia bagian Timur telah banyak memberi informasi dan karakteristik orang Bajo yang tradisional, statis, berkehidupan di perahu, dunia perairan dan kearifan lingkungan, pola pengembaraan pelayaran tanpa pemukiman permanen, keterbelakangan, keterisolasian, dan termarginalisasi yaitu tanpa atau kurang pemihakan kebijakan politik, menjadi korban eksploitasi dari kelas-kelas pengusaha nelayan dari etnis lain, dan sebagainya.

Dari beberapa hasil penelitian sosial budaya sejak lebih dari 1 dekade terakhir diketahui bahwa dalam beberapa aspek, orang Bajo termasuk yang di Sulawesi Selatan, mengalami proses dinamika, meliputi: pola pemukiman dan organisasi sosial kemasyarakatan,

organisasi/kelompok kerjasama nelayan atau pelayar; produksi pertukaran dan keterlibatan dalam jaringan pasar dunia; pengembangan usaha ekonomi produktif alternatif; praktik usaha budidaya laut; pengelolaan hutan bakau berbasis kelestarian lingkungan pesisir dan ekonomi produktif, dan lain sebagainya.

Konteks ini memperlihatkan bahwa orang Bajo mengalami suatu prestasi yang melebihi peladang berpindah-pindah dan pemburu di darat. Hal ini semestinya diapresiasi, dikaji lebih mendalam, dan diarahkan pengembangannya. Karya dan informasi yang melimpah dan akurat dari studi lapang telah menyumbang kepada pengayaan etnografi dan sejarah orang Bajo sebagai salah suku laut yang tertinggi kadar kemaritimannya. Meskipun demikian ada aspek yang kurang atau tidak tersentuh lantaran hasrat dan perbincangan tentang mereka larut dalam kenikmatan tradisinya. Aspek dimaksudkan ialah fenomena dinamika kehidupan (sosial budaya) pada beberapa unsur yang di sana-sini diperistiwakan oleh komunitas atau keluarga-keluarga Bajo hingga batas-batas tertentu. Fenomena dinamika kehidupan budaya orang Bajo itu banyak menyamai kalau bukan melebihi dari yang diperistiwakan kebanyakan komunitas petani, apalagi pemburu di darat. Itulah sebabnya dengan semua pencapaian atau prestasi seperti ini orang Bajo semestinya diberi apresiasi tinggi dan dipihaki dalam proses pengembangannya lebih lanjut tidak berbeda dengan kelompok-kelompok etnis sebangsa setanah air lainnya yang hidup di darat.

Tulisan menyajikan konsep dinamika sosial budaya dalam perspektif antropologi, dinamika sosial budaya Bajo dalam catatan sejarah dan antropologi, dinamika kelembagaan sosial ekonomi komunitas nelayan Bajo di Pulau Sembilan dan Kawasan Takabonerate (Sulawesi Selatan), dan mengarahkan dinamika kelembagaan sosial ekonomi sebagai penutup.

Material dari penulisan ini diambil secara selektif dari berbagai laporan penelitian lapangan yang dilakukan di desa nelayan dalam Kabupaten Pangkep dan Kodya Makassar, desa-desa nelayan Pulau Sembilan dan Tongke-Tongke (Sinjai) dan Kawasan Takabonerate (Selayar) Sulawesi Selatan dari paruh kedua periode 1990-an hingga tahun periode 2004, Kelurahan Dupa-Dupa Ternate (Maluku Utara) pada tahun 2005, dan *Gemeente Urk Provinsi Overijssel (Nederlands)* pada tahun 1986.

Perspektif Antropologi

Dari perspektif antropologi, terdapat dua alur proses dinamika sosial budaya, yakni alur proses evolusi dan alur proses difusi. Dari perspektif evolusionis, diasumsikan bahwa setiap masyarakat dengan individu-individu yang potensial mengembangkan mental kreativitas dan inovatifnya dalam wujud ide, tindakan/perilaku, dan teknologi. Bilamana ide, tindakan, atau teknologi yang diperkenalkan oleh individu-individu terbukti bermanfaat dalam pemungisian pemenuhan kebutuhan hidup, maka ini selanjutnya dipolakan atau ditradisikan dan dikembangkan lagi, bahkan didifusikan ke atau ditiru oleh kelompok-kelompok masyarakat di tempat-tempat lain yang menyukainya. Orang Bajo yang dikenal sebagai salah satu suku laut yang terkenal di Asia Tenggara, bahkan salah satu cikal bakal masyarakat bahari Nusantara di samping Bugis, Makassar, Mandar, Buton, dan Madura tentu juga merupakan hasil dari perkembangan evolusionis sosial budaya sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Dalam rangka mengembangkan masyarakat bahari, khususnya masyarakat nelayan Bajo, karena itu, perlu penggalian potensi sosial budaya terutama yang mengandung kearifan lokal dalam wujud pengetahuan, jiwa kreatif dan inovatif, kelembagaan sosial ekonomi, teknologi, dan praktik pemanfaatan sumberdaya laut.

Dari perspektif difusionis diasumsikan bahwa fenomena dinamika sosial budaya suatu masyarakat bersumber dari tempat-tempat lainnya. Jarang sekali adanya unsur-unsur budaya baru yang tidak memiliki sejarah atau cerita asal usulnya dari tempat-tempat lainnya. Sumber perubahan dan kemajuan yang berarti, karena itu, banyak berasal dari luar. Bagi orang Bajo yang dikenal sebagai pengembara di laut. Pengetahuan dan kepandaian membuat perahu dan melayarkannya sesungguhnya diwarisi dari ras Melayu-Polinesian Asia Tenggara ribuan tahun silam. Suatu pengembangan terencana dan terarah bagi kebanyakan masyarakat nelayan Bajo yang dalam kondisi statis dan miskin, karena itu, semestinya banyak diusahakan dengan belajar kepada masyarakat nelayan berkembang dan sejahtera di tempat-tempat lainnya, tanpa mengikis tradisi yang arif lingkungan dan sosial.

Kedekatannya Dengan Bugis dan Makassar

Orang Bajo adalah salah satu suku pelaut nomaden yang terkenal dan tersebar di segala penjuru Indonesia. Beberapa penamaan yang

mirip (Bajo, Bajau, Baju, Waju atau Bajoo) digunakan di berbagai tempat menunjukkan persebarannya yang meluas di seluruh Nusantara. Menurut sejarawan A.B. Lopian, asal usul orang Bajo dimungkinkan dari Zulu (Filipina), Johor (Malaysia), atau daerah Sabah.

Beberapa sejarawan Eropa menghubungkan orang Bajo dengan bangsa pelaut lain seperti Bugis, Makassar, dan Mandar di kawasan timur Nusantara, terutama dengan Tau-Wugi. Bahkan memiliki kekerabatan yang dekat dengan orang Wugi tersebut.

Di Sulawesi Selatan, menurut tradisi lisan, terdapat empat versi asal usul Bajo, yang semuanya menghubungkan orang Bajo dengan Luwu dan Mitologi Sawerigading, meliputi beberapa versi: versi *Jampea*, versi *Kayuadi*, versi *Appa'tana*, dan versi tulisan *lontara Ara*. Dalam kehidupan di laut, orang Bajo yang kaya tinggal di kapal yang disebut *vinta* (sejenis kapal cadik yang memiliki tiga atau empat penyangga). Di kawasan timur Nusantara, kebanyakan keluarga Bajo hidup di atas perahu yang disebut *bido*. Tidur, memasak, dan melahirkan keturunan mereka lakukan di atas perahu. Setiap keluarga inti/keluarga batih memiliki sebuah perahu.

Menurut Nimmo, susunan masyarakat Bajo asli yang masih tinggal di perahu dapat dibedakan dalam tiga tingkat: (1) *mataan*, (2) *pagmundah*, dan (3) *dakampungan*. *Mataan* adalah unit paling kecil yang terdiri dari unit-unit keluarga inti. Beberapa *mataan* membentuk sebuah *pagmundah*, dan beberapa *pagmundah* membentuk sebuah *dakampungan*. Kelompok kekerabatan *pagmundah* dipimpin oleh *nakura*. Adapun *dakampungan* dipimpin oleh *panglima*. Susunan masyarakat Bajo dalam kelompok-kelompok pemukiman terapung dan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di Bajoe Bone (kampung Bajo tertua), stratifikasi sosial masyarakat Bajo pada intinya ada empat: (1) *lolo same* (bangsawan tertinggi), (2) *Ponggawa Same* (bangsawan campuran), (3) *gallarang* (golongan masyarakat biasa), dan (4) *ate* (golongan sosial paling rendah). Di masa lalu, kedua golongan pertama menjadi pemimpin dan kurang terlibat dalam kegiatan melaut. Kedua lapisan terakhir yang menggeluti laut.

Masyarakat Bajo hidup bersimbiotik dan memiliki kedekatan hubungan, atau bahkan telah terjadi proses akulturasi atau adopsi sosial budaya dengan kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan Gowa dan Tallo Makassar dan dengan Kerajaan Bone Bugis.

Di abad ke-16 dan 17, pelaut Bugis dan Makassar telah mengikutsertakan sebagian orang Bajo dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Orang Bajo selebihnya telah jatuh dalam kondisi kemiskinan dan jauh dari wilayah kerajaan Bugis dan Makassar. Jauh sebelumnya, pelaut-pelaut Bugis dan Bajo dan Suku Mawken banyak memberi jasa kepada Kerajaan Sriwijaya dalam kegiatan pertahanan dan keamanan di laut Nusantara. Ada beberapa ciri orang Bajo melekat pada dirinya, dan menjadi faktor mereka tersebar, yaitu bahwa orang Bajo antara lain: (1) menyukai kedamaian; (2) berkelana tanpa membawa senjata; (3) sering diganggu oleh bajak laut; (4) tidak mempunyai kemampuan membela diri secara terorganisasi, karena faktor itulah yang membuat mereka tersebar hingga ke wilayah yang luas; (5) memiliki kecenderungan untuk tetap berkelompok, dan (6) menyingkir mencari tempat tinggal lain jika diganggu. Pandangan hidup orang Bajo, adalah tidak akan bahagia apabila hidup di darat, di laut mereka dapat segera memperoleh kebutuhan pangan tiap hari, lebih penting menangkap ikan daripada bersekolah

Fenomena dinamika sosial ekonomi komunitas Bajo di kawasan Timur Nusantara: menurut Broch, komunitas-komunitas Bajo di Bonerate (Sulawesi Selatan) dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara) adalah kelompok orang yang dinamis dan pandai mengusahakan kekayaan. Menurut Matsuzawa Yoshihiko, sebagian penduduk nelayan Bajo yang bercampur dengan penduduk nelayan Bugis, Makassar, dan lain-lain, menurut hasil survey sosial ekonomi sejak paruh kedua periode 1990-an, berada dalam kondisi ekonomi berkecukupan setara dengan kebanyakan keluarga Bugis dan Makassar sedesanya. Sebaliknya, keluarga-keluarga Bajo yang cenderung eksklusif kebanyakan dalam kondisi miskin dan statis. Dapat disimpulkan bahwa kedekatan hubungan orang Bajo dengan komunitas-komunitas etnis lain di Sulawesi Selatan, khususnya Bugis dan Makassar, membawa pengaruh berarti bagi proses dinamika sosial ekonominya.

Dinamika Kelembagaan Sosial Ekonomi

Berdasarkan literatur dan laporan penelitian ilmiah membuktikan bahwa komunitas nelayan Bajo pada umumnya dalam kondisi statis dan miskin, bahkan pada awalnya mereka menjadikan *bido'* (tipe perahu asli orang Bajo) sebagai rumahnya. Dari perspektif dinamika budaya, bahwa semua masyarakat di mana dan kapan pun cepat atau lambat pasti mengalami perubahan atau dinamika. Dari hasil penelitian

lapangan di Sinjai dan Selayar sejak paruh kedua periode 1990-an hingga tahun 2006, menunjukkan adanya beberapa komunitas nelayan Bajo yang berkembang hingga tingkat-tingkat tertentu, yang ditunjang dengan mental kreatif, inovatif dan adaptif terhadap unsur-unsur baru dari luar, bahkan arif lingkungan.

Fenomena umum yang terjadi bagi komunitas Bajo di Sulawesi Selatan antara lain: menempati rumah panggung model Bugis-Makassar di tepi pantai dan pulau-pulau; menjadi bagian dari sistem sosial pemerintahan formal desa atau kelurahan; beberapa diantara mereka mengembangkan usaha alternatif yaitu berkebun, beternak, berdagang kecil-kecilan; menguasai bahasa daerah setempat; kawin-mawin dengan orang etnis setempat; menjadi pegawai negeri; mengaku sebagai orang Bugis, Makassar atau Buton, serta mengadopsi teknologi kelautan, adat-istiadat, kesenian, agama, dan lain sebagainya.

Orang Bajo juga menerapkan kelompok kerja *Ponggawa-Sawi* sebagaimana yang dilakukan oleh orang Bugis-Makassar. Ini terlihat dari unit rumah tangga ke kelompok *Ponggawa-Sawi* model Bugis-Makassar, dari struktur hubungan kekerabatan sederhana ke struktur *patron-client* kompleks, dari diversifikasi tangkapan ke spesifikasi tangkapan, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pertukaran/pasar dan modal, dari teknologi sederhana khas Bajo ke teknologi model Bugis-Makassar dan modern, dari pendapatan langsung ke kas RT ke sistem bagi hasil pola *ponggawa-sawi*. Sebagian penduduk nelayan Bajo yang bercampur dengan penduduk nelayan Bugis, Makassar, dan lain-lain, berada dalam kondisi ekonomi berkecukupan. Beberapa orang menjadi *ponggawa*, bisa menyekolahkan anak, sudah menunaikan ibadah haji. Keluarga Bajo yang cenderung eksklusif kebanyakan dalam kondisi miskin dan statis.

Budidaya laut juga dilakukan, seperti pembesaran bibit lobster dan kerang (*japing*, mutiara) dalam keramba. Wawancara dengan Bapak Ruskimin mengaku sudah berkali-kali memanen lobster. Kemudian, H. Duskin sudah pernah mengambil biji-biji mutiara hasil budidaya kerangnya. Beberapa keluarga di Batang Lampe dan Kambuno pernah memanen rumput laut. Kemudian terbentuk hak-hak kontrol terhadap lokasi laut/lahan budidaya. pengelolaan usaha budidaya mencakup pula penjagaan terhadap praktik pembom dan pembiusan ikan. Pembiakan kerapu dan lobster di luar keramba bersumber dari pembibitan, Hal ini menyebabkan mulai tumbuhnya kesadaran

lingkungan dan hukum di kalangan nelayan.

Orang Bajo juga melakukan penanaman bakau berbasis pelestarian lingkungan. Ini studi kasus di Sinjai Timur. Penanaman bakau untuk perlindungan lokasi pemukiman dari ancaman ombak. Hingga tahun 1998, ketebalan hutan bakau telah mencapai 750 meter ke laut dan sepanjang pantai 5 km. Berdiri lembaga "Aku Cinta Lingkungan" (ACL), kemudian fungsinya meluas ke berbagai kebutuhan perlindungan perahu/ kapal dari terik matahari, perolehan tanah timbul untuk tanah perumahan, dan hutan bakau tempat perempuan mencari ikan, kepiting, tiram, serta perolehan tanah untuk lahan tambak dan perolehan kayu bakau untuk dijual dan bahan bangunan. Pohon bakau untuk bahan/kayu bakar, petak lahan bakau bisa dijual dengan harga mahal, dan daun bakau dijadikan makanan kambing

Mengarahkan Dinamika Kelembagaan Sosial Ekonomi

Beberapa yang harus mendapat perhatian dalam mengarahkan dinamika kelembagaan sosial ekonomi komunitas Bajo sebagai berikut:

1. Penguatan dan pengakuan terhadap eksistensi orang Bajo sebagai salah satu suku laut dalam NKRI setara dengan eksistensi ratusan etnis besar dan kecil lainnya di darat. Untuk itu semestinya dilakukan revitalisasi dan pengembangan potensi sosial budaya sebagai salah satu asset kekayaan budaya bangsa.

2. Melakukan program pemberdayaan dengan penataan perkampungan Bajo di tepi laut, rekonstruksi perahu *vinta*, *bido*, dan *jarangka* sebagai penguatan identitas budaya Bajo dalam kerangka *Bhinneka Tunggal Ika*.

3. Pengembangan kelembagaan sosial ekonomi yang berbasis lokal dengan modifikasi lembaga *pongawa-sawi* pada komponen-komponen hak kepemilikan usaha, sistem bagi hasil, dan lain-lain.

4. Pelatihan tentang pengelolaan pengembangan modal yang diarahkan pada perikanan tangkap arif lingkungan, usaha budidaya laut, dan menjadikan kawasan terumbu karang (kawasan Taka Pulau Sembilan, kawasan Takabonerate, kawasan terumbu karang Kepulauan Spermonde, Wakatobi, dan lain-lain) sebagai hak wilayah kelola suku Bajo. Untuk itu, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan formal kejuruan perikanan laut berbasis lokal dan modern dengan SPP rendah

dan rangsangan beasiswa.

5. Pengembangan usaha produktif alternatif terkait perikanan yang memberikan kesempatan kerja kepada kaum perempuan.

6. Melibatkan orang Bajo dalam program studi banding ke komunitas-komunitas nelayan lain yang sejahtera.

7. Melibatkan generasi muda Suku Bajo dalam satuan tugas pertahanan dan keamanan laut melalui pendidikan kejuruan pelayaran dan kemiliteran.

B. Diskusi

Pertanyaan

1. Simon Petrus

Dalam masyarakat tradisional pandai membaca tanda zaman. Semuanya ada di langit, seperti penanggalan Toraja: *Allo manuk*. Orang Bajo begitu hebat karena berpedoman pada bintang dan tanda-tanda alam, bagaimana dengan orang Bajo dalam membaca tanda-tanda alam?

2. Syaifuddin Bahrum

Selalu ada keprihatinan bahwa budaya lokal kita akan habis atau lenyap termakan oleh arus modernitas yang tidak dapat kita hindari. Memikirkan bagaimana keberlanjutan tentang kearifan lokal yang bisa sama-sama hidup dengan perkembangan teknologi dan arus modernitas. Dalam strategi kebudayaan kita, banyak kasus memperlihatkan lompatan-lompatan kebudayaan. Misalnya terjadi pada masyarakat nelayan penangkapan ikan tradisional ke modern. Dengan masuknya teknologi modern menggantikan teknologi tradisional secara tiba-tiba kita meninggalkan teknologi tradisional. Ini adalah suatu hal yang sesungguhnya menyedihkan karena tiba-tiba teknologi tradisional terlupakan. Kemudian, kita tidak pernah memeriksa sistem pendidikan di mana setiap wilayah disamakan mata pelajarannya sehingga pengetahuan lokal dan teknologi yang ada di masyarakat terabaikan. Pendidikan yang ada di kota sama dengan yang ada di pedalaman, terjadi semacam generalisasi dalam kurikulum kita. Kita tidak punya keberanian untuk

membedakan kurikulum di setiap wilayah, dengan tentu saja payung ilmunya tetap sama. Jadi bagaimana strategi kebudayaan kita agar teknologi tradisional tidak serta-merta dilupakan begitu saja? Bagaimana peran pendidikan di dalamnya? Saya harap lokakarya ini dapat merekomendasikan solusi dalam menghadapi persoalan strategi kebudayaan.

3. Ilham

Saya pernah meneliti tentang sosial ekonomi masyarakat Bajo di Kabupaten Bone. Masyarakat Bajo di sana tidak tinggal lagi di tengah laut. Masyarakat sudah melakukan perkawinan silang dengan masyarakat lain. Dari struktur orang masyarakat Bajo: mereka hidup berlembaga, namun kelembagaan mereka dimanfaatkan oleh *pongawa* Bugis, mereka dimodali oleh *pongawa* sehingga mereka tidak dapat berkembang, walaupun juga saya menemukan orang Bajo yang kreatif dalam mengembangkan hidupnya. Berkenaan dengan kelembagaan masyarakat dan kearifan lokal, apakah itu terjadi sejak dulu? Selanjutnya menyangkut tentang pelaut, saya juga seorang anak pelaut, saya pernah merasakan dari Tanjung Padang ke Surabaya. Pada saat itu hari satu *Muharram*, biasanya ditempuh satu hari akhirnya sampai setengah bulan. Selanjutnya dikaitkan tanda-tanda langit, mereka memanfaatkan tanda-tanda langit.

Jawaban Pemakalah

1. Kalau dikatakan kearifan lingkungan terjadi sejak lama, itu boleh saja terjadi, tapi hal itu juga bisa muncul sekarang ini. Menurut saya kearifan adalah suatu proses yang bisa muncul setiap saat, baik terjadi pada masa lampau maupun sekarang. Kearifan bisa muncul karena berbagai sebab. Misalnya, orang Bajo mengambil teripang dengan menyelam menggunakan ketahanan nafas lalu menombak secara tiba-tiba, 2 atau 3 ekor teripang baru mengambil nafas lagi. Itu artinya tidak akan terjadi penghabisan persediaan, kemudian air laut tidak tercemar, itu karena bila ditombak teripang tidak mengeluarkan racun sehingga tidak merusak lingkungan. Dengan cara itu air tidak tercemar oleh racun teripang. Tetapi ketika permintaan pasar meningkat mereka harus menggunakan sarana modern seperti tabung, kompresor dan akhirnya air laut tercemar sehingga

dalam 5 tahun menyebabkan populasi teripang itu punah, dan air laut tercemar. Jadi disamping mencemarkan air juga menghabiskan populasi teripang.

2. Kemudian contoh lain, dulu orang Bajo menggunakan pancing kemudian bergeser pada penggunaan bom dan bius. Orang Bajo bisa menggunakan itu bom dan bius karena terpaksa untuk memenuhi tuntutan pasar. Akan tetapi pada awalnya mereka menggunakan bom tidak sampai meledak di dasar laut, hanya di atas. Akan tetapi setelah ditakuti oleh petugas akhirnya mereka melakukan memboman di dasar laut agar tidak terdengar.
3. Kearifan lingkungan tidak saya jelaskan sampai kepada sifatnya yang mistik tapi saya bisa jelaskan secara empirik. Modernisasi sebetulnya terjadi pada jenis perahu, penggunaan mesin tapi pada alat tangkap sangat sedikit yang bisa menggantikan konstruksi masa lalu. Kemudian kearifan lingkungan adalah suatu ide, teknologi, kepercayaan yang bisa mendatangkan keuntungan tetapi tidak merusak laut serta tidak mengikis kepercayaan dan keyakinan. Jangan terlalu mendewakan sesuatu di masa lalu itu bagus sepanjang itu tidak merugikan sosial, agama dan sebagainya. Pengetahuan mereka adalah pengetahuan praktis, yaitu apa yang difikir, dilihat dan dirasakan. Pengetahuan *pakkita* (penglihatan), pengetahuan *pepenadding* (rasa).

SISTEM PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS BAHARI

Pemakalah:

Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si.

Moderator:

Dra. Dade Pratuntari, M.Si.

Notulis:

Drs. Faisal, M.Si.

A. Paparan

Makalah yang memuat sistem pengetahuan dan kepercayaan bahari ini berkaitan erat dengan navigasi tradisional dan kepercayaan lokal pelaut ulung dari Tanjung Bira di Sulawesi Selatan. Navigasi tradisional adalah pengetahuan praktis yang terbentuk dan tumbuh kokoh di atas landasan kepercayaan yang dianut dari masyarakat pemakainya. Karena itu suatu kekeliruan besar jika kemudian sistem pengetahuan lokal ini dipandang sebagai penghalang modernisasi teknologi.

Teknologi di negara-negara berkembang yang pada umumnya diimpor dari luar atau "transfer teknologi" tidak menunjukkan "kebertubuhan" dengan teknologi dan budaya lokal termasuk dengan lingkungan alam di mana teknologi yang bersangkutan diterapkan. Akibatnya tidak heran jika kemudian kehadiran teknologi itu justeru berdampak pada "perampokan" budaya lokal, hak-hak ekonomi masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Sebuah "teknologi yang tak berwajah kemanusiaan".

Sistem pengetahuan navigasi tradisional dari komunitas pelaut Tanjung Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, terdiri atas: (1) seperangkat pengetahuan tentang pembuatan perahu, yakni sebuah pengetahuan teknis yang secara khusus dimaksudkan untuk membangun perahu, baik untuk perahu *pakkaja* (nelayan), maupun untuk perahu *pasompe* (pelaut pedagang), dan (2) seperangkat pengetahuan teknis tentang pelayaran perahu (*pa'lopian*), dengan menggunakan tenaga angin sebagai sumber penggerak utamanya.

Terdapat tiga hal yang substansial yang harus difahami dalam navigasi tradisional dalam pelayaran perahu Pinisi, yakni: (1) pemahaman terhadap angin, khususnya yang bertalian dengan angin yang menjadi sumber penggerak utama pelayaran; (2) penggunaan alat bantu: peta *Kar*, kompas, dan simbolisasi alam, dan (3) pengendalian perahu atas dasar informasi alam (khususnya pengetahuan tentang angin sebagai sumber tenaga penggerak pelayaran).

Pemahaman Terhadap Alam: Angin sebagai Sumber Tenaga Penggerak Pelayaran

Dalam pemahaman masyarakat bahari, angin diklasifikasikan atas angin *muson* (angin Barat dan Timur) dan angin lokal (angin darat dan laut). Angin *muson* yang bertiup dari Kawasan Barat ke Kawasan Timur secara lokal disebut "angin Barat", sebaliknya angin *muson* yang bertiup dari Kawasan Timur ke Kawasan Barat secara lokal disebut "angin Timur". Kedua jenis angin *muson* ini masing-masing berlangsung selama enam bulan secara bergantian dalam setiap tahun. Pada saat angin Barat bertiup biasanya disertai dengan hujan yang tinggi, karena itu disebut pula musim penghujan (Musim Barat) dan pada saat angin Timur bertiup hampir dapat dipastikan tidak terjadi hujan atau kurang hujan karena itu disebut pula musim kemarau (Musim Timur). Pada setiap musim, dikenal dua kelompok mata angin yang secara bergantian bertiup-bersilangan mewarnai musim yang sedang berlangsung. Pada Musim Barat dikenal kelompok mata angin (Barat Laut, Barat-Barat Laut, Utara Barat Laut) yang bertiup dari Kawasan Barat di atas Garis Khatulistiwa bergerak lurus menuju Kawasan Timur dan kelompok mata angin (Selatan Daya, Barat Daya, dan Barat-Barat Daya) yang bertiup dari Kawasan Barat di bawah Garis Khatulistiwa menuju Kawasan Timur. Begitu pula pada Musim Timur juga dikenal kelompok mata angin (Utara Timur Laut, Timur Laut, dan Timur Timur Laut) yang bertiup dari Kawasan Timur di atas Garis Khatulistiwa bergerak menuju Kawasan Barat, dan kelompok mata angin (Timur *Manunggara*, *Tunggara*, dan Selatan *Manunggara*) yang bertiup dari Kawasan Timur di bawah Garis Khatulistiwa bergerak menuju Kawasan Barat.

Penggunaan Alat Bantu: Peta *Kar*, Kompas, dan Simbolisasi Alam

Peta *Kar* (*Kara*) menyediakan informasi tentang sejumlah pulau

kecil, batu karang, dan kedalaman air laut, yang terkadang tidak dapat diantisipasi dalam pelayaran, sehingga tidak jarang perahu dapat tenggelam atau terdampar karenanya. Peta *Kar* selain sebagai sumber informasi, dan melalui alat bantu lainnya yang secara lokal disebut *juku-juku* (duplikat kompas), dipergunakan sebagai alat utama dalam penentuan jalur pelayaran, khususnya pada pelayaran antarpulau atau pelayaran di laut lepas. Cara penggunaannya adalah dilakukan dengan menempatkan *juku-juku* tersebut pada posisi pulau asal, lalu kemudian ditarik benangnya ke arah garis lurus pada pulau yang dituju.

Dengan memperhatikan arah dan kekuatan angin, arus dan gelombang, maka dapat ditarik garis (ke arah sebelah kanan garis benang bila arah angin dari Timur dan atau ke sebelah kiri garis benang bila arah angin dari Barat), yang selanjutnya ditetapkan sebagai jalur yang harus dilalui dalam pelayaran. Semakin kuat angin bertiup, arus, dan gelombang, maka garis jalur pelayaran tersebut juga semakin di arahkan (secara berlawanan) dengan arah angin, arus, dan gelombang yang bersangkutan. Proses penetapan jalur pelayaran yang dilakukan secara berlawanan dengan arah angin, arus, dan gelombang, dalam istilah lokal disebut *allinjai*, sebuah proses pengambilan keputusan dalam penetapan jalur pelayaran atas dasar pertimbangan kekuatan hembusan angin, arus, dan gelombang.

Simbolisasi Alam di Malam Hari

Pertama, bintang. Terdapat enam jenis bintang yang dapat dijadikan sebagai penunjuk arah dalam pelayaran. Keenam jenis bintang itu adalah: (1) bintang *bahi*, biasanya terbit pada jam 19.00 Wita dan tepat berada pada posisi Barat; (2) bintang *lohe*, biasanya terbit pada jam 04.00 Wita (subuh hari) dan tepat berada pada posisi Timur; (3) bintang *balu*, biasanya terbit pada jam 22.00 Wita dan tepat berada pada posisi Selatan, ketiga jenis bintang itu masing-masing hanya berjumlah satu buah; (4) bintang *tallu*, biasanya terbit pada jam 21.00 Wita, berjumlah tiga buah dan tampak berbentuk segitiga, dan berada pada posisi Barat-Barat Laut; (5) bintang *sapo sala*, biasanya terbit pada jam 04.00 Wita bersamaan dengan bintang *lohe*, berjumlah empat buah dan tampak posisinya berbentuk segi empat, berada pada posisi Timur Laut, dan (6) bintang *purung-purung*, biasanya terbit pada jam 22.00 Wita, berjumlah banyak dan tampak bagaikan kerumunan, serta tepat berada pada posisi Timur *Manunggara*.

Kedua, kilat. Kilat tidak hanya sekedar sebagai penunjuk arah tetapi juga sekaligus dapat berfungsi sebagai penunjuk bahaya. Bagi pelaut, setiap pancaran kilat memiliki arti tersendiri. Bila kilat memancar secara vertikal, hal itu berarti di tempat itu terdapat pulau besar, sehingga terhadapnya perlu mengarahkan pelayaran ke arah yang bersangkutan, dan bila kilat memancar secara horizontal, hal itu berarti pada tempat itu terdapat pulau kecil atau terumbu karang atau pun lautnya dangkal, sehingga terhadapnya perlu diwaspadai.

Ketiga, bunyi. Bunyi yang dimaksud adalah bunyi gesekan badan perahu dengan kemungkinan dangkalnya perairan sekitar pelayaran, terutama di malam gelap gulita. Bila terdengar bunyi *swit ...* berarti pelayaran perahu berada di sekitar perairan dangkal atau lumpur dan karena itu perlu mengendalikan perahu ke arah yang lebih dalam, dan bila terdengar bunyi *tak, tak, tak ...* maka hal itu berarti perairan di sekitar pelayaran terdapat terumbu karang dan harus segera mengendalikan perahu agar tidak terdampar.

Keempat, bau. Bagi pelaut, bau daratan dan lautan masing-masing memiliki kebauan yang spesifik. Daratan pada umumnya lebih berbau buah-buahan dan dengan bau itu memberi indikasi bahwa pelayaran telah mendekati *puntana* (pulau yang dituju). Sedang lautan pada umumnya berbau amis, terlebih jika mendekati pulau kecil atau terumbu karang, dan dengan bau itu memberi peringatan bahwa pelayaran harus segera dikendalikan agar terhindar bahaya.

Simbolisasi Alam di Siang Hari.

Pertama, Warna Permukaan Laut yang meliputi : Warna hitam, biru, dan abu-abu. Permukaan air laut yang berwarna biru kehitaman memberi indikasi bahwa lokasi perairan yang bersangkutan memiliki kedalaman lebih dari 500 meter dan hal ini berarti lampu hijau atau pelayaran berada pada daerah yang aman. Kedua, Permukaan air laut yang berwarna biru langit memberi indikasi bahwa lokasi perairan yang bersangkutan memiliki kedalaman antara 30 sampai dengan 500 meter dan hal ini berarti lampu kuning atau pelayaran harus segera berhati-hati. Selanjutnya, permukaan air laut yang berwarna abu-abu kehijauan (*pussa'*) memberi isyarat bahwa pelayaran berada pada jalur yang amat berbahaya, karena berada pada kedalaman perairan kurang dari 30 meter, dan karena itu pula perahu harus dikendalikan secara perlahan-lahan sambil mendeteksi kedalaman secara berulang-ulang, dengan

bantuan peralatan yang secara lokal disebut *ladung* (besi dengan berat 0,5 kg yang diikat dengan seutas tali).

Kedua, matahari. Bilamana kompas tidak berfungsi atau tidak ada sama sekali, maka posisi matahari dapat berfungsi sebagai penunjuk arah dalam pelayaran. Sebagaimana pergerakan alamiahnya, matahari selalu bergerak dari Timur ke Barat dan dengan posisi ini akan sangat membantu dalam mengoreksi apakah pelayaran tetap berada pada jalur yang ditetapkan.

Ketiga, angin, arus, dan gelombang. Ketiga benda alam ini bagaikan tiga sekawan yang selalu bergerak searah yang pada umumnya berada di bawah pengaruh musim (Musim Barat atau Timur) dan kondisi (alur) geografis kepulauan. Pengaruh musim terhadap pergerakan ketiga benda alam itu terutama pada perairan laut lepas, sedang pengaruh geografis terutama pada alur pelayaran sekitar perairan pantai. Berdasarkan pengaruh musim dan kondisi geografis, para pelaut menklasifikasikan arus dan gelombang tersebut berdasarkan kekuatannya: (1) arus dan gelombang kecil, jika kekuatannya sangat lemah atau sesuai dengan keadaan angin yang bertiup secara normal, (2) arus dan gelombang sedang, yang umumnya terjadi berselang 2 - 3 hari setelah angin penggerakannya bertiup, dan (3) angin dan gelombang besar, yakni jenis arus dan gelombang yang kekuatannya paling besar, dan biasanya berlangsung pada bulan Januari (pada Musim Barat) dan bulan Agustus (pada Musim Timur). Bagi para pelaut, jenis arus dan gelombang yang ketiga ini kerap kali dihindari, terlebih jika berlangsung pada puncak Musim Barat, ditandai dengan curah hujan yang tinggi, disertai dengan angin yang sangat kencang.

Selanjutnya, angin sebagai penggerak utama arus dan gelombang juga diklasifikasikan atas tiga, yakni : (1) angin biasa, yaitu jenis angin yang paling lemah kekuatannya dibanding dengan jenis angin lainnya, (2) angin sedang, yaitu jenis angin yang sebelum bertiup tampak kehitam-hitaman dari kejauhan (di atas permukaan air laut), dan (3) angin berbahaya, yaitu jenis angin yang pada saat sebelum bertiup nampak terlihat seperti kabut di atas permukaan air laut. Bagi para pelaut, jenis angin yang ketiga ini perlu mendapat perhatian dalam pengertian bagaimana menyesuaikan antara keadaan angin yang berbahaya itu dengan pergerakan perahu sehingga dapat terhindar dari malapetaka di laut.

Pengendalian Perahu : Bagaimana Melayarkan Perahu/Pelayaran

Pertama-tama yang harus difahami dalam pengendalian perahu adalah bahwa perahu yang dikendalikan harus diasumsikan berada pada posisi di tengah pusat lingkaran penjuror mata angin. Dari sini kemudian baru perahu mulai digerakkan dengan langkah-langkah yang dimulai dari: (1) menetapkan jalur pelayaran; (2) menarik jangkar; (3) mengembangkan layar, dan (4) mengendalikan perahu berdasarkan arah mata angin, arus dan gelombang.

Setelah itu layar dikembangkan secara bertahap mulai dari layar depan (*cocoro*), dilanjutkan dengan layar tengah (*sombala bakka*), diikuti layar belakang (*sombala ri boko*), dan masing-masing layar atas depan (*tampase're riola*) dan layar atas belakang (*tampase're ri boko*). Ketika semua layar telah dikembangkan, maka perahu mulai di arahkan berdasarkan arah mata angin dan arah tempat tujuan pelayaran. Jika jalur pelayaran yang akan dilayari bertolak dari Selatan ke Utara (sebutlah dari Surabaya ke Banjarmasin) dengan arah angin bertiup dari Timur ke Barat, maka pengendalian perahu dilakukan dengan cara *attunggeng*: mencari posisi awal untuk kemudian terus melaju menuju ke Banjarmasin. Tetapi jika ternyata arah angin yang sedang bertiup tepat berasal dari Utara, hal itu berarti pengendalian perahu harus berlawanan dengan arah angin, pengendalian perahu dengan cara seperti ini secara lokal disebut *akkarakkaji*: menggerakkan perahu secara *zig zag* seraya menantang kehendak alam. Baik *attunggeng* maupun *akkarakkaji*, keduanya dimaksudkan agar semua layar dapat berfungsi secara optimal dan perahu dapat melaju secara optimal pula.

Bertalian dengan gerakan gelombang, terdapat tiga gerakan pengendalian perahu yang umumnya dihindari oleh para pelaut, yakni : (1) gerakan mengikuti arah gelombang atau membiarkan perahu berjalan searah gelombang, (2) gerakan yang melawan arah gelombang atau menghadapkan perahu ke arah gempuran gelombang (*nipasumpala'*), dan (3) gerakan perahu yang merintanggi gelombang secara horizontal atau membiarkan perahu berjalan di atas gelombang. Dalam pengalaman para pelaut, gerakan yang benar adalah gerakan yang sedikit merintanggi arah gelombang (membuat sudut 45 derajat dari arah datangnya gelombang) atau apa yang secara lokal disebut *nipikinrissi bombanginya*. Bila ada pelaut yang mengendalikan perahu dengan cara salah satu dari ketiga gerakan perahu yang harus dihindari

tersebut di atas, maka kerap kali terjadi patah tiang, putus tali temali, layar sobek, dan bahkan dapat membalikkan perahu atau tenggelam.

SISTEM KEPERCAYAAN:

Akar-akar Kepercayaan Komunitas Bahari

Dalam komunitas bahari dikenal ada musim perkawinan dan musim industri rumah tangga. Musim perkawinan berlangsung ketika kondisi alam tidak memungkinkan untuk berlayar, secara lokal disebut Musim Barat dan musim industri rumahtangga berlangsung ketika pelayaran sedang berlangsung, secara lokal disebut Musim Timur atau disebut pula Musim Pelayaran. Pada Musim Timur, seluruh anggota keluarga dalam komunitas bahari terbatas dirinya (berpantangan) untuk keluar rumah dan karena itu agar tidak jenuh di dalam rumah, mereka pada umumnya bertenun sarung bercorak lokal (*lipa' nijai dan lipa' samarinda*), menjahit bordir (*assulan*), dan membuat kue benang-benang (*uhu'-uhu'*) yang dapat bertahan lama hingga bertahun-tahun.

Menjelang keberangkatan, segera dilaksanakan tradisi *appassili* (tradisi tolak bala) dilakukan di atas perahu. Setelah tradisi *appassili lopi* yang diartikan sebagai upaya pencegahan secara gaib agar perahu dapat terhindar dari malapetaka laut, doa juga dilantunkan oleh seorang *pinati* (pembaca doa, guru mengaji atau Imam Kampung). Puncak tradisi kegaiban bagi para pelaut dilakukan di hari keberangkatan. Suami dan isteri, anak (pelaut) dan ibunya, berjabat tangan secara sakral di atas selempang kain putih atau sekurang-kurangnya di atas *sajadah*, duduk berhadapan, berkonsentrasi penuh, membaca kalimat *syahadatain*, dimana yang dituakan (suami atau ibu) mengucapkan kalimat syahadat pertama lalu kemudian dilanjutkan secara bersambung oleh yang lebih muda (isteri atau anak) dengan kalimat syahadat yang kedua, dan seterusnya dilanjutkan dengan lantunan doa bersama kepada Tuhan agar keduanya tidak terpisahkan (oleh kematian) sebelum mereka berjumpa lebih dahulu, sekalipun para pelaut yang bersangkutan tertimpa malapetaka laut.

Baik tradisi *appassili*, tradisi *assongko bala*, maupun tradisi *baiyat* dengan kalimat *syahadatain* tersebut di atas, ketiganya adalah dimaksudkan untuk memperkuat batin (jiwa) secara internal. Karena itu jika perahu telah direparasi, layar telah dipersiapkan dengan baik (penguatan secara eksternal), lalu kemudian dilanjutkan dengan tradisi *appassili*, *assongko bala*, dan *baiyat* keluarga (penguatan secara

internal), maka bagi pelaut dipandang telah siap mengarungi lautan.

Sumber Kepercayaan

Seluruh tradisi kebaharian pada awalnya bersumber dari kepercayaan pra-Islam (animisme dan dinamisme), yang dalam perkembangannya kemudian tetap "dipelihara" oleh "Islam Awal". Islam Awal (Sufisme) yang juga bernuansa mistik-kegaiban tetap memberi toleransi terhadap seluruh pelaksanaan tradisi kebaharian, terkecuali substansi dan bacaan doanya, yang sebelumnya berupa mantera-mantera, kemudian diganti dengan doa-doa keselamatan yang dilandasi oleh ke-*tauhid*-an dalam Islam. Jika sebelumnya mantera-mantera ditujukan pada roh gaib ("penguasa bumi dan laut"), maka setelah Islam datang, doa-doa keselamatan dilantunkan dan hanya semata-mata ditujukan kepada *Allah Ta'ala* dan *Rasulullah SAW*, sebagaimana makna yang terucapkan dalam kalimat *syahadatain*.

Akan tetapi kemudian karena model pengislaman sufi (yang ditokohi oleh Dato' ri Tiro yang mengislamkan Bugis Makassar, yang secara khusus mengambil wilayah peng-Islam-an di bagian Timur dan Selatan Sulawesi Selatan) menggunakan "model peng-Islam-an lunak" sesuai dengan tradisi mistik yang berlangsung di sana, maka upaya peng-Islam-annya tidak dapat berlangsung "sempurna-dewasa". *Tawasul* (sistem perwakilan) dalam permohonan doa dan pelibatan roh-roh keluarga yang telah lama meninggal juga tetap turut "dihadirkan" dalam setiap pembacaan doa, bahkan tidak jarang justru roh-roh gaib tersebut juga diminta agar doa mereka dilanjutkan dan dimintakan kepada Tuhan, termasuk pada roh Dato' ri Tiro melalui kunjungan-ziarah di pemakamannya.

Penutup

Sebagai penutup disampaikan bahwa kehadiran modernisasi ke dalam masyarakat bahari, yang dikenal dengan istilah motorisasi atau yang disebut "Teknologi Percepatan Pelayaran" secara perlahan-lahan telah mencopot layar perahu Pinisi. Mula-mula layar belakang (*sombala ri boko dan tampase're ri boko*) dan dua layar depan (*cocoro' ri olo dan cocoro' tangga*) dicopot karena dianggap sudah tidak relevan, sehingga yang bertahan hanya layar tengah (*sombala bakka'*), layar atas depan (*tampase're ri olo*) dan layar depan besar (*cocoro' bakka'*). Bukan hanya itu, ketiga layar yang dipertahankan tersebut juga

semakin diperkecil ukurannya seiring dengan peningkatan kapasitas mesin penggerak pelayaran, dan akhirnya sekarang ketiga layar itu hanya berfungsi sebagai simbol untuk mengelabui petugas pelabuhan agar pajak mereka tidak disamakan dengan kapal-kapal mesin lainnya. Di sinilah muncul istilah baru dalam pelayaran, yakni Perahu Layar Motor (PLM), meski sesungguhnya secara fungsional tepatnya adalah Perahu atau Kapal Motor (KM).

Ke depan, jika budaya kebaharian ingin menjadi kebanggaan nasional, maka penggunaan motorisasi harus dapat dipertahankan sampai pada tingkat di mana navigasi tradisional yang menjadi kebanggaan bangsa harus tetap dipertahankan.

B. Diskusi

Pertanyaan

1. Surya Yuga

Saya yakin terdapat pedoman tentang tanda-tanda alam untuk pelayaran. Pasti ada juga tanda-tanda alam untuk menangkap ikan. Sultan terakhir Kutai Kertanegara, seharusnya tidak seperti Sultan namun seperti nelayan dengan pakaian yang lusuh namun selalu memperoleh ikan lebih banyak. Hal ini karena ada amalan, dalam waktu 40 hari tidak putus harus mancing, kalau tidak di sungai, di gelas pun jadi, sambil membaca *shalawat nabi*. Setelah 40 hari mancing di sungai, ikan yang pertama didapat disobek ekornya kemudian dilepas. Ikan pertama itu memanggil temannya sampai terakhir ketemu dengan ikan yang sobek tadi, maka pemancingan dihentikan. Saya mendengar di Bulukumba seorang saudagar yang sangat kaya yang dapat mendeteksi di mana banyak ikan, tapi pantangan tidak boleh keluar dari lokasi itu, jadi ada amalan yang tidak pernah kita tahu. Jadi apakah ada amalan-amalan yang dilakukan atau dengan membaca tanda-tanda alam itu untuk dapat menangkap ikan yang banyak?

2. Ilham

Menyangkut tentang pelaut, saya juga seorang anak pelaut, saya pernah merasakan dari Tanjung Pandang ke Surabaya. Pada saat itu hari satu Muharram, biasanya ditempuh satu hari

akhirnya sampai setengah bulan. Selanjutnya dikaitkan tanda-tanda langit, mereka memanfaatkan tanda-tanda langit. Bagaimana menurut Bapak berkenaan dengan kepercayaan-kepercayaan seperti ini, apakah dikategorikan suatu kearifan?

Tanggapan Pemakalah:

1. Jangankan ilmu pengetahuan, dalam agama pun mengajarkan kita agar kita harus belajar tentang astronomi. Seorang pelaut jika melihat ke langit pada pukul 21.00 ada bintang *tallu*, jam 19.00 bintang *bahi*, *sapo sala* pada jam 4 subuh dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu pengetahuan yang digunakan oleh pelaut ketika berada di laut lepas. Pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pengalaman-pengalaman pendahulu mereka. Dalam komunitas bahari, terdapat beberapa istilah, seperti *pallawa*, *pakkaja* adalah mereka yang ke laut untuk menangkap ikan. Kemudian *passompe* adalah orang yang berdagang, menggunakan laut untuk media transportasi. Keduanya memiliki pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun. Mereka memiliki pengetahuan untuk menangkap ikan dan pengetahuan dalam menggunakan lau sebagai infrastruktur atau sarana transportasi. Mereka mempercayai hari-hari baik dalam beraktivitas.
2. Dalam hal mistik dalam masyarakat banyak sekali, mereka dikelilingi pemikiran mistik dalam melaut yang dianggap dapat menentukan banyak tidaknya menangkap ikan. Kita ini memang lebih banyak "*jumping*" sebagai kutu loncat. Kita menghadirkan yang baru tetapi menyingkirkan yang lain. Dalam filosofi kita *Bhinneka Tunggal Ika*, itu berarti konsep persatuan bukan kesatuan. Inilah menjadi dasar kita semua mau diseragamkan. Saya sependapat dengan Syaifuddin bahwa terlalu banyak penyeragaman sehingga kita melupakan ke-*bhinneka*-an.
3. Kemudian, menurut saya sejak kita dipaksa untuk ke darat oleh kolonial, kita lupa dengan laut. Ketika laut maju, darat pun terangkat. Terakhir, saya yakin bahwa -mau tidak mau atau suka atau tidak suka- ke depan kita akan ke laut.



HASIL ORIENTASI LAPANGAN

Gambaran umum

Salah satu suku laut terbesar keberadaannya di Indonesia adalah Suku Bajo, yang sampai sekarang tidak diketahui secara pasti dari mana asal muasalunya. Namun dari berbagai sumber dan informasi dapat diketahui, bahwa masyarakat Bajo konon berasal dari kepulauan Sulu di Filipina Selatan, sejak masa prasejarah menyebar ke kepulauan Riau, Maluku, pesisir Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Jayapura sampai ke Pulau Komoro. Masyarakat Bajo yang tersebar di Nusantara ini adalah satu kesatuan sosial atau kelompok masyarakat yang dapat ditemukan di daerah kepulauan, pesisir pantai dan perairan laut yang mendiami desa-desa di pesisir pantai, teluk, selat dan perairan laut.

Keberadaan suku laut lainnya adalah Suku Sawang yang tersebar di Kepulauan Bangka dan Belitung, yaitu Pulau Mendanau, Pulau Baguk, Juru Seberang, Ulim, Belantu, Gantung dan Manggar. Sama halnya dengan Suku Bajo, asal usul Suku Sawang ini diperkirakan berasal dari kepulauan Sulu di Filipina Selatan, menyebar ke Brunei, Kalimantan Utara, Semenanjung Malaya hingga ke perairan kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Sejak abad ke-16 atau 17 Masehi terdapat kelompok yang menamakan dirinya orang-orang perahu, yang dalam publikasi Barat kelompok ini dikenal dengan nama *sea nomads*, *nomadic boat people*, *sea gypsies*; sedangkan para pedagang Portugis menyebut

mereka *celates*. Orang Laut di Bangka Belitung dulunya dinamai orang Sekak, Sekat, atau Sika, namun penamaan *sekak* tersebut kurang disukai oleh mereka karena mengandung arti 'primitif' atau 'terbelakang' sehingga mereka menamakan diri mereka sebagai Suku Sawang. Pendapat lain mengatakan bahwa Suku Laut di Belitung yang dikenal dengan sebutan Suku Sekak berasal dari Suku Sakai di Teluk Lanoa, Filipina. Pendapat lainnya mengacu pada struktur kelembagaan '*batin*' (Kepala Suku) Suku Sawang di Belitung identik dengan istilah '*batin*' dalam Suku Sakai.

Sejak berdirinya pertambangan timah oleh Belanda, banyak orang Sawang yang terkenal ulet dan kuat ini dipekerjakan sebagai buruh tambang, sehingga sebagian besar orang Sawang mulai bertempat tinggal jauh dari pantai. Dan kondisi ini ditambah dengan kebijakan pemerintah Belitung dalam program pengembangan Komunitas Adat Terpencil tahun 1970-an, yang melakukan relokasi pemukiman ke darat yang telah merubah pola pikir dan pola usaha Suku Laut.

Gambaran umum dari aspek epistemologis dan aksiologis, memperlihatkan bahwa sebagian komunitas masyarakat Suku Bajo dan Suku Sawang masih tetap beraktivitas sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari melaut; hidup dengan tingkat kesejahteraan yang rendah; sebagian masih tetap patuh dan yakin dengan kepercayaan terhadap nilai-nilai sakral dan kekuatan supranatural penguasa laut.

IDENTITAS SUKU BAJO di Dusun Mola Samaturu, Mantiggola dan Sampela Kabupaten Wakatobi

Masyarakat Suku Bajo yang menetap dan hidup di Desa Mola Samaturu, Mantiggola dan Sampela pada umumnya masing-masing merupakan keluarga besar, karena dalam satu rumah rata-rata dihuni 7 sampai 9 orang, jadi bukan keluarga batih.

Latar pendidikan orang dewasa masyarakat Bajo pada umumnya hanya tamat SD, kecuali anak-anak remaja cukup memadai, karena tersedianya sarana pendidikan formal yang dapat menampung anak-anak untuk belajar mulai dari SD dan SLTA. Semua orang tua mengharapkan adanya peningkatan kualitas anak-anak mereka dalam

memasuki dunia kerja, terutama untuk menjadi pegawai negeri sipil agar dapat keluar dari kondisi kemiskinan yang mereka jalani.

Semua warga yang berusia 17 tahun ke atas memiliki kartu tanda penduduk, artinya semua warga suku Bajo sangat patuh pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tuntutan peningkatan kepatuhan tersebut dirasakan oleh masyarakat Suku Bajo apabila mendekati saat-saat Pemilihan Umum Kepala Daerah, di mana tebaran janji-janji untuk meningkatkan kesejahteraan, perbaikan rumah-rumah yang kumuh dan penataan lingkungan masyarakat miskin, namun tanpa ada realisasinya.

Mata Pencapaian Suku Bajo Mola Samaturu, Mantiggola dan Sampela

Selain kepala keluarga, anak yang sudah remaja berkewajiban membantu orang tua yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan peran ibu rumah tangga selain membantu suami menjual tangkapan hasil lautnya ke pasar, membimbing dan mendidik anak-anaknya dalam mengajarkan tentang kearifan lokal, kejujuran, tatakrama, sopan santun, penanaman nilai-nilai agama dan tanggung jawab, terutama kepada anak yang masih usia balita dan remaja.

Sistem Perkawinan

Tentang sistem perkawinan, Ketua Dusun Mulo Samaturu menyampaikan bahwa tidak ada perkawinan antaretnis. Artinya sistem perkawinan yang dianggap ideal adalah sistem perkawinan yang berdasarkan prinsip endogami. Dengan prinsip ini seseorang akan memilih jodohnya dan menikah dengan orang-orang yang tergolong kerabatnya. Seperti sepupu sekali sampai sepupu tiga kali. Hal itu dimaksudkan agar kekerabatan di antara mereka lebih dekat dan akrab, serta kerabat yang jauh menjadi dekat. Sementara perkawinan muda dianggap hal yang biasa, karena usia sekitar 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki pada usia 17 tahun dianggap sangat produktif.

Tentang Kegiatan di Laut

Dari wawancara yang kami lakukan di Desa Mola Samaturu, diketahui bahwa mereka sudah menetap di wilayah Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko (Wakatobi) dan menjadi nelayan sejak tahun 1958. Sebelum tahun 1958 warga Bajo hidup berkelana di sekitar perairan Kepulauan Buton, dari asalnya di Bajoe, Sulawesi Selatan.

Artinya mata pencaharian ini cukup lama ditekuni oleh masyarakat Desa Mola Samaturu. Pada umumnya kondisi kehidupan masyarakat Bajo di Desa Mola Samaturu dapat digolongkan sebagai warga masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena tanpa pekerjaan sampingan. Hal tersebut sesuai dengan pengamatan di lapangan, di mana setiap keluarga tidak memiliki fasilitas rumah yang dilengkapi dengan peralatan/perabot yang memadai, belum lagi ukuran rumah yang sangat sederhana, namun dihuni 5 sampai 7 orang dalam satu rumah, hal ini menandai bahwa kesadaran program Keluarga Berencana (KB) tidak berjalan dengan baik di perkampungan masyarakat Suku Bajo pada tiga dusun yang kami temui.

Tentang Peralatan Laut

Masyarakat di sini setiap hari mesti melaut serta menangkap ikan. Adapun jenis perahu yang pergunakan adalah *soppe* dan *lepa-lepa*, yang jarak tempuhnya 2 sampai 5 mil dari bibir pantai. Kecuali jika mereka akan mencari ikan dan teripang antarpulau maka yang dipakai jenis *lambo* dan *pinisi*. Adapun peralatan yang digunakan masyarakat Suku Bajo Molu Samaturu untuk menangkap ikan: jaring, jala, pancing, panah, dan tombak.

Sistem Kepercayaan dan Pengetahuan

Masyarakat Suku Bajo secara keseluruhan, mengenal empat kategori istilah dalam menangkap ikan, yaitu: *palilibu*, *pongka*, *sakai* dan *lamma*, berdasarkan jarak ke daerah jangkauan.

Palilibu adalah kegiatan mencari nafkah atau hasil-hasil laut di sekitar perkampungan atau dalam wilayah setempat, yang biasanya pulang hari itu juga atau sekitar 2- 3 hari. *Pongka* adalah berlayar mencari nafkah atau hasil-hasil laut ke daerah atau provinsi lain, selama beberapa minggu/bulan. Sedang yang namanya *sakai* adalah berlayar mencari nafkah atau hasil-hasil laut ke daerah atau provinsi lain selama beberapa bulan atau tahunan. Dan yang terakhir namanya *lamma* adalah: pelayaran dengan perahu/kapal bermotor dalam dan luar negeri, dengan tujuan sebagai nelayan membawa muatan dan barang-barang dagangan untuk periode tahunan dan bulanan. Berdasarkan dengan hal di atas, maka secara budaya yang dipilih untuk membantu memperbaiki kehidupan masyarakat Bajo adalah ketiga cara tersebut dengan penguatan alat tangkap.

Sedang pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar sebagai

seorang istri di saat suami melaut yaitu: (1) istri yang ditinggal tidak boleh membawa api dan menyapu di dalam rumah; (2) pada waktu hendak berlayar jauh, setelah berada di dalam perahu, tidak boleh mengeluarkan air yang ada dalam perahu sebelum perahu berjalan, dan (3) pada waktu berada di laut atau dalam perjalanan tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor atau makian.

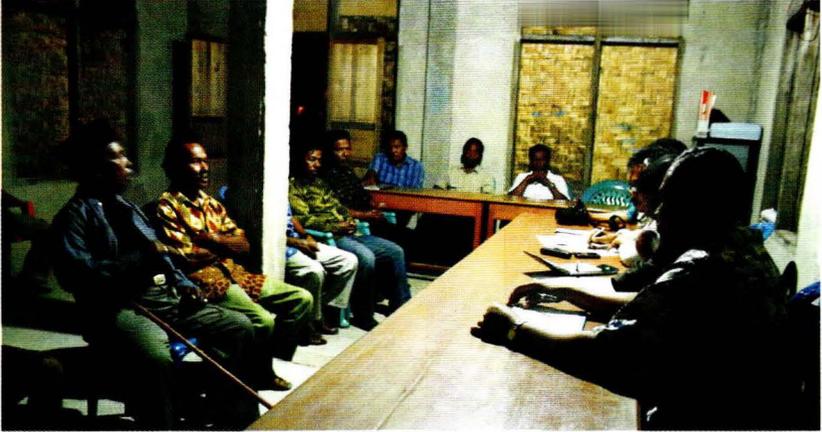
Berbicara tentang pengetahuan tradisional pada masyarakat Suku Bajo, dikenal bintang tujuh di langit yang disebut *pupuru* atau bintang merah yang disebut *nyunyuru*. Pengetahuan tentang kelompok bintang secara tradisional menjadi pedoman bagi orang-orang Bajo dalam melaut atau pelayaran. Misalnya bintang *layang-layang* sebagai petunjuk arah Selatan, bintang tujuh sebagai petunjuk arah Utara. Bintang Barat sebagai penunjuk arah Barat dan bintang Timur sebagai petunjuk arah Timur.

Tentang Sosial Budaya Suku Bajo

Dalam bersosialisasi, masyarakat Bajo telah menciptakan dua istilah dalam kehidupan sehari-hari. Istilah *Sama* dan *Bagai*. Kedua istilah tersebut diciptakan untuk mengidentifikasi dan memandang diri ataupun kelompok orang lain. *Sama* adalah orang Bajo dan *Bagai* adalah orang lain. Jadi kelompok sosial masyarakat Bajo semua bersaudara, satu suku serasa senasib dan sepenanggungan, meskipun secara geografis terpisah-pisah. Jadi cara orang-orang Bajo mengungkapkan eksistensi dirinya yang selalu dikaitkan dengan wilayah laut, jadi laut adalah dunia mereka. Sedangkan darat adalah milik *Bagai*. Dalam istilah populernya *Sama dapuma' di lao* artinya orang Bajo adalah di laut, *Bagai tikka ma'dara* artinya *Bagai* adalah dari darat. (Iswantari, Rifaat dan Febianto 1989 dan Zacot, 1979). Bagi masyarakat Suku Bajo terutama pada Desa Mola Simaturu yang mengajarkan tentang kerukunan, kemandirian dan keuletan, tentunya tidak lepas dari petuah atau pitutur orang Bajo, yang dikenal dalam bahasa Bajo "*Passi lele, passi jinna-jinna*" yang artinya "saling memahami, kalau tidak cukup dicukupi". Orang Bajo dinilai sangat mampu beradaptasi dengan siapa saja, itulah sebabnya orang Bajo dikenal memiliki sifat yang bersahabat dan cinta damai.

Tradisi Pengobatan Masyarakat Bajo

Duata adalah salah satu bentuk pengobatan masyarakat Suku Bajo, yang sarat dengan nilai-nilai kebaharian. *Duata* dilaksanakan di laut



Tokoh Suku Bajo Wakatobi sebagai Narasumber (Surya Yuga)

menggunakan sampan atau rakit yang di atasnya dihiasi dengan daun kelapa dan di atas perahu dipasang bendera kebesaran Suku Bajo yang disebut "*Ula-ula*". Di dalam ritual itu ada beberapa persembahan yang harus dihanyutkan ke laut. Pada bendera *ula-ula* terdapat gambar manusia dengan kombinasi warna merah putih. Dari *ula-ula* dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Suku bajo menjadikan tubuh manusia sebagai simbol kehidupan. Hal ini juga tampak pada *sesajen*, *hajatan* dan persembahan kepada leluhur atau penguasa alam. Tradisi ini sangat menarik, karena setiap ada kunjungan pejabat ritual ini dilakukan. Dan ritual ini dipimpin oleh seorang dukun yang mempunyai kekuatan supranatural.

Harapan-harapan Suku Bajo

Untuk mengeluarkan Suku Bajo dari garis kemiskinan adalah pengembangan kemitraan antara pengusaha nasional dengan nelayan Bajo, misalnya ekspor hasil laut dan pengembangan sekolah-sekolah kejuruan kelautan. Di bidang kesehatan adanya pengolahan sampah dan limbah di pemukiman suku Bajo, perlunya Puskesmas Keliling, fasilitasi penyediaan dokter dan bidan terlatih, pembangunan sarana air bersih serta sanitasi lingkungan dan pemukiman Suku Bajo. Di bidang ekonomi perlu adanya pengembangan nilai-nilai bahari sebagai industri kreatif, pengembangan jaringan usaha, dalam bentuk koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dan yang paling penting harapan tokoh masyarakat Bajo tentang penetapan zonasi

Taman Nasional Wakatobi yang membagi wilayah menjadi tiga bagian, yaitu daerah inti, pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan, untuk selalu disosialisasikan kemasyarakat agar bisa dipahami secara utuh.

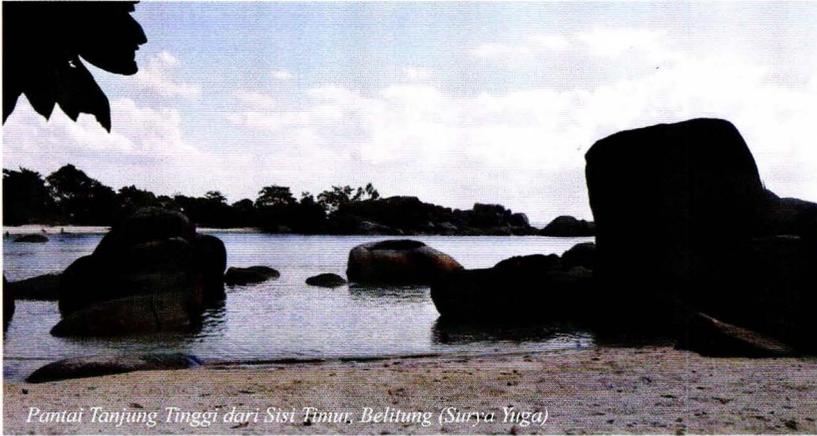
Daftar informan

1. Nama : Taslim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 49 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ketua Dusun
Alamat : Dusun Mola Samaturu, Kecamatan Wanci
2. Nama : Hamsir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 42 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa
3. Nama : Natsir, Sm.Hk.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 61 tahun
Pendidikan : Sarjana Muda
Pekerjaan : Pensiunan PNS/nelayan
Alamat : Dusun Mola Samaturu, Kecamatan Wanci
4. Nama : Suhaille
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 41 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Kepala Desa/nelayan
Alamat : Desa Sama Bahari, Kecamatan Mantiggola
5. Nama : Kadir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 56 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Sampela, Kecamatan Kaledupa

6. Nama : Umar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 47 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Sampela, Kecamatan Kaledupa.



Rumah Suku Bajo, Wakatobi (Surya Yuga)



IDENTITAS SUKU LAUT ATAU SUKU SAWANG di Desa Jalan Baru, Desa Juru Sebarang dan Desa Gantung di Kabupaten Belitung

Masyarakat Suku Sawang di Desa Jalan Baru ini hampir semua memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai penanda bahwa mereka terdaftar dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk yang menetap permanen. Setiap satu rumah rata-rata dihuni 5 sampai 6 orang, sehingga bisa disebut sebagai keluarga batih. Latar pendidikan pada rata-rata orang dewasa Suku Sawang hanya tamat SD, kecuali anak-anak remaja cukup memadai, karena tersedia sarana pendidikan formal yang dapat menampung anak-anak untuk belajar mulai dari tingkat SD hingga SLTA. Masing-masing keluarga berharap untuk peningkatan kualitas anak-anaknya demi memasuki dunia kerja.

Mata Pencaharian Suku Sawang

Sebagai Suku Laut yang sudah berdomisili di darat, tentu mengalami perubahan dan sangat mempengaruhi pola pikir sebagian besar masyarakat Suku Sawang yang ada Belitung, karena semula berorientasi pada budaya bahari, kemudian digantikan dengan tradisi penambangan timah yang sejak jaman kolonial sudah mereka geluti. Dari hasil wawancara dengan Salim Yan Albert Hoogstad didapat keterangan bahwa masyarakat disini sangat materialis, segala sesuatu selalu dinilai dengan uang.

Bagi masyarakat Sawang yang masih berprofesi sebagai nelayan, selain kepala keluarga, anak yang sudah remaja tentu membantu orang tua mencari hasil laut. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh tambang timah yang dikelola secara mandiri seperti pertambangan rakyat di Juru Seberang, di mana hasilnya dijual langsung kepada pengumpul. Artinya setelah PT. Timah tidak beroperasi, sebahagian masyarakat Suku Sawang bekerja sebagai buruh di pelabuhan. Adapun peran ibu rumah tangga adalah membantu suami dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya terutama yang masih usia balita, dan remaja dan mengajarkan tentang kejujuran, keuletan penanaman nilai-nilai agama dan tradisi Suku Sawang yang masih dianggap relevan dan kondisi kekinian, yaitu cinta damai.

Sistem Perkawinan

Orang Laut terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang masing terdiri dari beberapa keluarga inti. Tiap keluarga inti, yaitu suami, istri, dan anak-anak mereka yang belum dewasa memiliki perahu yang menjadi tempat tinggal mereka. Anak-anak (*lolok*) pria yang belum dewasa disebut *bujang kecil*, dan anak-anak perempuan yang belum dewasa disebut *dara belente* atau *dara lente*. Bagi anak pria yang telah mampu bekerja untuk menghidupi dirinya dengan *nyuluh* (mencari ikan dengan penerangan suluh dan tombak) atau sudah dapat membuat dan merawat perahu, dianggap sudah dewasa. Sedangkan anak-anak perempuan sudah dianggap dewasa pada waktu ia mendapatkan haid pertama. Sejak itulah anak-anak itu diharuskan membiasakan diri hidup terpisah dari orang tuanya dan tinggal dalam perahu yang telah disiapkan bagi mereka (Salim Yan Albert Hoogstad, Suku Sawang Belitung dan Muang Jong, Kolom, *Warta Praja*, Edisi 07/Th IV/Juli 2009, halaman 14). Berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui informan di Desa Jalan Baru bahwa perkawinan campuran antarsuku sering terjadi. Artinya terjadi kawin-mawin Suku Sawang dengan suku apa saja, yang penting mau sama mau tanpa adanya paksaan.

Usia yang dipandang baik untuk memasuki pernikahan pada masyarakat Suku Sawang sekitar 20 tahun bagi perempuan dan laki-laki pada usia 25 tahun. Itu dianggap sangat ideal, baik dari sisi tingkat kematangan usia maupun kemampuan untuk bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.

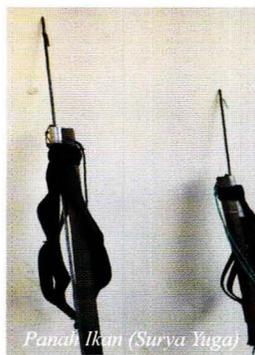
Tentang Kegiatan di Laut

Dari wawancara dengan Bapak Husain di Desa Jalan Baru, diperoleh informasi bahwa mereka sudah menjadi nelayan sejak tahun 1963. Artinya mata pencaharian ini cukup lama ditekuni oleh masyarakat Desa Jalan Baru, dan di samping sebagai nelayan profesi lain Pak Husain adalah sebagai Asisten Dukun. Karena itu pengetahuan masyarakat Suku Sawang secara keseluruhan sangat kental dengan pemahaman supranatural tentang kekuatan penguasa laut.

Keyakinan mengenai hal-hal yang bersifat gaib mempengaruhi perilaku menanggapi roh-roh, kekuatan-kekuatan gaib, hari baik dan naas, hantu-hantu, *mambang*, peri dan sekaligus memcerminkan kekhawatiran mereka terhadap berbagai ancaman yang dapat merugikan atau mencelakakan kehidupan mereka (Salim, halaman 14). Tidak heran dalam kehidupan masyarakat Suku Sawang, walaupun mereka menganut agama Islam, tetapi mereka tetap menjalankan ritual tradisi-tradisi kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa setiap benda dan wilayah alam memiliki kekuatan gaib (penjaga/ penguasa).

Tentang Peralatan Laut

Adapun jenis perahu yang digunakan adalah *kole-kole* (perahu kecil dari kayu) yang tentu jarak tempuhnya 2 sampai 5 mil dari bibir pantai, dan tidak mesti setiap hari melaut serta menangkap ikan. Dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing (*ngedik*), jala (*nyala*), dan panah atau tombak (*serapang* bermata tiga atau lima). Selain itu Suku Sawang sering juga melakukan kegiatan *nyuluh* pada malam hari di sepanjang pantai dan kegiatan untuk mencari kerang, cacing laut, dan teripang.



Panah Ikan (Surya Yuga)

Tentang Sosial Budaya dan Religi Suku Sawang

Keyakinan Masyarakat Suku Sawang dalam hal mistik, tentu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Suku Sawang, termasuk dalam melihat hari-hari baik dan jelek, serta hantu-hantu laut dan ancaman dunia gaib yang dapat merugikan atau mencelakakan kehidupan mereka.

Untuk terhindar dari ancaman dunia gaib tersebut, setahun sekali secara turun temurun dilakukan upacara "*Muang Jong*". *Muang* berarti mengantar, sedangkan *jong* berasal dari kata *jung* (perahu) dengan segala peralatannya, yang intinya adalah upacara tolak bala. Dalam upacara ritual yang sakral ini rangkaian prosesi upacara berlangsung selama 3 hari 3 malam di pimpin oleh seorang dukun kharismatik dilakukan bersama-sama seluruh masyarakat Sawang setempat, terdiri dari tiga tahapan: pendahuluan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

Acara pendahuluan dimulai dengan menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk memotong pohon, bergotong-royong membuat *jong* (perahu), *ancak* (tempat sesaji) dan *tiang jitun* (tiga tiang perahu). Acara pelaksanaan meliputi upacara naik *tiang jitun* (permainan menaiki *tiang jitun* dalam keadaan *trance*), mempersiapkan peralatan untuk *muang jong*, upacara *betare* (pemberitahuan bahwa *jong* akan dilarung ke laut), dan pelaksanaan *muang jong*. Acara pasca pelaksanaan berupa membawa rombongan *muang jong* ke tempat pemandian, dan memandikan rombongan *muang jong*. Selama prosesi acara berlangsung diiringi dengan beragam ritual tarian, nyanyian dan permainan dengan ungkapan syair-syair yang sakral. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ritual "*Muang Jong*" adalah sikap ke gotong-royongan, yang terlihat sejak mereka mengambil kayu di hutan untuk membuat *jong*, *ancak*, dan *tiang jitun*. Yang kedua adalah nilai-nilai sosial, yang terlihat jelas ketika mereka secara bersama-sama menanggung biaya ritual tersebut (Salim, halaman 18).

Dalam hal sosial budaya pada masyarakat Suku Sawang, tercermin ketika seorang warga meninggal dunia, ada semacam tradisi Suku Sawang yaitu nyanyian ratapan yang dilakukan semalam suntuk, dengan mengenang kisah perjalanan hidup orang meninggal dunia. Tradisi ini juga menjadi etos kerja bagi masyarakat Suku Sawang.

Tradisi Pengobatan Masyarakat Suku Sawang

Kedudukan sosial Dukun dalam masyarakat Suku Sawang dinilai sangat strategis, karena mereka memiliki kekuatan suptanatural dan dapat mendatangkan kebaikan, rezeki, bencana, kesehatan atau penyakit kepada manusia. Dukun juga berfungsi sebagai pemimpin adat, yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan menetapkan segala macam tata cara adat dan upacara menolak bala, penyembuhan dan pencegahan penyakit. Adapun pembagian

kekuasaan para dukun dibatasi sesuai dusun tempat tinggalnya, artinya setiap dusun memiliki seorang dukun yang disebut Dukun Kampung dan pengobatan tidak boleh lintas dusun.

Suku Sawang di Desa Gantung Kab. Belitung Timur

Suku Sawang pada masa lalu dikenal Suku Laut yang dalam kesehariannya di laut, hanya tinggal kenangan. Mereka tinggal di pemukiman semi permanen bercampur dengan etnis lain, bahkan terjadi kawin-mawin dengan penduduk setempat. Artinya komunitas Suku Sawang pada umumnya telah memiliki kampung atau desa, dan mereka bertempat tinggal jauh dari laut dengan pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh PT. Timah. Tradisi bahari hampir tidak ada lagi, kecuali upacara sakral "*Muang Jong*" itu yang masih dilakukan sampai saat ini. Paradigma kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada daratan berdampak pada lambatnya pengembangan wilayah pesisir, dan akibat program relokasi Suku Laut ke daratan lainnya adalah hilangnya budaya bahari pada Suku Sawang. Padahal kedua program kebijakan ini tidak berhasil mengeluarkan Suku Laut dari kemiskinan struktural, sebagaimana rencana awal ketika di daratkan.

Harapan-harapan Masyarakat Suku Sawang

Perlunya diberikan perhatian yang lebih cermat kepada masyarakat Suku Sawang di ketiga desa yang terdapat di Belitung. Untuk mengeluarkan Suku Sawang dari jeratan kemiskinan adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang sampai pada sasaran, pengembangan sekolah-sekolah kejuruan tentang pelayaran; pengembangan jaringan usaha dalam bentuk koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berbasis potensi lokal, serta pelatihan tentang pengelolaan pengembangan modal yang diarahkan pada perikanan tangkap yang arif lingkungan serta usaha budidaya laut.

Daftar Informan

1. Nama : Husain
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 70 tahun
Pendidikan : -
Pekerjaan : Asisten Dukun/Nelayan
Alamat : Desa Jalan Baru, Juru Seberang, Belitung



Pulau Batu Kepala Burung Garuda, Belitung (Surya Yuga)

2. N a m a : Seman
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 55 tahun
 Pendidikan : -
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Desa Jalan Baru, Juru Seberang, Belitung
3. N a m a : Ima
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 63 tahun
 Pendidikan : -
 Pekerjaan : Pelantun
 Alamat : Desa Jalan Baru, Juru Seberang, Belitung
4. N a m a : Daud
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 76 tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pensiunan PT. Timah
 Alamat : Desa Gantung, Belitung Timur



5. N a m a : Sunardo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 48 tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Kepala Suku Sawang
 Alamat : Desa Gantung, Belitung Timur
6. N a m a : Rais
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 65 tahun
 Pendidikan : -
 Pekerjaan : Dukun
 Alamat : Dusun Juru Seberang, Belitung
7. N a m a : Onah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 50 tahun
 Pendidikan : -
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Nelayan
 Alamat : Dusun Juru Seberang, Belitung
8. N a m a : Salim Yan Albert Hoogstad
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 55 tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Guru/Pemerhati Budaya Belitung
 Alamat : Kota Tanjungpandan



Menjelang Malam di Wakatobi (Surya Yuga)

PERTANYAAN LAPANGAN

Lokasi:

Tentang Identitas

1. Nama/Umur :
2. Etnis/Suku :
3. Agama :
4. Alamat :
5. Apakah punya kartu identitas? (KTP, surat keterangan)
6. Keterangan keluarga (istri/suami, berapa anak, berapa tanggungan keluarga)
7. Latar belakang pendidikan (individu, istri/suami, anak)
8. Apa pekerjaan Bapak/Ibu selain sebagai nelayan?
9. Diantara keluarga, adakah yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, atau lainnya?
10. Apakah dalam keluarga Anda ada pernikahan antar etnis (siapa dan etnis apa)?
11. Adakah perkawinan campur antara suku Sawang dengan suku lain?
12. Apakah ada hubungan keluarga antara suami-istri?
13. Sudah berapa lama menetap di daerah ini?

Tentang kegiatan di laut

14. Sudah berapa lama menjalani kehidupan di laut? (sebagai pencari ikan/nelayan, pelaut/anak buah kapal)
15. Apakah memiliki perahu/kapal? (milik sendiri, milik orang lain)
16. Berapa lama sekali melaut? (pulang hari, dua hari, tiga hari, lebih dari tiga hari)
17. Seberapa sering pergi melaut? (tiap hari, dua hari sekali, tiga hari sekali, tergantung musim)
18. Berapa jauh lokasi pencarian ikan/hasil laut? (hitungan jam, perjalanan setengah hari, perjalanan sehari penuh)
19. Apakah setiap kali melaut mendapatkan hasil cukup banyak?
20. Hasil laut yang didapat berupa apa saja? (ikan, cumi/sotong, tripang, atau lainnya?)
21. Hasil laut yang didapat: untuk dimakan sendiri, dijual langsung kepada konsumen, dijual kepada pengumpul)
22. Setiap kali melaut, biasanya dilakukan sendiri, berdua, lebih dari dua orang?
23. Apakah bisa melaut tanpa mengenal musim? (angin Barat dan angin Timur)

Tentang peralatan melaut

24. Apakah perahu, layar, dayung dibuat sendiri? Atau membeli? (dimana?)
25. Apakah perahu/kapal yang digunakan untuk melaut menggunakan motor/mesin? Berapa PK?
26. Dalam mencari hasil laut, menggunakan tombak, panah, pancing, jaring, jala, racun/tuba, alat peledak?
27. Apakah menggunakan peralatan kompas untuk menentukan arah?
28. Kapan waktu yang tepat untuk memperbaiki peralatan melaut?

Tentang sistem kepercayaan dan sistem pengetahuan

29. Adakah upacara-upacara yang harus dilakukan sebagai ritual yang berhubungan dengan laut?
30. Apakah ada doa-doa khusus sebelum melaut?

31. Apakah ada ajian/*rapalan* atau persyaratan agar saat melaut mendapatkan hasil yang baik?
32. Apakah ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar sebagai seorang nelayan?
33. Untuk keberhasilan setiap melaut, apakah setiap nelayan harus mampu membaca tanda-tanda alam seperti:
 - a. arus air :
 - b. suhu air :
 - c. kekuatan angin :
 - d. gelombang/ombak :
 - e. bentuk awan :
 - f. bintang :
 - g. bulan :
34. Apakah sistem pengetahuan tentang tanda-tanda alam tersebut diajarkan kepada anak?

Tentang lain-lain

35. Apakah Bapak/Ibu sering mengajarkan norma-norma kekeluargaan? (tentang kerukunan, keuletan, kemandirian, ketaatan).
36. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu, bagaimana mengajarkan nilai-nilai tentang keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan YME?
37. Orang Sawang yang kita kenal terbiasa dengan kerasnya kehidupan laut, namun memiliki sifat bersahabat dan cinta damai. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?
38. Apakah di rumah Bapak/Ibu memiliki televisi, parabola, internet?
39. Apakah pendapat Bapak/Ibu tentang penggunaan bom dalam mencari ikan? (karena lebih praktis, dapat merusak biota laut/terumbu karang, kurangnya kesadaran nelayan terhadap kelangsungan hidupnya, kurangnya sosialisasi/pengawasan pemerintah daerah).
40. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah?

TENTANG PARA PENULIS



Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS.

6 Juni 1963

Pendidikan: S1 Sosial-Ekonomi Pertanian, Universitas Hasanuddin, 1986, S2 Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, 1992, S3 Ilmu Sosial, Universitas Padjadjaran, 2002.

Pekerjaan: Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, sejak 1988.

Publikasi Buku: 2006, Jagad Maritim: Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan. Makassar: Innawa; 1996, Pembangunan Pertanian dan Dinamika Pedesaan. Makassar: Yayasan Pena Indonesia.

Publikasi Jurnal (Terpilih): 2009, Tulisan Bersama M. S.S. Ali (Penulis 1) dan M. Mahmud, "*Relations of Government, Company and Community in Land Conflict: A Case of Conflict between Lonsum Plantation Company and Local Community at Bulukumba Regency, Indonesia*", dalam Y. Kawamura, S.S. Ali dan H. Nakamura (Eds.), *Participatory Research for Poverty and Conflict Resolution, Proceeding "The 6th International Seminar of Afrasian Centre for Peace and Development Studies. Kyoto: Afrasian Centre for Peace and Development Studies, Ryukoku University*; 1997. "Protes Petani dan Integrasi Pedesaan; Hubungan Negara dan Rakyat Era Orde Baru". Jurnal Prisma, No.7. Jakarta: PLPES; 1995, "Arah Perubahan Sosial di Pedesaan Pasca Revolusi Hijau", Jurnal Analisis, No.3. Jakarta: CSIS.



Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.

Melai, 23 Agustus 1975

Pekerjaan: Dosen/Peneliti/Konsultan
NIP: 19750823 200212 1 002,
NPWP: 48.660.426.7-801.000,
Pangkat/Golongan: Penata Tk I/III d,
Jabatan Fungsional: Lektor
Agama: Islam
Bidang Keahlian: Antropologi
Fields of Interest: Antropologi Kekuasaan,
Antropologi Politik, Organisasi Sosial dan
Kekerabatan, Teori dan Metodologi
Antropologi, dan Antropologi Kontemporer.

Keanggotaan Organisasi:

Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Forum Perguruan Tinggi Untuk Studi Bencana.

Alamat Rumah:

Komp. Pesona Prima Griya Blok J2 No.6, Jalan Tamangapa Raya III, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Mobile: +62815 249 277 27, email: tf_tahara@yahoo.com

Pendidikan:

- Doktor (S3) Antropologi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Tahun 2006 - 2010;
- Magister (S2) Antropologi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2000 - 2002 (*Cum Laude*)
- Sarjana (S1) Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, Tahun 1994 -1998 (*Cum Laude*)

Kegiatan Pelatihan/Seminar:

- Peserta Sarasehan Nasional Antropologi 2010: "Re-invensi Antropologi Indonesia di Era Demokrasi dan Globalisasi" (Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia ke-3, Seminar Nasional Antropologi Terapan "Antropologi dalam Lintasan Pembangunan Indonesia", *Koentjaraningrat Memorial Lectures VII/2010* "Keanekaragaman Makanan Indonesia dan Ketahanan Pangan Nasional", Cisarua, 21-23 Juli 2010
- Peserta Simposium dan Lokakarya Nasional Papua; "*Peran Universitas dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan*", 7-9 April 2010 Kampus UI Depok, FISIP Universitas

Indonesia - Fisip Universitas Cendrawasih;

- Pemakalah "Seminar Upaya Pengurangan Resiko Bencana Dalam Mendukung Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan" Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - *Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR)*, Hotel Kedaton Bandung, 17-18 November 2009;
- Pemakalah Seminar Internasional Tahunan ke-10 Yayasan PERCIK "*Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Representasi Kepentingan Rakyat Pada Pemilu Legislatif 2009*". Yayasan PERCIK - *The Ford Foundation*, Salatiga 28 - 30 Juli 2009;
- *Presenter in Seminar International SERUMPUN IV*, Julai 4 - 5 2009, University Kebangsaan Malaysia (UKM) Selangor Malaysia;
- Peserta *Academic Writing Skill Workshop, Indonesian Academy of Sciences (API)*. Pusat Studi Jepang (PSJ) Universitas Indonesia, Depok, May 11-15, 2009;
- Peserta *Public Expose* dan Seminar Kearifan Lokal PLATFORM NASIONAL PRB (Penanggulangan Resiko Bencana), Hotel Borobudur Jakarta, 28 April 2009;
- Pertemuan Ilmiah Tahunan Forum Perguruan Tinggi Untuk Pengurangan Bencana dan Penanggulangan Bencana, Hotel Sahid Jakarta, 3 - 4 Desember 2008;
- Narasumber Pada Sosialisasi Kerangka Aksi Hyogo dan *National Platform* Pengurangan Risiko Bencana, Hotel Cemara Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - UNDP - *Department For International Development (DFID) - Safer Community Through Disaster Risk Reduction (SCDRR)*, 22 Juni 2008;
- Peserta *Koentjaraningrat Memorial Lecture IV* & Seminar Nasional "Membicarakan Kembali Karakter Bangsa; Generasi Muda Indonesia di Tengah Gelombang Globalisasi, Auditorium Pusat Studi Jepang Kampus Universitas Indonesia Depok, Forum Kajian Antropologi Indonesia - Kementerian Pemuda dan Olahraga RI - ILUNI UI, Oktober 2007;
- Pemakalah Seminar Internasional Tahunan ke-8 Yayasan PERCIK "*Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah (Territorial Reform) dan Dinamikanya*". Yayasan PERCIK - *The Ford Foundation - Democratic Reform Support Program (DRSP)*, Salatiga 17 - 19 Juli 2007;
- Peserta *Koentjaraningrat Memorial Lecture III* & Seminar Nasional Integrasi Bangsa, Auditorium Pusat Studi Jepang Kampus Universitas Indonesia Depok, Forum Kajian Antropologi Indonesia - Kementerian

Luar Negeri RI, November 2006 ;

- Peserta Tatap Muka dan Mandiri Tahap Satu Program AA (Applied Approach) Bagi Dosen Universitas Hasanuddin-P3AI, Universitas Hasanuddin, 05 - 24 September 2005;
- Peserta Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Bagi Dosen Muda Universitas Hasanuddin-P3AI Universitas Hasanuddin 08 - 13 Agustus 2005;
- Panitia Seminar/Dialog Budaya Sulawesi Selatan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar - Jurusan Antropologi Fisip UNHAS (Tahun 2004);
- *Participant in Seminar on " Democratic Accountability: Indonesia E U Relation" June 1 st 2004 - Euopen Union- Center For European Studies and UNDP;*
- Pembina Rehabilitasi Ekosistem Mangrove - Bapedalda Kabupaten Buton-Forum Kajian Pesisir Universitas Hasanuddin (Tahun 2004);
- Peserta Pelatihan Editor Baseline Survey P2KP di Pusdiklat Kehutanan Bogor 12-21 Januari 2004, World Bank- LSPK Malang;
- Peserta Seminar Integrasi Bangsa, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar , 2003;
- Peserta Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal Dosen Muda Univeritas Hasanuddin, 07-08 Maret 2003;
- Peserta "ROADSHOW RCTI OKE 2003" Pekan Dokumenter Berita (Work Shop Produksi Berita);
- *Presenter in the 3rd International Symposium of the Journal ANTROPOLOGI INDONESIA, "Rebuilding Indonesia, a Nation of 'Unity in Diversity': Towards a Multicultural Society, July 16 - 19 2002, Udayana University Denpasar Bali;*
- Peserta Pelatihan Penelitian *Female Circumcision in Indonesia: Extent, causes, implication on Women's Health and Sexual Life and Possibilities*, Pandeglang Jawa Barat (Tahun 2002);
- *Organizing Committee (Secretary) in International Symposium and Workshop "The Beginning of The 21st Century: Endorsing Regional Autonomy, Understanding Local Cultures, Strathening National Integration" August 1-5 2000, Research Center Hasanuddin University Makassar;*
- Peserta Lokakarya Penanaman Bakau dan Perusakan Terumbu Karang di Pesisir Bone, Sulawesi Selatan, Jurusan Antropologi Fisip Univesitas Indonesia (Tahun 1999);

- Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian - Ikatan Kekerabatan Antropologi Fisip Universitas Hasanuddin (Tahun 1998);
- Peserta Pelatihan Tenaga Peneliti Antropologi - Ikatan Kekerabatan Antropologi Universitas Hasanuddin (Tahun 1998)

Pengalaman Pekerjaan/Penelitian:

- Konsultan Ahli Sosial Budaya: Master Plan Pengembangan Komoditas Unggulan Agro-Marin Kabupaten Buton, Divisi Tata Ruang Universitas Hasanudin - Bappeda Kabupaten Buton, 2010 ;
- Anggota Peneliti: Menggali Kelembagaan Lokal dan Wawasan Budaya Bahari Yang Menunjang Bagi Penguatan Intergrasi Bangsa dan Harmoni Sosial di Indonesia, Hibah Stategi Nasional - Dirjen Dikti Depdiknas 2010;
- Ketua Peneliti: Resistensi Orang Katobengke Sebagai Kelompok Marginal dan Harmonisasi Kelompok dalam Struktur Masyarakat Buton - Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI) Tahun II, Dirjen Dikti Depdiknas - DIPA UNHAS 2010;
- Konsultan: Pemantauan Beras Bersubsidi (RASDI) Untuk Mengukur Kontribusi Subsidi Beras Terhadap Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di Provinsi Sulawesi Selatan, Kerjasama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat - Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 2009;
- Ketua Peneliti: Resistensi Orang Katobengke Sebagai Kelompok Marginal dan Harmonisasi Kelompok dalam Struktur Masyarakat Buton - Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI) Tahun I, Dirjen Dikti Depdiknas - DIPA UNHAS 2009;
- Konsultan Ahli: Studi Kebijakan Pengembangan Masyarakat Sipil Dalam Konteks Hubungan Negara dan Masyarakat (Banda Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Balikpapan, Makassar, Kendari dan Jayapura). Direktorat Politik dan Komunikasi - Bappenas RI, 2008;
- Konsultan: Perintisan Model Sekolah Sehat di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Warga Sekolah Yang Menunjang Pendidikan Gratis, di Kabupaten Kolaka-Lembaga Penelitian UNHAS - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka, 2008;
- Konsultan: Survey Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat dan Stakeholder yang terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Lingkungan Mandiri Pedesaan (PNPM-LMP) di Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan, Indonesia. CARE Indonesia - World Bank, 2008;

- Team Peneliti: Kajian Teknologi Usaha Tani Padi yang Mendukung Agribisnis Beras Berkualitas (Menggali Pengetahuan Lokal dan Kreativitas Petani yang Mendukung Agribisnis Beras Berkualitas di Kawasan Lumbung Padi). Lembaga Penelitian UNHAS - Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2007;
- Konsultan Ahli Sosial Budaya: Master Plan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT) Pulau Makasar Kota Bau-Bau, PT Yodya Karya - Bappeda Kota Bau-Bau, 2007;
- Konsultan Ahli Sosial Budaya: Studi Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Distrik Kosiwo, Distrik Yapen Barat, dan Distrik Angkaisera, Kabupaten Yapen Provinsi Papua, CV Johan Consultant - Bappeda Kabupaten Yapen, 2006;
- Ketua Tim Peneliti: Pola Pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Fayu Kabupaten Waropen Provinsi Papua, CV. Johan Consultant - Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Waropen, 2006;
- Konsultan Ahli Sosial Budaya: Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Palatiga Kota Bau-Bau, CV. Salsa Engineering - Dinas Tata Ruang Kota Bau-Bau, 2006;
- Ketua Peneliti: Pengembangan Strategi Pengelolaan Usaha Perikanan laut Nelayan Tradisional di Pesisir dan Pulau-pulau Provinsi Sulawesi Selatan, Penelitian Hibah Bersaing XIV Tahun 2006, Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas RI;
- Konsultan Ahli Sejarah & Antropologi: Kerangka Acuan - AMDAL Kotamara Bau-Bau - PT. Yodyakarya Jakarta - Bappeda Kota Bau-Bau, 2006;
- Konsultan Ahli Sosial Budaya: Rencana Teknis Kawasan Budaya Keraton Buton Kota Bau-Bau, CV. Maula Tahira Consultant - Dinas Tata Ruang Kota Bau-Bau, 2005;
- Tim Peneliti: Kajian Sekuritas Sosial Bagi Keluarga Nelayan Miskin di Kota Parepare, Kota Bau-Bau, dan Kota Ternate, Departemen Sosial RI - Lembaga Penelitian UNHAS, 2005;
- Tim Peneliti: Pengkajian Tentang Sistem Bagi Hasil Tradisional Nelayan Mandar di Kabupaten Majene Sulawesi Selatan, Dikti Depdiknas RI, 2004;
- Tim Peneliti: Inventarisasi Potensi Pariwisata Kota Bau-Bau, LP2SB - Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, 2004
- Konsultan: Evaluasi Proyek Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Sulawesi Selatan, LSPK Malang - World Bank, 2004
- Konsultan Ahli Sosial Budaya: Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kota Bau-Bau , PT. Aplikanusacom Jakarta - Pemerintah Kota Bau-Bau, 2003

- Ketua Peneliti: Perluasan Lokasi Penangkapan dan Eksploitasi Sumberdaya Hayati Laut oleh Nelayan Pulau Barrang Caddi Kota Makassar, Dana Rutin Universitas Hasanuddin, 2003
- *Supervisor in Research: Female Circumcision in Indonesia: Extent, causes, implication on Women's Health and Sexual Life and Possibilities*, Population Council, 2002
- *Team Leader Survey Pre-TAM* Pemirsa Televisi di Kota Makassar Phase I dan II, PT. Surya Citra Televisi Indonesia (SCTV), 2002
- Tim Peneliti: Nilai-Nilai Budaya yang mendukung Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Laut Berkelanjutan, BBI Dikti Depdiknas RI, 2002
- Team Peneliti: Pengkajian Nilai-Nilai Budaya yang Mendasari Kesadaran Hukum Nelayan di Pesisir Pantai Sulawesi Selatan, Jurusan Antropologi Fisip Universitas Hasanuddin - Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, 2000-2001
- Tim Peneliti: Perlindungan Sosial di Sulawesi Selatan, Jurusan Antropologi Fisip Unhas- Bappenas RI, 2000
- *Tim Surveyor: "Peran Orang Tua dalam Pengawasan Perilaku Anak Nonton TV*, Harian Kompas Jakarta, 1997

Audio Visual/Film Etnografi:

- *Pelangi Islam di Tanah Butuuni*, Samuan, Studio ASTRO TV, 2007
- *Profil Pendidikan Masyarakat Pegunungan Desa Laiya*, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Produksi TVRI - Departemen Pendidikan Nasional, 2001

Karya Publikasi Ilmiah:

- "Lautku Sayang, Lautku Malang" Studi Pengelolaan dan Kerusakan Lingkungan Laut di Lamena Kabupaten Buton, Skripsi Sarjana Jurusan Antropologi Fisip Universitas Hasanuddin, Tahun 1998
- *Kaombo Tayino Wabula* (Sistem Kepemilikan Wilayah dan Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Laut Berkelanjutan di Kabupaten Buton), Tesis Magister Antropologi Program Pascasarjana UNHAS - *The Ford Foundation (ff)*, Tahun 2002
- *Reproduksi Stereotipe dan Resistensi Orang Katobengke Dalam Struktur Masyarakat Buton*, Disertasi Doktor Antropologi Program Pascasarjana Fisip Universitas Indonesia, Tahun 2010

- Paper: *Ownership system of marine space and regulation controlling sustainable marine resources, Paper at the 3rd International Symposium of the Journal ANTROPOLOGI INDONESIA, July 16-19 2002, Udayana University, Denpasar, Bali.*
- Makalah: Pemekaran Wilayah dan Kontestasi Elit Politik Lokal; Suatu Tinjauan Di Wilayah Bekas Kesultanan Buton. Dipresentasikan Pada Seminar Internasional ke-8, Yayasan Percik - *The Ford Foundation - Democratic Reform Support Program (DRSP)* Salatiga 17 - 19 Juli 2007
- "*Kaombo*" Studi Antropologi Hukum tentang Sistem Kepemilikan dan Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Laut di Kabupaten Buton, Jurnal Clavia Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Volume 6 No. 2 Juni 2005 No. Akreditasi 22/Dikti/Kep/2002 ISSN: 1411-349X
- "*Upacara Tommanurung*": Kearifan Lokal Masyarakat Massenrengpulu Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Dalam Buku Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan. Penerbit Kementerian PPLH Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua KLH-Masagena Press, ISBN: 978-979-97977-7-3, Tahun 2007
- Strategi Pengelolaan Usaha Perikanan Laut di Desa Eng Batu-Batu Kabupaten Takalar, Buletin Seri Sosial Budaya Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Volume 7 Maret 2008. Akreditasi SK No. 55/DIKTI/Kep/2005 ISSN 0215-174X
- Globalisasi dan Perubahan Nilai Budaya di Bekas Wilayah Kesultanan Buton. Dalam Buku Menyibak Kabut di Keraton Buton (*Bau-Bau: Past, Present, and Future*). Penerbit Respect -Pemerintah Kota Bau-Bau, ISBN: 978-979-18317-0-3, Tahun 2008
- Paper, *Stereotype Production and Reproduction Katobengke People in Buton Social Structure, Paper at Seminar International SERUMPUN IV*, Julai 4 - 5 2009, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Selangor Malaysia
- Makalah: Pemilu Legislatif dan Kebangkitan Identitas Kelompok Marginal. Dipresentasikan Pada Seminar Internasional ke-10, Yayasan Percik - The Ford Foundation, Salatiga 28 - 30 Juli 2009
- Makna Sejarah Bagi Orang Katobengke; Reproduksi Stereotipe Dalam Struktur Masyarakat Buton. Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya "Lensa Budaya" Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ISSN 0126-351X Volume IV, No.3, Desember 2009
- Kolumnis di Beberapa Media Massa: Koran Tribun Timur, Kendari Pos, Kendari Ekspres dan Radar Buton; dan Majalah. *****



Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si
Baru, 5 November 1962

Guru Besar Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo Kendari. Meraih Gelar Sarjana Sastra (Drs.) pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, tahun 1986, Gelar Magister Antropologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, tahun 1994, dan Gelar Doktor Ilmu Sosial di Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2004. Karier penulis sebagai

pengajar dan pendidik dimulai pada tahun 1988 sampai sekarang. Selain menjadi pengajar di Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Haluoleo, juga mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi Tenggara. Selain itu, juga pernah mengajar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Anggota Sulawesi Tenggara, 2006 dan menjadi dosen tamu pada Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SESPATI) POLRI, Angkatan ke-13, 2007.

Berbagai karya yang telah dipublikasikan, baik buku maupun jurnal Ilmiah Nasional yang diterbitkan, antara lain: Kearifan Lokal Sulawesi Tenggara, 2007, Strategi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, 2008, Petani dan Pemanfaatan Inovasi Teknologi Pertanian: Suatu Tinjauan Sosial Budaya, 2009. Orang Bajo di Tengah Perubahan, 2011. Buku selanjutnya yang akan diterbitkan adalah Adaptasi Santri Terhadap Kehidupan Pesantren (2011).



Dr. Munsil Lampe, MA.
Enrekang, 27 Desember 1956

Dosen/Tenaga Pengajar pada Unit Kerja
Jurusan Antropologi, Fisipol Universitas
Hasanuddin
Nip: 19561227 198612 1 001
Pangkat: Pembina Utama Muda
Golongan: IV c
Jabatan Fungsional: Lektor Kepala.

Pendidikan

- Sarjana Lengkap (S1) Program Studi Antropologi Fisipol UI Jakarta 1984
- Magister Antropologi Program Pascasarjana UI (Program Pencangkakan di Universitas Leiden, Nederland) 1989.
- Program Doktor (S3) Antropologi Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta 2006.

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan

- Dosen Jurusan Antropologi Fisipol Unhas 1986 - sekarang
- Dosen Program Pascasarjana Unhas 1999 - sekarang
- Sekretaris Jurusan Antropologi Fisipol Unhas 1991 - 1997
- Koordinator Pengajaran MKU Wawasan Sosiasl Budaya Bahari 2004 - 2009.
- Ketua Departemen/Program Studi Antropologi 2007 - sekarang.

Keterlibatan dalam Kegiatan Penelitian Ilmiah

- Anggota Penelitian Masyarakat Terasing Topembuni Mamuju, Toseko Luwu, Komunitas Ammatoa Bulukumba (Sulawesi Selatan), Orang Wiwirano Kendari, dan Orang Marobo Muna Sulawesi Tenggara). Dibiayai Departemen Sosial RI Jakarta 1989.
- Koordinator Penelitian "Studi Analisis Sosial *Coral Reep Rehabilitation and Management Programme* (COREMAP) Provinsi Sulawesi Selatan" Periode 1996/1997 dan Periode 1997/1998. Kerjasama PTT - LIPI Jakarta dengan Jurusan Antropologi Fisipol Unhas. Proyek dibiayai oleh Bank Dunia.

- Anggota Tim Penelitian "*Abrasion, Mangrove Conservation, and Coral Reep Degradation*" (1989/1999). Jurusan Antropologi UI Jakarta Bekerjasama dengan Jurusan Geografi UI, Jurusan Etnobotani IPB Bogor, dan Jurusan Antropologi Unhas. Penelitian berlokasi di Kawasan Pantai Wajo, Bone, Sinjai, dan Pulau Sembilan (Teluk Bone). Proyek dibiayai oleh Unesco dan *Ford Foundation*.
- Koordinator Penelitian "Model Pengembangan Sosial Ekonomi Nelayan di Sulawesi Selatan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan" (1999/2000). YPMA (Yayasan Pengembangan Agro-Maritim) bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Koordinator Penelitian "Pemanfaatan Sumberdaya Laut dalam Rangka Optimasi Zonasi Taman Laut Taka Bonerate" (2000). Proyek Penelitian dilakukan oleh LIPI dalam rangka implementasi Program COREMAP.
- Anggota Tim Penelitian "Penataan Lingkungan Kawasan Bahari Terpadu di Pulau Sembilan, Sulawesi Selatan" (2001/2002). Direktorat Jenderal Urusan Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan PSTK (Pusat Studi Terumbu Karang) Universitas Hasanuddin.
- Anggota Tim Penelitian "Bentuk-bentuk Sekuritas Sosial Masyarakat Nelayan Kawasan Perkotaan Parepare (Sulawesi Selatan), Baubau Buton (Sulawesi Tenggara), dan Ternate (Maluku Utara), 2005. Proyek Penelitian dibiayai oleh Departemen Sosial RI.
- Ketua Peneliti Menggali Pengetahuan Lokal dan Kreativitas Petani yang Menunjang bagi Pengembangan Agribisnis Beras Berkualitas di Sidrap, Gowa, dan Tator, 2007. Penelitian dilakukan oleh Balitbangda Tingkat I Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Anggota Tim Peneliti "Peranan Sekolah Lapang dalam Pengembangan Pengetahuan dan Kreativitas Petani di Desa Manjalling (Gowa) dan Desa Soreang (Maros)". Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 2007/2008. Dibiayai oleh Ditjen Dikti, Kemendiknas.
- Ketua Peneliti Menggali Kelembagaan Lokal dan Wawasan Budaya Bahari yang Menunjang bagi Penguatan Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial. Penelitian Hibah Stranas Universitas Hasanuddin, 2010.

Paper dalam Acara Lokakarya, Seminar Nasional dan Internasional 5 Tahun Terakhir:

- "Pengelolaan Laut Kawasan Terumbu Karang dalam Perspektif Budaya Bajo: Kasus Taka Bonerate, Sulawesi Selatan". Dipresentasi

dalam *Workshop Identifikasi Tradisi Adat Bajao* di Hotel Peninsula, Jakarta, tanggal 24 Juli 2008 atas kerjasama CV Mareto Agri Persada dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

- "Dimensi Sosial Budaya Pesisir Ditinjau dari Pendekatan Sejarah Antropologi Marin: Kasus Teluk Bone". Dipresentasi dalam *Kongres Nasional VI Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP Jakarta, Tgl 26-28 Agustus 2008
- "Memperluas Area Kajian Budaya dan Mengabdikan Karya". Disajikan pada *Seminar Internasional Sejarah dan Budaya Sulawesi Selatan*; dilangsungkan di Makassar Golden Hotel (MGH), Makassar, Tgl 12 Mei 2009.
- "Konflik Horizontal dan Vertikal di Indonesia, Sumber/Faktor Penyebab, dan Solusinya". Disajikan dalam acara *Seminar Sejarah dan Budaya Sulawesi Selatan* diselenggarakan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, di Aula Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal, Makassar, 26 Mei 2010.
- "The Management of Fishery Resource Use of Takabonerate Coral Reef Zone Viewed from Constructionist Perspective". Paper presented at the *International Symposium on Small Islands and Coral Reefs*, in Ambon August 4-5, 2010
- "Directing Socio-economic Dynamic of Poor Fishing Communities by Learning from Prosperous Fishing Communities". Disajikan pada acara *Seminar Internasional Dies Natalis Fisip Unhas*, 2 - 3 Maret 2011 di Gedung Iptek, Kampus Unhas, Makassar.
- "Pengalaman Pengembaraan Pelayaran Pelaut Bugis-Makassar dan Reproduksi Nilai Budaya Kemaritiman Nusantara". Makalah dipresentasi pada acara "Seminar Sejarah dan Budaya" yang diselenggarakan oleh BPSNT Makassar di Aula BPSNT Makassar Jalan Sultan Alauddin, 12 Mei 2011.
- "Fokus pada Perilaku dan Konsekuensi Lingkungan Ditimbulkannya dengan Mode Penjelasan Kontekstual Progresif: Sebuah Alternatif dalam Studi Ekologi Budaya Maritim". Dipresentasi pada Seminar Internasional dengan Tema "Metodologi Penelitian Sosial" diselenggarakan oleh Program Studi Magister Sosiologi Fisip Unhas, 16 Mei 2011 di Gedung Iptek Kampus Unhas Tamalanrea Makassar.
- "Dinamika Kelembagaan Sosial Ekonomi Orang Bajo". Dipresentasi pada Lokakarya Telaah Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Pantai: Melestarikan Budaya Bahari dalam

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata dengan tema "*Jagat Bahari Nusantara*" di Hotel Kenari Tower Makassar, 18 Mei 2011.

Publikasi Ilmiah:

- "Masyarakat Topebumi, Toseko, Komunitas Ammatoa di Sulawesi Selatan dan Masyarakat Wiwirano di Sulawesi Tenggara; dan Orang Marobo di Muna", 1991. Dimuat dalam *Masyarakat Terasing di Indonesia* (Koentjaraningrat ed.), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sistem Penguasaan Wilayah Perikanan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati di Laut oleh Masyarakat Nelayan Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan (1996). Diterbitkan Oleh Bagian Proyek Pengkajian dan Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- *Co-author* dalam "*Abrasion, Mangrove Conservation, Coral Reef Degradation*" (1999). Department of Anthropology, Social Science Faculty, University of Indonesia Jakarta and Unesco.
- *Potensi dan Kendala dala Pengelolaan Terumbu Karang: Pedoman Intervensi Berbasis Masyarakat* (Abd. Rahman Patji ed, 1999). Kerjasama antara Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) dengan Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI) Jakarta.
- "Kearifan Lokal Tradisional yang Tersisa dan Munculnya Praktik Baru yang Potensial pada Komunitas Nelayan Pulau Sembilan". Dalam *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Diterbitkan oleh Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Bekerjasama dengan Masagena Press Makassar, 2007.
- "Dinamika Keberagaman Komunitas Lokal dengan Pendatang Terkait dengan Pariwisata: Kasus Komunitas Pesisir dan Pulau-Pulau". Dalam *Multikulturalisme dalam Pembangunan Karakter Bangsa: Pengalaman Sulawesi Selatan*. Kerjasama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dengan Yayasan Al-Mualim, Tahun 2010.

Essey/Jurnal:

- "Memahami Strukturalisme dalam Antropologi Sosial Budaya". *Jurnal SEMAWA*. Fisip-Universitas Hasanuddin, 1990
- "Holisme dalam Studi Antropologi dan Implikasi metodologinya". *Essei Antropologi IV* 1991, IKA Fisip-Unhas.

- "Strategi-strategi Adaptif Nelayan: Suatu Studi Antropologi Perikanan". *Essei Antropologi* VII 1992, IKA Fisip-Unhas.
- "Antropologi Maritim, Antropologi Marin, dan Antropologi Perikanan: Sebuah Perkenalan Kajian". *Essei Antropologi* VIII 1995, IKA Fisip-Unhas.
- "Ongko dan Rompong Sebagai Model Sistem Penguasaan Wilayah Perikanan Laut yang Adaptif, Produktif, dan Berwawasan Lingkungan". Artikel dimuat dalam Buletin *Indigenous Knowledge* LIPI, 1997.
- "Perilaku Eksploitasi Sumberdaya Perikanan Taka dan Konsekuensi Lingkungan dalam Konteks Internal dan Eksternal: Studi Kasus Pada Nelayan Pulau Sembilan". *Jurnal Humaniora (Budaya Sastra dan Bahasa)* Vol. 17. No.3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Oktober 2005.
- "Paradigma Komunalisme Pengelolaan Sumberdaya Laut Terumbu Karang oleh Komunitas Nelayan Bajo Takabonerate Masa Lalu. *Buletin Penelitian, Seri Sosial Budaya dan Humaniora*. Juni 2008, VOL 7 Edisi Khusus. Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- "Penganekaragaman dan Penyeragaman dalam Dinamika Usaha Penangkapan Ikan Kawasan Terumbu Karang: Sebuah Penjelasan Prosesual dan Kontekstual". *Jurnal Antropology Indonesia* No. 1 Januari-April 2009.

Fortcoming Publication:

- "*The Management of The Fishery Resource Exploitation of Takabonerate Coral Reef Zone Viewed from Constructionist Perspective*". Paper was presented in the Internasional Seminar "Sail Banda" in Ambon, 4 - 5 August 2010. *International Prociding*.



Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si.

Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan,

15 Agustus 1964

Warga keturunan *Pelaut-Pasompe* Bugis-Makassar ini menempuh pendidikan formal: (1) Sekolah Dasar (1976), SLTP (1980), dan SLA~IPA (1983) yang ketiganya diselesaikan di Kabupaten Bulukumba, (2) pendidikan Sarjana Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (1988) di Universitas Hasanuddin, dan (3) pendidikan Magister Program Ilmu-Ilmu Sosial, Konsentrasi Sosiologi dan

Antropologi pada Program Pascasarjana UNPAD Bandung (1997). Beberapa karya akademik yang pernah diselesaikan: (1) Analisis Pengembangan Desa Pantai di Kabupaten Pangkep, 1988, Skripsi Sarjana, Sponsor: *The Toyota Foundation Japan*; (2) Studi Tentang Organisasi Pengelolaan dan Pemasaran Sumberdaya Laut Sulawesi Selatan, Sponsor PSL UNHAS, 1989; (3) Analisis Sosial Ekonomi Kehadiran Kawasan Industri Makassar pada Masyarakat Sekitar Kawasan, Kerjasama Departemen Perindustrian dengan PSL UNHAS, 1989; (4) Sistem Pengetahuan Lokal Bugis-Makassar Konjo Mengenai Kebaharian (*Pallopien*), 1992-1993, Sponsor: *The Toyota Foundation Japan*; (5) Studi Pengembangan Desa-Desa Pantai di Sulawesi Selatan, Kerjasama Menteri KLH dengan PPLH UNHAS, 1993; (6) Studi Kelayakan Potensi Sumberdaya Pulau Muna dan Buton dalam Rangka Program Transmigrasi. Kerjasama BALITNAS dengan Fakultas Pertanian UNHAS, 1994; (7) Transformasi Sosio~Kultural: Model Pengembangan Masyarakat Pantai (Studi Kasus pada Komunitas Nelayan Makassar di Dua Desa Pantai Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan), Tesis Magister, Sponsor: TMPD DIKTI dan *The Toyota Foundation Japan*.

Sejak tahun 1997 banyak mengabdikan diri sebagai konsultan dan menulis di bidang : (1) Lingkungan Hidup, Kerjasama dengan sejumlah Perusahaan Swasta Nasional dan BUMN, 1997-2011; (2) Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, Kerjasama dengan Pemda Kabupaten di Sulawesi Selatan, 2002-2003; (3) Rencana Strategis Pemberdayaan Gender, Kerjasama dengan Pemda Kabupaten di Sulawesi Selatan dan Gorontalo, 2003-2007; (4) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Bahari, Kerjasama dengan Pemda Kabupaten Halmahera

Tengah, 2009; (5) Kelembagaan Irigasi, Kerjasama DEPTAN dengan LPPM UNHAS, Berbantuan IFAD, 1990-1991; (6) Community Environmental Management Wilayah DAS Siwa Kabupaten Wajo, Kerjasama CEPI~CANORA Berbantuan Kanada, 2002; (7) Penjajakan Wilayah Program ACCESS : Kemiskinan dan Gender di Sulawesi Selatan, Sponsor : AusAID, 2002; (8) Evaluasi Keberhasilan Program Bantuan IDB di Bidang Teknologi Pertambakan, 2006, Sponsor CANORA~IDB; dan (9) Anggota Working Group Community Environmental Management (WG~CEM), Kerjasama CEPI dengan PPLH UNHAS. 1999-2002; serta Advokator Pengelolaan Lingkungan Hidup Bernafaskan Keagamaan, 2003-2008, Kerjasama Bappedalda Provinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua dan Fakfak Irian Jaya.

Sejak tahun 1990 sampai sekarang masih tetap mengabdikan sebagai tenaga akademik di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNHAS, mengajarkan mata pelajaran: Sosiologi, Dinamika Pembangunan, Komunikasi dan Perubahan Sosial, Tugaslapang Sosiologi Pertanian, Perencanaan Tata Ruang Pertanian, Berfikir Kreatif, Kewirausahaan, Etika Bisnis, dan Analisis Persoalan Agrosistem.

JAGAD BAHARI NUSANTARA:
Pendasaran Kearifan Lokal bagi Dinamika Pranata Sosial
dalam Meniti Semangat Zaman
Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS.

POLITIK IDENTITAS ORANG BAJO
Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.

INTERAKSI ORANG BAJO DAN ORANG BUGIS
Dalam Konteks Kearifan Lokal-Global di Desa Sulaho,
Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara
Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si.

DINAMIKA KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI ORANG BAJO
Dr. Mungsi Lampe, M.A.

SISTEM PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN
KOMUNITAS BAHARI
Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si.



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2011

ISBN 978-979-1274-44-9



9 789791 274449

Perpus
Jend